



**BERSAMA MEMBANGUN**  
**INDONESIA**

# DAFTAR ISI

---

**iii**

Ikhtisar Data Keuangan Penting

**16**

Laporan Dewan Pengawas Syariah

**30**

Profil Perseroan

**150**

Perkara Penting Yang Dihadapi

**iv**

Peristiwa Penting 2018

**18**

Profil Dewan Pengawas Syariah

**42**

Pembahasan Dan Analisis Manajemen

**154**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

**08**

Laporan Dewan Komisaris

**22**

Laporan Direksi

**46**

Manajemen Resiko

**155**

Pernyataan Dewan Komisaris Dan Direksi

**12**

Profil Dewan Komisaris

**25**

Profil Direksi

**72**

Tata Kelola Perusahaan

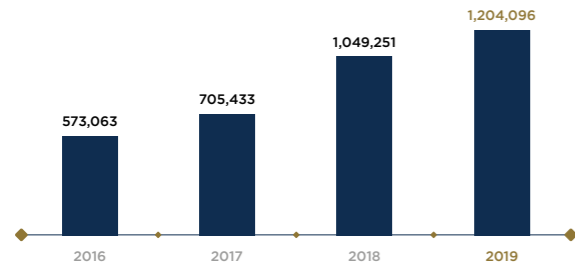
# IKHTISAR DATA KUANGAN PENTING

Summary of Significant Financial Data

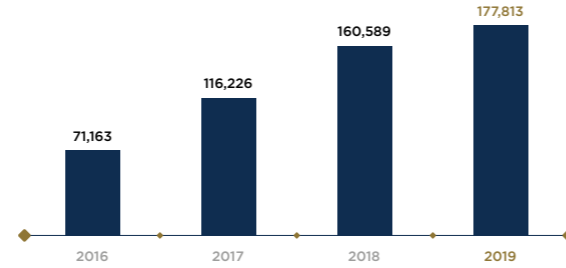
# PERISTIWA PENTING 2019

Profil of Sharia of Supervisory Board

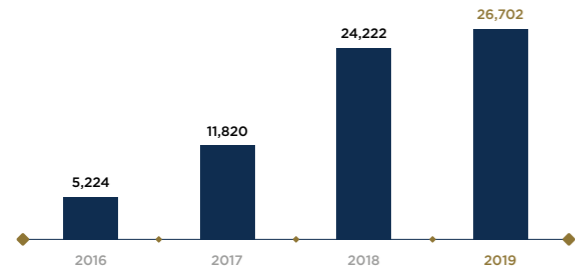
Total booking



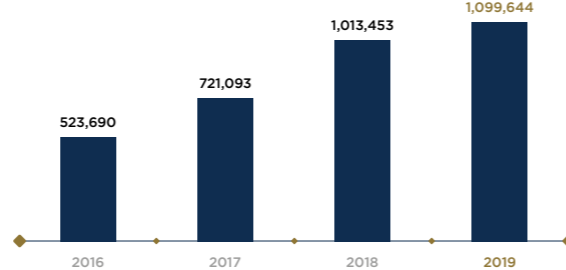
Revenue / pendapatan



Net profile after taxn / laba bersih



Asset managed / aktiva dikelola



## Key Ratios

ROA

3,57 %

ROE

10,21 %

Non Performing Loan

0,55 %



Mining Expo with PT Sany Perkasa 2019



Signing Ceremony PT. Gaya Makmur Putra 2019 (GMT GROUP)



HUT MNCL 5TH VICTORIOUS



Rakernas 2019



LAPORAN  
DEWAN KOMISARIS **01**

# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report of Board of Commissioners

LAPORAN DEWAN KOMISARIS  
Report of Board of Commissioners



◆ **WITO MAILOA**  
Komisaris Utama  
President Commissioner



**“Meskipun situasi industri pembiayaan sepanjang tahun 2019 dapat dikatakan kurang baik, namun Perseroan masih dapat menghasilkan performance yang positif, hal ini terlihat dari bertumbuhnya Perseroan baik dari sisi aset kelola (asset managed) maupun laba bersih”**

“Despite the financing industrial situation during 2019 which may be said not well, the Company was still able to have a positive performance, which is shown from the Company's growth either in the assets managed or in the net profit”.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,  
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga Perseroan dapat menutup tahun 2019 dengan baik. Dalam laporan ini, Dewan Komisaris menyampaikan laporan mengenai penilaian kinerja Direksi, pengawasan terhadap implementasi strategi perusahaan, pandangan atas prospek usaha, pandangan atas implementasi tata kelola perusahaan dan penilaian atas komite-komite penunjang Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2019, kondisi ekonomi global masih belum menunjukkan perbaikan bahkan ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi dunia makin lambat, meskipun ketidakpastian pasar keuangan sedikit mereda pasca kesepakatan dagang AS dan China pada Oktober 2019. Perekonomian global yang belum kondusif tersebut berimbas pada pertumbuhan ekonomi domestik yang mengakibatkan ekonomi Indonesia di tahun 2019 hanya bertumbuh pada angka 5,02%.

Our respected shareholders and stakeholders,

Praise and thank God Almighty for His grace that the Company could close the year 2019 well. In this report, the Board of Commissioners presents the report on the evaluation of the Board of Directors' performance, supervision on the company's strategy implementation, view on business prospects, view on the corporate governance implementation and evaluation on the Board of Commissioners' supporting committees.

During 2019, the global economic condition has not shown improvement, the world economic growth even tended to slow down, although the financial market uncertainty slightly subsided after the trade agreement between USA and China in October 2019. The global economy that was still not conducive gave impact on the domestic economic growth, causing the economy of Indonesia in 2019 to grow only at 5.02%.

Meskipun situasi industri pembiayaan sepanjang tahun 2019 dapat dikatakan kurang baik, namun Perseroan masih dapat menghasilkan performance yang positif, hal ini terlihat dari bertumbuhnya Perseroan baik dari sisi aset kelola (asset managed) maupun laba bersih. Perseroan berhasil membukukan total aset kelola (asset managed) sebesar Rp1.1 triliun atau naik 8% dibandingkan total aset kelola (asset managed) tahun 2018 yang sebesar Rp 1.0 triliun, sedangkan di sisi laba bersih Perseroan berhasil membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 9% menjadi Rp.26,70 miliar.

Dalam melakukan pengawasan, selama tahun 2019 Dewan Komisaris secara aktif memanfaatkan fungsi komite-komite di bawah Dewan Komisaris untuk melakukan review secara periodik terhadap rencana kerja, pelaksanaan rencana kerja, kinerja keuangan, laporan-laporan audit internal, eksternal auditor dan/ atau regulator serta laporan-laporan lainnya yang tersedia. Hasil review tersebut dilaporkan dan dibahas kembali dalam rapat internal Dewan Komisaris.

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan secara aktif dan berkala atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik demi menjamin tercapainya kepentingan Perseroan dan para Pemangku Kepentingan Perseroan. Untuk memastikan bahwa seluruh mekanisme pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris sudah berjalan optimal, Dewan Komisaris telah dibantu oleh Komite Audit, Komite Tata Kelola, Komite Pemantau Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Dewan Komisaris menilai bahwa ke-4 komite tersebut telah memberikan dukungan pro-aktif dan efektif kepada Dewan Komisaris sehingga mempermudah tugas Dewan Komisaris di dalam melakukan tugas pengawasannya. Dalam pelaksanaannya, Dewan Komisaris memandang bahwa struktur Tata Kelola Perusahaan yang telah dikembangkan di lingkungan Perseroan sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dinilai dapat mendukung pertumbuhan Perseroan yang sehat secara berkesinambungan.

Despite the financing industrial situation along 2019 which may be said not well, the Company was still able to have a positive performance, which is shown from the Company's growth either in the assets managed or in the net profit. The Company was able to book the total assets managed of Rp.1.1 trillion or increasing at 8% from the total assets managed in 2018 of Rp.1.0 trillion, while the Company's net profit grew at 9% to become Rp.26.70 billion.

In its supervision during 2019, the Board of Commissioners actively utilize the functions of committees under the Board of Commissioners to conduct periodical review on the work program, work program implementation, financial performance, internal audit reports, external auditor and/or regulator and other reports available. The results of review are reported and discussed again in the Board of Commissioners' internal meeting.

During 2019, the Board of Commissioners conducted the supervisory function actively and periodically on the implementation of good Corporate Governance in order to ensure the achievement of Company's and Company's Stakeholders' interests. To ensure that the whole supervisory mechanism undertaken by the Board of Commissioners has worked optimally, the Board of Commissioners was assisted by the Audit Committee, Governance Committee, Risk Monitoring Committee and Nomination & Remuneration Committee. The Board of Commissioners considers that the 4 committees have given proactive and effective supports to the Board of Commissioners, thus simplifying the Board of Commissioners' job in conducting its supervisory duty. In the implementation, the Board of Commissioners considers that the Corporate Governance structure developed in the Company's environment has complied with the Articles of Association and the prevailing legislation, thus considered able to support the Company's robust growth sustainably.

Atas nama Dewan Komisaris, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham, mitra bisnis, pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi perkembangan Perseroan. Selanjutnya saya juga memberikan apresiasi kepada Direksi, segenap jajaran manajemen dan seluruh karyawan yang telah bekerja keras untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Semoga prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan pada masa mendatang.

On behalf of the Board of Commissioners, I would like to express my gratitude to the shareholders, business partners, customers and all stakeholders who have given their confidence and support to the Company's development. Further, I should also appreciate the Board of Directors, all management members and all employees who have worked hard to support the Company's business. I hope the performance achieved will be continuously increased in the future.

Atas Nama Dewan Komisaris,  
on behalf of Board of Commissioners,



**Wito Mailoa**

---

**Komisaris Utama**  
President Commissioner

## PROFIL DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioner's Profile

PROFIL DEWAN KOMISARIS  
Board of Commissioner's Profile



■ **Wito Mailoa**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Manado pada tahun 1969. Saat ini berdomisili di Jakarta. Diangkat sebagai Komisaris Utama Perseroan berdasarkan hasil Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 September 2018.

Beliau menyelesaikan pendidikan formal pada tahun 1991 dengan gelar Bachelor of Science in Management Information System dari San Diego State University, Amerika Serikat. Selanjutnya gelar Master of Business Administration in Finance dari California State Polytechnic University Pomona, Amerika Serikat, pada tahun 1993.

Bergabung dengan MNC Group melalui PT MNC Securities sebagai Direktur Utama pada Oktober 2009 sampai tanggal 21 Januari 2013. Beliau memulai karir pada tahun 1995 di PT Harumdana Securities dan pada tahun 1998 di PT Sigma Batara Securities. Kemudian pada tahun 1999 beliau menjadi Associate Director di PT Indoverse Securities. Antara tahun 2001-2008 beliau menjabat sebagai Direktur di PT CIMB-GK Securities Indonesia, antara tahun 2008-2009 menjabat sebagai Direktur di PT OSK Nusadana Securities Indonesia, menjabat sebagai Direktur Independen PT MNC Kapital Indonesia Tbk antara tahun 2012-2016, dan menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk antara tahun 2016-2018, dan sejak tanggal 31 Mei 2018 diangkat menjadi Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk.

An Indonesian Citizen, born in Manado in 1969. Currently domiciled in Jakarta. Appointed as the Company's President Commissioner based on the result of Shareholders' Circular Resolution In Lieu of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders on 21st September 2018.

He completed his formal education in 1991 with the Bachelor of Science degree in Management Information System of San Diego State University, United States of America. Further he got the Master of Business Administration in Finance degree of California State Polytechnic University Pomona, United States of America in 1993.

Joined MNC Group in PT MNC Securities as the President Director in October 2009 until 21st January 2013. He started his career in 1995 in PT Harumdana Securities and in 1998 in PT Sigma Batara Securities. Then in 1999 he became the Associate Director in PT Indoverse Securities. During 2001-2008 he held the position of Director in PT CIMB-GK Securities Indonesia, during 2008-2009 as the Director in PT OSK Nusadana Securities Indonesia, as an Independent Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk in 2012-2016, and as the Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk in 2016-2018, and since 31st May 2018 has been appointed as the President Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk.



■ **Erdie Suriaherdadi Manan**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, lahir di Jember (Jawa Timur), pada tahun 1954. Beliau berhasil menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) Electrical Engineering di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1978 dan program studi Magister Business Administration di IPMI Business School Jakarta pada tahun 1988.

Berpengalaman lebih dari 36 tahun, Beliau mengawali karirnya pada tahun 1979 di perusahaan yang bergerak dibidang Oil and Gas Services yaitu Schlumberger Overseas SA, dengan penugasan di Indonesia, Australia dan Middle East, hingga menjabat sebagai General Field Engineer pada tahun 1988 di PT Elnusa Schlumberger Wireline. Pada tahun 1989, Beliau memulai karirnya pertama kali di dunia leasing di PT ORIX Indonesia Finance sebagai Staff Marketing. Selama berkarir di ORIX, Beliau menjalani berbagai penugasan dibidang Credit Analyst, Credit Admin, Internal Audit, IT, Corporate Planning, Tax & Accounting, HR, Business Development, dan jabatan terakhir beliau adalah sebagai Vice Director pada tahun 2009. Pada periode 2000 - 2002, Beliau sempat bergabung dengan ABN Amro dan ditugaskan sebagai President Director ABN Amro Indonesia Finance, sebelum kembali bergabung dengan ORIX Indonesia Finance. Pada periode 2006 - 2009, beliau juga ditugaskan sebagai Komisaris di Bank Akita. Pada tahun 2011 hingga awal 2016, Beliau menjadi Technical Advisor di ORIX Indonesia Finance.

An Indonesian Citizen, born in Jember (East Java) in 1954. He completed the study program of Stratum One (S1) of Electrical Engineering in Bandung Institute of Technology (ITB) in 1978 and the study program of Master of Business Administration in IPMI Business School Jakarta in 1988.

Being experienced for over 36 years, he started his career in 1979 in a company dealing in Oil and Gas Services, i.e. Schlumberger Overseas SA, assigned in Indonesia, Australia and Middle East, until holding the position as General Field Engineer in 1988 in PT Elnusa Schlumberger Wireline. In 1989, he started his first career in the leasing world in PT ORIX Indonesia Finance as a Marketing Staff. During his career in ORIX, he was assigned in various fields as Credit Analyst, Credit Admin, Internal Audit, IT, Corporate Planning, Tax & Accounting, HR, Business Development, and his last position was as Vice Director in 2009. During 2000 - 2002, he joined ABN Amro and was assigned as the President Director of ABN Amro Indonesia Finance, before returning to join ORIX Indonesia Finance. During 2006 - 2009, he was also assigned as the Commissioner of Bank Akita. From 2011 until early 2016, he became the Technical Advisor in ORIX Indonesia Finance. And in 2016, he joined the big family of MNC Group, in the business unit of MNC Leasing, engaged in Multi Finance service and was entrusted as an Independent Commissioner.



LAPORAN DEWAN  
PENGAWAS SYARIAH

02



# LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Report of Sharia of Supervisory Board



**Muhammad Nadrattuzaman Hosen**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah  
Chairman of the Sharia Supervisory Board

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala berkah dan hidayah Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Dalam laporan ini, saya mewakili Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengucapkan selamat kepada manajemen dan seluruh karyawan Perseroan atas pencapaian dan kinerja yang sangat positif, dimana Perseroan kembali berhasil mencatatkan pertumbuhan pembiayaan syariah yang sangat positif sebesar 52% dari Rp.18,2 miliar di tahun 2018 menjadi Rp. 27,7 miliar di tahun 2019.

Perseroan juga mampu menjaga kualitas pembiayaan syariah yang terlihat dari rasio NPF pembiayaan syariah sebesar 0%. Pertumbuhan Perseroan di tahun 2019 ini tentunya tidak terlepas dari usaha, kerja keras dan kerja sama dari seluruh pihak di Perseroan dan juga ditambah dengan adanya dukungan serta kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat secara umum dan khususnya konsumen terhadap kinerja Perseroan. Amanah yang diberikan masyarakat dan konsumen sebaiknya terus dijaga dan dipertahankan dengan baik.

Peace be upon you, and Allah's mercy and blessings  
Bismillaahirrahmaanirrahiim

Praise and gratitude we bring to the presence of Allah SWT for all His blessings and guidance he has bestowed on us all. In this report, I represent the Sharia Supervisory Board (DPS) congratulating the management and all employees of the Company for their very positive achievements and performance, as the Company has again managed to record a very positive growth in sharia financing of 52% from Rp. 18.2 billion in 2018 to Rp.27.7 billion in 2019.

The Company was also able to maintain the sharia financing quality as shown from the NPF ratio of sharia financing at 0%. The Company's growth in this 2019 is certainly not separated from the efforts, hard work and cooperation of all parties in the Company plus the support and trust given by the society in general and particularly the consumers on the Company's performance. The mandate given by the society and consumers should preferably be continuously kept and maintained properly.

# LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Report of Sharia of Supervisory Board

Sepanjang tahun 2019, DPS telah menjalankan fungsi dan tugasnya secara independen dalam melakukan pengawasan atas operasional Perseroan untuk menjaga kesesuaian dengan ketentuan syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam melakukan kegiatan pengawasan, DPS terlibat dalam serangkaian kegiatan rapat, baik dengan Direksi atau jajaran di bawah Direksi, atau dengan Dewan Komisaris, melakukan kegiatan review atas kebijakan atau ketentuan internal yang telah ditetapkan, serta memberikan opini terkait dengan kegiatan operasional, pengembangan produk, dan fitur.

DPS secara rutin akan terus menyampaikan usulan, pendapat, arahan, dan opini serta memberikan persetujuan untuk hal-hal yang menjadi bahan pembicaraan. Selanjutnya diharapkan agar ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, baik yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), maupun Fatwa-Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, secara konsisten tetap terjaga.

DPS berharap agar Perseroan dapat terus meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan syariah yang berlaku. Selain itu, sinergi yang telah dibangun selama ini dapat dijaga dan terus ditingkatkan. Komitmen yang sudah ada harus terus dijaga.

Pada akhirnya kami berharap dan berdoa, semoga usaha untuk mencapai pertumbuhan dan kemajuan yang lebih baik serta berkualitas, akan selalu mendapat bimbingan serta ridho dari Allah SWT.

During 2019, DPS undertook its functions and jobs independently in supervising the Company's operation to maintain compliance with the conditions of sharia, Fatwa of the National Sharia Board – Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). In conducting the supervisory activities, DPS was involved in a series of meeting activities, either with the Board of Directors or members under the Board of Directors, or with the Board of Commissioners, conducted review activities on the specified internal policy or conditions, and gave opinions related to operational activities, product development, and features.

DPS will regularly present suggestions, ideas, directions and opinions and give approval for matters as the materials of discussion. Further it is expected that adherence and compliance to the applied conditions, either issued by the Financial Services Authority (OJK) by the Regulation of Financial Services Authority (POJK), or the Fatwas issued by DSN-MUI, will be consistently maintained.

DPS expects that the Company will be able to continuously improve its performance optimally while holding on to the applied sharia conditions. Besides, the synergy built so far could be maintained and continuously enhanced. The existing commitment should be continuously maintained.

Finally, we hope and pray that the efforts in achieving a better and qualified growth and progress will always be guided and be guided by Allah SWT.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**Muhamad Nadrattuzaman Hosen**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah  
Chairman of Sharia Supervisory Board

## PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Profil of Sharia of Supervisory Board

LAPORAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Report of Sharia of Supervisory Board



**Muhamad Nadratuzzaman Hosien**  
Ketua Dewan Pengawas Syariah  
Chairman of the Sharia Supervisory Board



**Dr. Jaenal Effendi, S.Ag. MA**  
Anggota Dewan Pengawas Syariah  
Member of Sharia Supervisory Board

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1961. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Peternakan IPB pada tahun 1984 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan dari IPB pada tahun 1990. Selanjutnya beliau menempuh pendidikan Post-graduated Advanced Studies in Human Ecology, VUB-Brussels, pada tahun 1994 dan Master of Economics at University of New England, Australia, pada tahun 1996. Terakhir beliau memperoleh gelar Doctor of Philosophy in Economics dari University of New England, Australia pada tahun 2001.

### Di bawah ini merupakan daftar riwayat pekerjaan dari Ketua Dewan Pengawas Syariah:

Riwayat Pekerjaan di Pemerintahan:  
staff Bina Program, Dinas Peternakan Bengkulu.1984, Kepala Seksi Perumusan dan Pengendalian Program, Dinas Peternakan Bengkulu 1985-1987 (eselon IV/a, Tugas Belajar dengan Biaya Sendiri 1987-2000, Kepala Bidang Teknologi Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati, Kementerian Riset dan Teknologi, 2001-2003 (eselon III/a), Dosen Ekonomi Islam di UIN Jakarta dengan pangkat Lektor (IV/a), 2002, Ketua Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam di UIN, 2011-2013

### Riwayat Pekerjaan di Luar Pemerintahan :

Peneliti Senior SMERU Research Institute, 2003, Staff Ahli Bidang BUMN di Komisi V, DPR RI periode 2001-2004, Vice President MACON International Consultant, 2004, Direktur Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), 2005-2009, Dekan Fakultas Ekonomi YARSI, 2009-2011, Direktur Executive Islamic Banking and Finance (IBFI) Trisakti, 2011-2013, Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia, 2014 -2017

Saat ini selain menjadi Ketua Dewan Pengawas Syariah Perseroan, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

An Indonesian Citizen, born in 1961. He got his bachelor degree of the Faculty of Animal Husbandry at IPB (Bogor Institute of Agriculture) in 1984 and continued with the post graduate degree in Area and Rural Development Planning at IPB in 1990. Further he took the Post-graduated Advanced Studies in Human Ecology, VUB-Brussels in 1994 and Master of Economics at University of New England, Australia in 1996. The last he got the degree of Doctor of Philosophy in Economics at University of New England, Australia in 2001.

### Below is the list of job experiences of the Chairman of Sharia Supervisory Board:

Job Experiences in Government Administration:  
Staff of Coaching Program, Animal Husbandry Department of Bengkulu, 1984, Head of Program Formulation and Control Section, Animal Husbandry Department of Bengkulu, 1985-1987 (echelon IV/a), Study Assignment at own expense, 1987-2000, Head of Environment and Biodiversity Technology Sector, 2001-2003 (echelon III/a), Lecturer of Islamic Economy in UIN Jakarta of Lecturer rank (IV/a), 2002, Chairman of Islamic Economy Assessment and Development Center in UIN, 2011-2013

### Job Experiences outside Government Administration:

Senior Researcher in SMERU Research Institute, 2003, Expert Staff of BUMN (State-Owned Enterprise) in Committee V, DPR (People's Representative Council) of RI for the period of 2001-2004, Vice President of MACON International Consultant, 2004, Director of Sharia Economic Communication Center (PKES), 2005-2009, Dean of Faculty of Economics of YARSI, 2009-2011, Executive Director of Islamic Banking and Finance (IBFI) of Trisakti, 2011-2013, Vice Chairman of Indonesia Waqf Body, 2014 -2017

Today he is not only Chairman of the Company's Sharia Supervisory Board, but also holds the position as Sharia Supervisory Board in PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1974. Beliau memperoleh gelar sarjana dari Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) pada tahun 1998 dan dilanjutkan dengan gelar pasca sarjana di bidang Ekonomi Islam dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah pada tahun 2005. Terakhir beliau memperoleh gelar Doktor dalam bidang Keuangan dan Perbankan Islam dari University of Georg August – Goettingen, Germany pada tahun 2013.

Saat ini selain menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan beliau juga bekerja sebagai:

Ketua Program Studi Ekonomi Islam, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor

Dosen Sarjana dan Pasca Sarjana Ekonomi Islam IPB,

Anggota BPH Pokja Perbankan - Dewan Syariah Nasional (DSN) – MUI

An Indonesian Citizen, born in 1974. He got the bachelor degree of Tribakti Institute of Islamic Religion (IAIT) in 1998, which was continued by the post graduate degree in Islamic Economy of Syarif Hidayatullah Public University of Islam (UIN) in 2005. The last he got the Doctor degree in Islamic Finance and Banking of University of Georg August – Goettingen, Germany in 2013.

Today, besides a member of the Company's Sharia Supervisory Board, he is also working as:

Chairman of Islamic Economic Study Program, Department of Economics, Faculty of Economics and Management, Bogor Institute of Agriculture (IPB)

Lecturer for Graduate and Post Graduate of Islamic Economy of IPB

Member of BPH Banking Workgroup – National Sharia Board (DSN) – MUI



LAPORAN  
DIREKSI

**03**



◆ Paulus cholot Janala  
Direktur Utama  
President Director



**“Di tengah kondisi perekonomian global maupun domestik yang masih penuh dengan berbagai tantangan, serta semakin ketatnya persaingan di industri pembiayaan nasional, Perseroan berhasil membukukan total aset kelola (asset managed) sebesar Rp1.1 triliun atau naik 8% dibandingkan total aset kelola (asset managed) tahun 2018 yang sebesar Rp1.0 triliun”**

“In the midst of global and domestic economic conditions that are still full of various challenges, and the increasingly tighter competitive in the national financing industry, the Company successfully booked the total assets managed of Rp.1.1 trillion or increasing 8% from the total assets managed in 2018 of Rp.1.0 trillion”.

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,  
Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya sehingga Perseroan masih dapat membukukan kinerja yang positif ditahun 2019. Pencapaian kinerja positif ini dapat diraih berkat sinergi dan kerjasama yang baik di internal organisasi serta kerja sama strategis dengan mitra usaha Perseroan.

Di tengah kondisi perekonomian global maupun domestik yang masih penuh dengan berbagai tantangan, serta semakin ketatnya persaingan di industri pembiayaan nasional, Perseroan berhasil membukukan total aset kelola (asset managed) sebesar Rp1.1 triliun atau naik 8% dibandingkan total aset kelola (asset managed) tahun 2018 yang sebesar Rp1.0 triliun. Sedangkan untuk aset tercatat di buku (on balance sheet) sedikit menurun dibandingkan tahun lalu yaitu sebesar Rp.747,6 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp.788,3 miliar. Penurunan tersebut semata-mata karena faktor pembiayaan executing yang belum sepenuhnya dapat mencukupi potensi bisnis yang ada.

Namun Perseroan percaya dan optimis di tahun 2020 dengan support yang lebih baik lagi dari perbankan akan dapat meningkatkan baik total aset kelola (asset managed) maupun total aset buku (on balance sheet) secara signifikan dan juga tingkat profitabilitas yang lebih baik lagi.

Tahun 2020 Perseroan menargetkan pertumbuhan total aset hingga dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Untuk

The respected shareholders and stakeholders,

Thank to the One Almighty God for His gift that enabled the Company to book a positive performance in 2019. This achievement of positive performance was enabled due to good synergy and cooperation within the organization and strategic cooperation with the Company's business partners.

In the midst of global and domestic economic conditions that are still full of various challenges, and the increasingly tighter competitive in the national financing industry, the Company successfully booked the total assets managed of Rp.1.1 trillion or increasing 8% from the total assets managed in 2018 of Rp.1.0 trillion. While the assets recorded in the book (on balance sheet) slightly decreased from the preceding year, i.e. Rp.747.6 billion from the preceding year of Rp.788.3 billion. This decrease was solely due to the executing financing factor that was still unable to fully suffice the existing business potentials.

However, the Company believes and is optimistic that in 2020, with better support from banking, it will be able to increase the total assets managed as well as the total book assets (on balance sheet) significantly, also with better profitability level.

In 2020 the Company targets the growth of total assets up to twice of that in the preceding year. To reach

mencapai target dua kali lipat yang dicanangkan tersebut Perseroan tetap akan mengandalkan pembiayaan berbasis aset sebagai kekuatan utama. Disamping itu Perseroan juga fokus mempersiapkan pembiayaan anjak piutang dan operating lease kendaraan operasional sebagai salah satu tulang punggung yang diandalkan pada tahun 2020. Tidak ketinggalan pula Unit Usaha Syariah Perseroan, ditargetkan untuk dapat tumbuh maksimal dengan produk pembiayaan utama pembiayaan porsi dana haji. Penetapan target dua kali lipat ini juga sejalan dengan cita-cita Perseroan untuk mencapai aset Rp. 5 triliun pada tahun 2025.

Sepanjang tahun 2019, Perseroan mendapatkan 2 penghargaan yaitu sebagai perusahaan multifinance dengan predikat sangat bagus pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp500 miliar - Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh Infobank pada 19 September 2019 dan perusahaan pembiayaan dengan performa excellent pada kategori perusahaan pembiayaan dengan aset Rp500 miliar - Rp1 triliun yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi pada 4 Oktober 2019.

Terakhir, mewakili manajemen, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pemegang Saham Perseroan, jajaran manajemen dan seluruh karyawan atas dukungan, dedikasi dan kerjasama dalam meningkatkan nilai Perseroan sehingga dapat mencapai kinerja terbaik di tahun 2019. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pelanggan, rekanan bisnis dan institusi keuangan yang senantiasa mendukung jalannya usaha Perseroan. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang.

this declared double target, the Company will still rely on the assets-based financing as the main strength. Besides, the Company will also focus on preparing the financing of factoring and operating lease of operational vehicles as one of the backbones relied in 2020. We also will not miss the Company's Sharia Business Unit, which is targeted to be able to grow maximally by the main financing product of pilgrimage fund financing portion. This setting of double target is also parallel to the Company's ambition to achieve Rp.5 trillion assets in 2025.

During 2019, the Company received 2 awards, i.e. as a multi finance company by notation very good in the category of finance companies having the assets of Rp.500 billion - Rp.1 trillion organized by Infobank on 19th September 2019 and as a finance company by excellent performance in the category of finance companies having the assets of Rp.500 billion - Rp.1 trillion organized by Warta Ekonomi on 4th October 2019.

Lastly, representing the management, I would like to give the highest appreciation to the Company's Shareholders, management members and all employees for their support, dedication and cooperation in enhancing the Company's value that enable the best performance achievement in 2019. I should also thank to all customers, business vendors and financial institutions that constantly support the Company's business operation. I hope the established cooperation could be enhanced further in the future.

Atas Nama Dewan Komisaris,  
On behalf of Board of Directors,



**Wito Mailoa**  
Komisaris Utama  
President Director



**Paulus cholot Janala**  
Direktur Utama  
President Director

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1970, Meraih gelar Landscape Architecture dari IPB pada tahun 1994. Pada tahun 1993-1994 beliau berkarier di PT Citra Cipta Landscape sebagai Site Manager. Selanjutnya pada tahun 1995-2000 beliau berkarier di PT Bank Bali sebagai Area Manager. Pada tahun 2001-2006 beliau berkarier di PT Indomobil Finance sebagai General Manager, dan pada tahun 2006-2007 beliau menjabat sebagai Regional Manager di PT DBS. Selanjutnya di tahun 2007-2014 beliau menjabat sebagai Senior Vice President di PT Bank OCBC NISP, dan pada tahun 2014-2015 beliau berkarier di PT Bank CIMB Niaga sebagai First Vice President. Selanjutnya pada tahun 2016-2017 beliau berkarier sebagai Corporate Executive Officer di PT HVMI. Sejak April 2017 beliau bergabung dengan PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Direktur dan sejak tanggal 21 September 2018 diangkat menjadi Direktur Utama PT MNC Guna Usaha Indonesia.

An Indonesian Citizen, born in 1970, got the degree of Landscape Architecture at IPB (Bogor Institute of Agriculture) in 1994. In 1993-1994 he had his career in PT Citra Cipta Landscape as Site Manager. Then in 1995-2000 he had his career in PT Bank Bali as Area Manager. In 2001-2006 he had his career in PT Indomobil Finance as General Manager, and in 2006-2007 he held the position as Regional Manager in PT DBS. Further in 2007-2014 he held the position as Senior Vice President in PT Bank OCBC NISP, and in 2014-2015 he had his career in PT Bank CIMB Niaga as the First Vice President. Further in 2016-2017 he had his career as Corporate Executive Officer in PT HVMI. Since April 2017 he has joined PT MNC Guna Usaha Indonesia as Director and since 21st September 2018 has been appointed as the President Director of PT MNC Guna Usaha Indonesia.



■ **Yusnandi Liauw**  
Direktur  
Director

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1969, pada tahun 1995 lulus Sarjana Ekonomi, Jurusan Manajemen Perbankan. Selama tahun 1995 - 1999 berkarir di PT. Bank Central Dagang (BCD), yang diawali dengan mengikuti Management Development Program (MDP), dengan posisi terakhir sebagai Senior Credit Officer. Pada tahun 1999 - 2000 sebagai Loan Workout Officer di BPPN, kemudian berkarir di Bank Mayapada International Tbk periode Feb 2000 - Juni 2005, dan sejak Juni 2005 bergabung dengan PT. MNC Finance, diawali sebagai Area Marketing Manager Jabodetabek. Selama berkarir di PT. MNC Finance, sudah pernah menjabat diberbagai posisi baik dalam direktorat Operasional, Marketing, Credit dan Treasury, dengan posisi terakhir sebagai General Manager Fund Raising, Mortgage & Credit Corporate Analyst. Sejak Oktober 2014 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) sebagai Direktur.

An Indonesian Citizen, born in 1969. In 1995 he graduated as Bachelor in Economics, majoring in Banking Management. During 1995-1999 he had his career in PT. Bank Central Dagang (BCD), started by taking the Management Development Program (MDP), with the last position as Senior Credit Officer. In 1999-2000 he was a Loan Workout Officer in BPPN, then had his career in Bank Mayapada International Tbk for the period of Feb 2000-June 2005, and since June 2005 he joined PT. MNC Finance, beginning as an Area Marketing Manager for Jabodetabek. During his career in PT. MNC Finance, he has held various positions in the directorates of Operational, Marketing, Credit and Treasury, with the last position as General Manager Fund Raising, Mortgage & Credit Corporate Analyst. From October 2014 until today, he joins PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) as Director.



■ **Henri Gunawan**  
Direktur  
Director

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1975, pada tahun 1998 lulus Sarjana Accounting, Jurusan Accounting. Selama tahun 1999 – Juni 2000 berkarir di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK-RI ) sebagai Auditor.

Pada Juni 2000 – Maret 2007 dengan posisi terakhir sebagai Accounting dan Budget Manager di PT. Astra Otoparts, Pada April 2007 – Mei 2010 berkarir di PT. Inti Ganda Perdana sebagai Tax, Budget dan Accounting Senior Manager, Pada Juni 2010 – April 2012 berkarir di PT. ABM Investama sebagai Corporate Accounting, Finance Analyst dan Taxation Manager, Pada April 2012 – April 2017 berkarir di PT. Media Djaya Bersama sebagai Finance dan Administration Division Head, kemudian berkarir di PT. Radana Bhaskara Finance periode Mei 2017 – Juni 2019 sebagai Chief Financial Officer. Sejak Juli 2019 sampai dengan saat ini, bergabung dengan PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) dan sejak tanggal 20 November 2019 diangkat menjadi Direktur PT MNC Guna Usaha Indonesia.

An Indonesian Citizen, born in 1975, in 1998 he graduated as Bachelor in Accounting, Majoring in Accounting. During 1999-June 2000 he had his career in the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI) as Auditor.

In June 2000-March 2007 his last position was as Accounting and Budget Manager in PT. Astra Otoparts. In April 2007-May 2010 he had his career in PT. Inti Ganda Perdana as Tax, Budget and Accounting Senior Manager, in 2010-April 2012 he had his career in PT. ABM Investama as Corporate Accounting, Finance Analyst and Taxation Manager. In April 2012-April 2017 he had his career in PT. Media Djaya Bersama as Finance and Administration Division Head, then had his career in PT. Radana Bhaskara Finance for the period of May 2017-June 2019 as Chief Financial Officer. From July 2019 until today, he has joined PT. MNC Guna Usaha Indonesia (MNC Leasing) and since 20th November 2019 has been appointed as Director of PT MNC Guna Usaha Indonesia.



PROFIL  
PERSEROAN **04**

# PROFIL PERSEROAN

Company Profile

PROFIL PERSEROAN

Company Profile



## KANTOR PUSAT HEAD OFFICE

Alamat : MNC Tower Lantai 23, Jl.  
Kebon Sirih No. 17-19,  
Jakarta 10340  
No. Telepon : (021) 3910 993  
No. Fax : (021) 3911 093  
Website : www.mncleasing.com

Address : MNC Tower 23<sup>rd</sup> Floor, Jl.  
Kebon Sirih No. 17-19,  
Jakarta 10340  
Phone No. : (021) 3910 993  
Fax. No. : (021) 3911 093  
Website : www.mncleasing.com



## KANTOR PERWAKILAN REPRESENTATIVE OFFICE

1. Medan  
MNC Financial Service Lantai 2  
Jl. Kapt Maulana Lubis No 12  
Medan  
Telp. (061) 69100600
2. Pekanbaru  
MNC Financial Service Lantai 3  
Jl. Arifin Ahmad No 10  
Komp Arifin Ahmad Central Ruko H-K  
Pekanbaru  
Telp. (0761) 8010500
3. Palembang  
Jl. Residen Abdul Rozak No. 15,  
Kel Bukit Sangkal, Kec Kalidoni  
Palembang  
Telp. (0711) – 563 0767
4. Jakarta 1  
MNC Tower Lantai 23  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19  
Jakarta 10340  
Telp. (021) 3910 993
5. Jakarta 2  
MNC Tower Lantai 23  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19  
Jakarta 10340  
Telp. (021) 3910 993
6. Bandung  
Jl. Naripan No. 97A Lt. 3A, Kel Kebon  
Pisang, Kec, Sumur Bandung 40112  
Telp. (022) 20545686

1. Medan  
MNC Financial Service 2<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Kapt Maulana Lubis No. 12  
Medan  
Phone: (061) 69100600
2. Pekanbaru  
MNC Financial Service 3<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Arifin Ahmad No. 10  
Komp Arifin Ahmad Central Ruko H-K  
Pekanbaru  
Phone: (0761) 8010585
3. Palembang  
Jl. Residen Abdul Rozak No. 15  
Kel. Bukit Sangkal, Kec. Kalidoni  
Palembang30114  
Phone: (0711) 5700334
4. Jakarta 1  
MNC Tower 23<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19  
Jakarta 10340  
Phone: (021) 3910 993
5. Jakarta 2  
MNC Tower 23<sup>rd</sup> Floor  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19  
Jakarta 10340  
Phone: (021) 3910 993
6. Bandung  
Jl. Naripan No. 97A, 3<sup>rd</sup> Fl.  
Kel. Kebon Pisang, Kec. Sumur  
Bandung  
Bandung 40112  
Phone: (022) 20545 686

7. Semarang  
Wisma HSBC Lantai 5 suite 501  
Jl. Gajah Mada No. 135  
Semarang 50134  
Telp. (024) 8456434

8. Surabaya  
Gedung Bursa Efek Lantai 3A  
Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution No.  
21  
Surabaya  
Telp. (031) 5353667

9. Denpasar  
Gedung Indovision-Bali Lantai 1 Unit E  
Jl Diponegoro No. 109  
Bali  
Telp. (0361) 231289

10. Banjarmasin  
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 18 RT 14  
Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara  
Kalimantan Selatan 70121  
Telp. (0511) 674 1017

11. Balikpapan  
Gedung MNC Bank Lt. 2,  
Jl. Jend. Sudirman No. 327, Kel. Damai  
Kec. Balikpapan Selatan 76114  
Telp. (0542) 8519923

12. Makassar  
Jl. Gunung Latimojong 46B  
Kel. Maradekaya Selatan, Makasar  
Sulawesi Selatan 90141  
Telp. (0441) 363 4643

7. Semarang  
Wisma HSBC 5<sup>th</sup> Floor, Suite 510  
Jl. Gajah Mada No. 135  
Semarang 50134  
Phone: (024) 8456434

8. Surabaya  
Gedung Bursa Efek Floor 3A  
Jl. Taman Ade Irma Suryani Nasution No. 21  
Surabaya  
Phone: (031) 99205700

9. Denpasar  
Gedung Indovision-Bali 1<sup>st</sup> Floor, Unit E  
Jl Diponegoro No. 109  
Denpasar, Bali  
Phone: (0361) 231289

10. Banjarmasin  
Jl. Pangeran Hidayatullah No. 18, 3<sup>rd</sup> Floor  
Kel. Sungai Jingah Kec. Banjarmasin Utara  
Kalimantan Selatan 70121  
Phone: (0511) 674 1287

11. Balikpapan  
Gedung MNC Bank 2<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Jend. Sudirman No. 327  
Kel. Damai Kec. Balikpapan Selatan  
Balikpapan 76114  
Phone: (0542) 8519923

12. Makassar  
Ratulangi Point Building 2<sup>nd</sup> Floor  
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 2  
Makassar  
Sulawesi Selatan 90114  
Phone: (0441) 3622859

## RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT MNC Guna Usaha Indonesia (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Indo Finance Perkasa pada tahun 1994. Pada 4 Desember 2014, PT MNC Kapital Indonesia Tbk mengambilliah kepemilikan PT Indo Finance Perkasa. Seiring dengan akuisisi tersebut, Perseroan berganti nama menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia (atau lebih dikenal dengan MNC Leasing).

## COMPANY'S BRIEF HISTORY

PT MNC Guna Usaha Indonesia (“Company”) was incorporated under the name PT Indo Finance Perkasa in 1994. On 4th December 2014, PT MNC Kapital Indonesia Tbk took over the ownership of PT Indo Finance Perkasa. Along with the acquisition, the Company's name was changed to PT MNC Guna Usaha Indonesia (or better known by MNC Leasing).



**KEGIATAN USAHA PERSEROAN**

Sesuai dengan anggaran dasar dan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Menjalankan usaha pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur, antara lain sewa pembiayaan (finance lease), jual dan sewa-balik (sale and leaseback), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring without recourse), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, pembiayaan proyek dan/atau pembiayaan infrastruktur;
- Menjalankan usaha pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha debitur, antara lain jual dan sewa-balik (sale and leaseback), anjak piutang dengan pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring with recourse), anjak piutang tanpa pemberian jaminan dari penjual piutang (factoring without recourse) dan/atau fasilitas modal usaha;
- Menjalankan usaha pembiayaan multiguna, yaitu pembiayaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktivitas produktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan, antara lain sewa pembiayaan (finance lease), pembelian dengan pembayaran secara angsuran, dan/atau fasilitas dana;
- Menjalankan usaha sewa operasi (operating lease) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- Menjalankan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- Melakukan kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

**COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES**

In accordance with the articles of association and licenses held, the Company may conduct the business activities as follows:

- To undertake investment financing business, i.e. financing of capital goods and the services required for the activities of business/investment, rehabilitation, modernization, expansion or relocation of place of business/investment provided to debtors, such as finance lease, sale and leaseback, factoring with recourse, factoring without recourse, purchase by payment in installments, project financing and/or infrastructure financing;
- To undertake working capital financing business, i.e. financing for fulfilling expenditure needs exhausted in one cycle of debtor's business activity, such as sale and leaseback, factoring with recourse, factoring without recourse and/or business capital facility;
- To undertake multipurpose financing business, i.e. financing of goods and/or services required by debtors for consumption, instead for business requirement or productive activity within an agreed period, such as finance lease, purchase by payment in installments, and/or fund facility;
- To undertake operating lease business and/or reward-based activities in so far not conflicting with the provisions of legislation in financial service sector;
- To undertake other financing business based on the Financial Services Authority's approval;
- To conduct financing business activities based on sharia principles.

**Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan**

Vision, Mission & Corporate Values

**VISI** *Vision*

Menjadi Perusahaan Pembiayaan dengan aset diatas 5 Triliun pada tahun 2025

To become a Finance company having the assets over 5 Trillion in 2025.

**MISI** *Mission*

Memberikan solusi terhadap kegiatan usaha dengan memberikan pelayanan jasa pembiayaan yang inovatif untuk klien baik perusahaan ataupun individu

To give solution for business activities by providing innovative financing services for clients, corporate as well as individual.

**Nilai Nilai Perseroan**

Company's Values



**VISION**

Cara pandang jauh kedepan untuk menjawab segala tantangan yang ada di masa depan

Way of looking far ahead to answer all future existing challenges.



**QUALITY**

Semua yang dikerjakan harus dengan standar kualitas yang baik/bagus

Everything done must be of good quality standard.



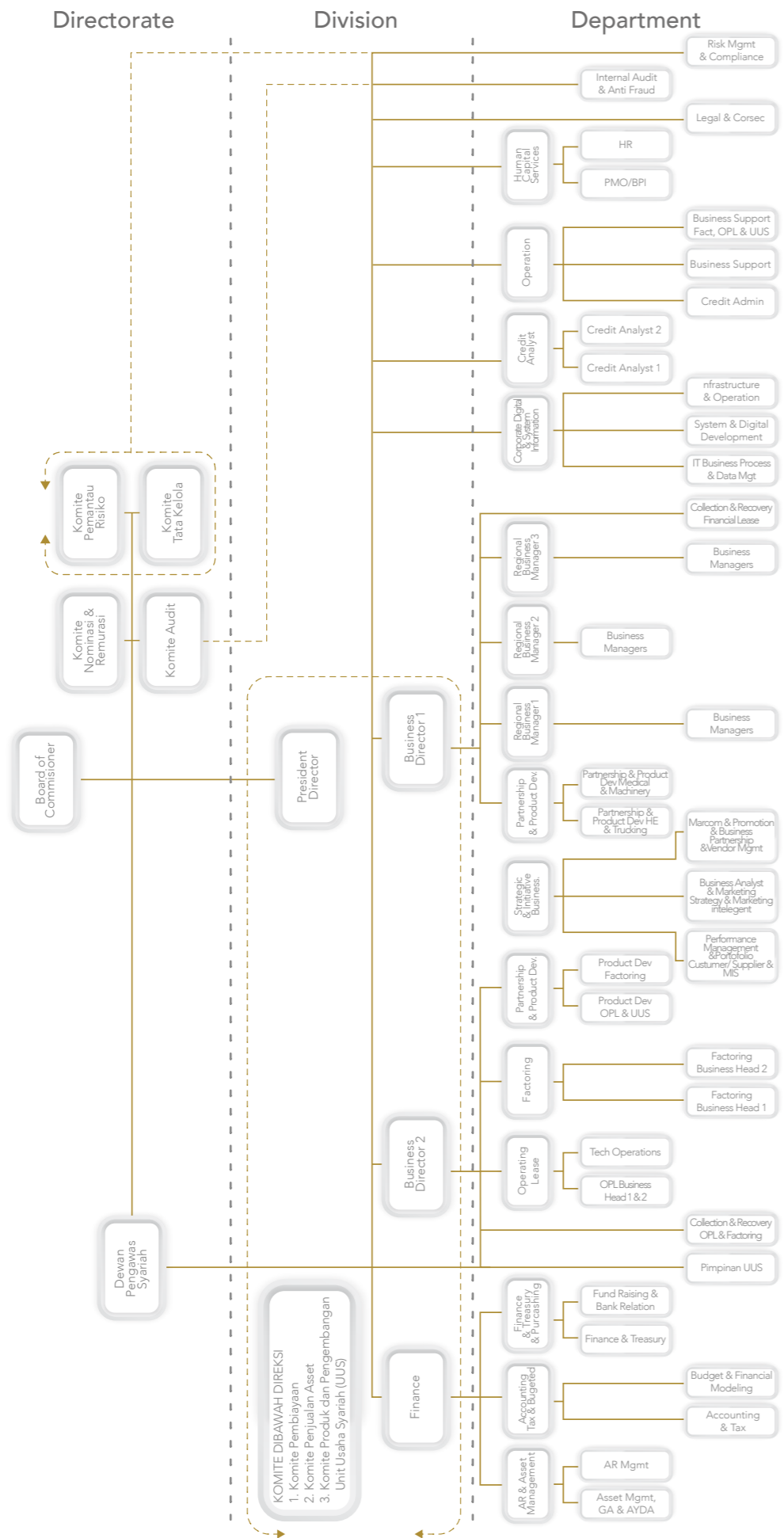
**SPEED**

Kecepatan dalam melaksanakan segala sesuatu

Speed in carrying out everything.

# STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Company's Organization Structure



## PROFIL PERSEROAN Company Profile

### SUMBER DAYA MANUSIA

MMenghadapi persaingan usaha di tahun 2019, manajemen menetapkan strategi yang berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai dengan kebutuhan organisasi. Untuk itu dilakukan perbaikan terhadap proses rekrutmen karyawan baru yang menjamin ketersediaan SDM secara cepat dan tepat bagi organisasi, termasuk di dalamnya ketersediaan calon pemimpin masa depan.

Perseroan senantiasa menjaga kualitas, kuantitas dan kenyamanan situasi kerja bagi Sumber Daya Manusia yang dimiliki. Perseroan meyakini bahwa SDM yang kompeten serta dukungan lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas kinerja secara signifikan. Selain menempatkan SDM sebagai aset yang berharga bagi Perseroan, Perseroan senantiasa berinvestasi terhadap SDM yang dimiliki. Investasi telah dilakukan mulai dari proses rekrutmen melalui penetapan standar-standar kebijakan sampai dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM.

Untuk mengimbangi pertumbuhan bisnis Perseroan yang terus tumbuh setiap tahunnya, pengembangan dan penyempurnaan terus dilakukan dari berbagai sisi organisasi manajemen SDM. Manajemen menyadari bahwa sebagai salah satu kekuatan Perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis, pengembangan organisasi, peningkatan kompetensi SDM Perseroan dan tata kelola SDM harus dilakukan dengan cepat, tepat, dan efektif agar menciptakan organisasi dan SDM yang handal, terpercaya, dan kompeten sehingga memiliki dampak positif terhadap kinerja bisnis organisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 169 orang, baik karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Adapun komposisi karyawan Perseroan adalah sebagai berikut:


### HUMAN RESOURCES

Facing the business competitive in 2019, the management set the sustainable strategy to secure the availability of Human Resources (HR) according to the organization's requirement. For that purpose, improvement was conducted on the process of new employees' recruitment to secure the HR availability fast and precisely for the organization, including the availability of prospective leaders in the future.


The Company always maintains the quality, quantity and convenience of the work situation for the Human Resources possessed. The Company believes that competent HR and the support of a conducive working environment can increase productive performance significantly. Besides placing the HR as valuable assets for the Company, the Company always makes investment on the HR possessed. The investment has been made from the recruitment process by specifying the standards of policy to the trainings conducted in order to improve HR competence.

To counterbalance the Company's continuously growing business each year, development and improvement are continuously conducted from various sides of HR management organization. The management realizes that one of the Company's strengths in facing the business challenges, the organization development, improvement of the Company's HR competence and HR management should be conducted fast, precisely and effectively in order to create a reliable, trustworthy and competent organization and HR, thus having positive impacts on the organization's business performance.

On 31st December 2019, the Company had 169 employees, full-time as well as contract employees. The composition of the Company's employees is as follows:



**a. Menurut Jenjang Pendidikan**  
SMU / SMK Sederajat : 2 Orang  
Diploma : 13 Orang  
S1 : 149 Orang  
S2 : 5 Orang




**a. By Educational Level:**  
SMU / SMK Sederajat : 2 Persons  
Diploma : 13 Persons  
S1\*) : 149 Persons  
S2\*\*) : 5 Persons  
\*)SMU/SMK = Senior/Vocational High School  
\*\*)S1/S2 = Stratum ½




**b. Menurut Jenjang Manajemen**  
Staff : 104 Orang  
Supervisor : 22 Orang  
Ast Mgr & Manager : 36 Orang  
GM : 4 Orang  
Direksi : 3 Orang



**b. By Management Level**  
Staff : 104 Persons  
Supervisor : 22 Persons  
Ast Mgr & Manager : 36 Persons  
GM : 4 Persons  
Director : 3 Persons



**c. Menurut Jenjang Usia**  
20 – 29 Tahun : 63 Orang  
30 – 39 Tahun : 74 Orang  
40 – 49 Tahun : 29 Orang  
> 50 Tahun : 3 Orang



**c. MBy Age Level**  
20 – 29 Years : 63 Persons  
30 – 39 Years : 74 Persons  
40 – 49 Years : 29 Persons  
> 50 Years : 3 Persons

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan karyawan, Perseroan telah menyesuaikan gaji karyawan sesuai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) pada masing-masing Kantor Perwakilan, selain itu Perseroan juga menyediakan berbagai tunjangan, fasilitas dan sarana fisik lainnya yaitu:

- Tunjangan makan dan transportasi;
- Tunjangan dan fasilitas kesehatan berupa, penggantian uang pengobatan dan perawatan bagi karyawan serta anggota keluarganya;
- Program BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi seluruh karyawan;
- Fasilitas olah raga;
- Koperasi Karyawan;
- Dana Pensiun;
- Tempat peribadatan;
- Fasilitas asuransi jiwa.

In order to increase the employees' welfare, the Company has adjusted the employees' salaries according to the Provincial Minimum Pay (UMP) in each Representative Office, besides the Company also provides various allowances, facilities and other physical facilities, namely:

- Meal allowance and transportation;
- Health support and facilities in the form of reimbursement for medical allowance and expenses for employees and their family members;
- BPJS (Social Security Administrator) Program of Employment and Health for all employees;
- Sport facilities;
- Employees Cooperative;
- Pension Fund;
- Place of worship;
- Life insurance facility.

## Pemegang Saham Shareholders

**Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:**  
The Company's Capitalization Structure and Shareholders Composition are as follows:

Keterangan Description	Nilai Nominal Rp. 1.000.000,- persahama Nominal Value of Rp.1,000,000.- per share		Presentase (%) Percentage (%)
	Jumlah Saham Number of Shares	Jumlah Nilai Nominal (Rp) Total Nominal Value (Rp)	
Modal Dasar Authorized Capital	748,000	748,000,000,000	
Modal ditempatkan dan disetor penuh Subscribed and fully paid-up capital:			
- PT MNC Kapital Indonesia Tbk	186,999	186,999,000,000	99.999
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk - Employees Cooperative of PT Bhakti Investama Tbk	1	1,000,000	0.001
Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Total subscribed and fully paid-up capital	187,000	187,000,000,000	
Jumlah saham dalam portepel Total shares in the portfolio	561,000	561,000,000,000	

## Catatan Penerbitan MTN Perseroan

Record of Company's MTN Issuance

(Dalam Miliar Rupiah)

(In Billion Rupiah)

Nama MTN Name of MTN	Jumlah MTN Number of MTN	Peringkat Rating	Tahun Year	Status Status
Medium Term Notes I MNC Leasing Tahun 2017 Seri A Medium Term Notes I of MNC Leasing of 2017 Serial A	21	idBBB (cg)	2017	Lunas
Medium Term Notes I MNC Leasing Tahun 2017 Seri B Medium Term Notes I of MNC Leasing of 2017 Serial B	50	idBBB (cg)	2017	Lunas
Medium Term Notes II MNC Leasing Tahun 2018 Medium Term Notes II of MNC Leasing of 2018	20	idBBB (cg)	2018	Jatuh Tempo Maret 2020
Medium Term Notes III of MNC Leasing of 2018 Seri A Medium Term Notes III MNC Leasing Tahun 2018 Seri A	15	idBBB (cg)	2018	Jatuh Tempo Maret 2020

**NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN  
PEMERINGKAT EFEK**

PT Pemeringkat Efek Indonesia  
Panin Tower Senayan City, Lantai 17  
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270

**NAMA DAN ALAMAT LEMBAGA DAN PROFESI  
PENUNJANG PASAR MODAL**

**Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN I dan MTN II :**

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan  
Banten Tbk**

Gedung Arthaloa Lantai 4  
Jl. Jenderal Sudirman Jakarta 10220  
Telp. 021 2511 448-449 ext 332/352/356/360  
Fax. 021 2511 508 | Website: www.bankbjb.co.id

**Agen Pemantau dan Agen Jaminan MTN III :**

**PT Bank Bukopin Tbk**

Gedung Bank Bukopin  
Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770  
Telp. 021 7988 266 / 021 7989 837  
Fax. 021 7980 625 / 021 7980 238  
Website: www.bukopin.co.id

**Tugas Pokok :**

Mewakili kepentingan pemegang MTN baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang MTN sesuai dengan syarat-syarat MTN, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penerbitan Medium Term Notes serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Notaris : Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.**

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170  
Telp. 021 72787232 | Fax. 021 723 4607

**Tugas Pokok :**

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Terbatas MTN, antara lain Perjanjian Penerbitan, Perjanjian Agen Pemantau dan Jaminan, Pengakuan Hutang, dan Perjanjian Agen Pembayaran.

**NAME AND ADDRESS OF SECURITY RATING  
COMPANY**

PT Pemeringkat Efek Indonesia  
Panin Tower Senayan City, 17th Floor  
Jl. Asia Afrika Lot. 19, Jakarta 10270

**NAME AND ADDRESS OF CAPITAL  
MARKET SUPPORTING INSTITUTIONS AND  
PROFESSIONS**

**Monitoring Agent and Security Agent MTN I and MTN II :**

**PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan  
Banten Tbk**

Arthaloa Building 4<sup>th</sup> Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Jakarta 10220  
Phone: 021 2511 448-449 ext 332/352/356/360  
Fax. 021 2511 508 | Website: www.bankbjb.co.id

**Monitoring Agent and Security Agent MTN III :**

**PT Bank Bukopin Tbk**

Gedung Bank Bukopin  
Jl. MT Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770  
Telp. 021 7988 266 / 021 7989 837  
Fax. 021 7980 625 / 021 7980 238  
Website: www.bukopin.co.id

**Main Job :**

To represent the interest of MTN holders in as well as outside the court on the execution of MTN holders' rights according to MTN conditions, with respect to the conditions specified in the Medium Term Notes Issuance Agreement and the prevailing legislation.

**Notary Public : Leolin Jayayanti, SH., M.Kn.**

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170  
Telp. 021 72787232 | Fax. 021 723 4607

**Main Job :**

To draw up deeds for MTN Limited Offer, such as Issuance Agreement, Monitoring and Security Agent Agreement, Debt Acknowledgement, and Payment Agent Agreement.

**Konsultan Hukum : Hendro & Kanon**

Graha Binaraksa Lt. 4  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940  
Telp. 021 527 7130 | Fax. 021 527 7132  
Website: www.hendrokanon.com

**Tugas Pokok :**

Melakukan pemeriksaan segi hukum terbatas atas fakta yang ada mengenai Perseroan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil Pemeriksaan tersebut menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Terbatas ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana definisi Afiliasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

**Law Consultant : Hendro & Kanon**

Graha Binaraksa Lt. 4  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18 Jakarta 12940  
Telp. 021 527 7130 | Fax. 021 527 7132  
Website: www.hendrokanon.com

**Main Job :**

To conduct limited legal examination on the existing facts on the Company as informed by the Company. The result of examination shall serve as the basis of Legal Opinion given objectively and independently.

The Capital Market Supporting Institutions and Professions involved in this Limited Offer do not have any affiliated relation with the Company as the Affiliation definition in Law No.8 of 1995 on Capital Market.

**Penghargaan Yang Diterima Perseroan**

Awards Received by the Company

No No	Penghargaan Award	Kategori Category	Lembaga Institution
1.	Infobank Multifinance Award Infobank Multifinance Award	Kinerja keuangan 2017 Sangat Bagus Very Good Financial Performance of 2018	Majalah Infobank Infobank Magazine
2.	Warta Ekonomi Indonesia Multifinance Consumer Choice Award Warta Ekonomi Indonesia Multifinance Consumer Choice Award	Multifinance Company with Excellent Performance Multifinance Company with Excellent Performance Multi Finance Company with Excellent Performance	Majalah Warta Ekonomi Warta Ekonomi Magazine



PEMBAHASAN DAN  
ANALISIS MANAJEMEN

05

# PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis

## LAPORAN ANALISA USAHA DAN OPERASIONAL

### Nilai Pembiayaan oleh Perseroan

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan sampai dengan Desember 2019, industri pembiayaan tumbuh sebesar 4,75%.

Dengan pertumbuhan industri pembiayaan yang dapat dikatakan cukup lambat, Perseroan terus meningkatkan performa dan menghasilkan peningkatan unit yang dibiayai, pada tahun 2019 Perseroan membukukan nilai pembiayaan sebesar Rp 1.204 miliar meningkat 12,7% dibandingkan tahun 2018.

Dengan demikian, pada akhir tahun 2019, total aset Perseroan telah mencapai kurang lebih Rp. 747,6 miliar sedangkan total aset yang dikelola pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.099,6 terjadi peningkatan sebesar 8,50% jika dibandingkan dengan Rp.1.013,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2018. Secara asset on book terjadi penurunan sebesar 5,17% jika dibandingkan dengan Rp.788,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2018.

Tahun 2019 menjadi tantangan sendiri bagi perusahaan pembiayaan, hal ini dikarenakan cukup banyak perbankan yang menutup fasilitas pembiayaannya kepada perusahaan pembiayaan. Dengan fasilitas yang terbatas Perseroan tetap bisa bertumbuh yang ditopang oleh peningkatan jumlah pembiayaan anjak piutang. Perbankan pada tahun 2019 masih bisa memberikan pembiayaan terutama untuk project-project dengan tenor pendek yang sangat sesuai dengan bisnis anjak piutang.

### Komposisi Pembiayaan 2018

Dengan tetap memperhatikan kualitas pembiayaan yang dilakukan, total nilai pembiayaan investasi & modal kerja, pembiayaan multi guna, sewa kendaraan operasional, & anjak piutang berturut-turut adalah Rp.451,56 miliar, Rp.1,94 miliar, Rp.2,36 miliar, & Rp.748,23 miliar.

Dengan demikian, kontribusi portofolio alat berat, truck, mesin dan alat kesehatan terhadap total nilai pembiayaan Perseroan berturut-turut adalah 87,73%, 6,14%, 3,95%, dan 2,18%

## LAPORAN ANALISA USAHA DAN OPERASIONAL

### Financing Value by the Company

Based on the Financial Services Authority's data until December 2019, financing industry grew at 4.75%.

By the growth of financing industry that may be said quite slowly, the Company continuously increased the performance and produced an increase in the units financed. In 2019 the Company booked the financing value of Rp.1,204 billion, increasing at 12.7% from that of 2018.

Therefore, at the end of 2019, the Company's total assets reached approximately Rp.747.6 billion, while the total assets managed as of 31st December 2019 was Rp.1,099.6, increasing at 8.50% from that as of 31st December 2018 of Rp.1,013.4 billion. The assets on book decreased at 5.17% from Rp.788.3 billion as of 31st December 2018.

The year 2019 is a challenge for finance companies alone, this is because there were quite a number of banks closing their financing facilities to finance companies. By limited facilities the Company could still grow, supported by the increase in the number of factoring financing. Banking in 2019 was still able to provide financing particularly for projects with short tenors that were very suitable for factoring business.

### Composition of Financing in 2019

While still giving attention to the quality of financing conducted, the total financing values of investment & working capital, multi purpose financing, operational vehicle lease & factoring were consecutively Rp.451.56 billion, Rp.1.94 billion, Rp.2.36 billion & Rp.748.23 billion.

Therefore, the portfolio contribution of heavy equipments, trucks, machines and medical devices to the Company's total financing values was consecutively 87.73%, 6.14%, 3.95% and 2.18%.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS MANAJEMEN  
Management Discussion and Analysis

## Pembiayaan 2019



### Jaringan Usaha

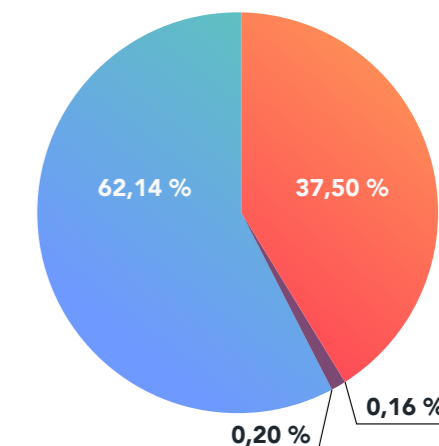
Pada akhir tahun 2019, Perseroan memiliki 11 titik pelayanan pelanggan yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan dan Sulawesi.

### Sumber Pendanaan

Perseroan terus mengupayakan ketersediaan dana yang optimal untuk mendukung pertumbuhan bisnis Perseroan. Sebagai sumber pendanaan, selama tahun 2019 Perseroan mendapatkan pendanaan dari perbankan sebesar Rp.739 miliar, joint finance dengan MNC Bank senilai Rp.274 miliar serta pendanaan dari perusahaan pembiayaan lainnya sebesar Rp.5 miliar.

### Teknologi Informasi

Di tahun 2019, Perseroan juga terus melakukan pembenahan dan pengembangan sistem informasi yang mendukung proses bisnis berbasis teknologi untuk mendukung perbaikan proses, pengembangan dan inovasi bisnis. Infrastruktur teknologi informasi juga diperbaharui dan direnovasi yang prosesnya akan berlanjut hingga tahun 2020.



### Business Network

At the end of 2019, the Company had 11 points of customer service scattered in Sumatera, Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi.

### Sources of Funding

The Company continued to strive for optimal availability of funds to support the Company's business growth. As the sources of funding, during 2019 the Company got the funding from banks of Rp.739 billion, joint finance with MNC Bank of Rp.274 billion and the funding from other finance companies of Rp.5 billion.

### Information Technology

In 2019 the Company also continued making improvement and development of the information system that supports the technology-based business process to support the improvement of business process, development and innovation. The information technology infrastructure was also renewed and renovated by the process that will continue until 2020.

## LAPORAN ANALISA KEUANGAN

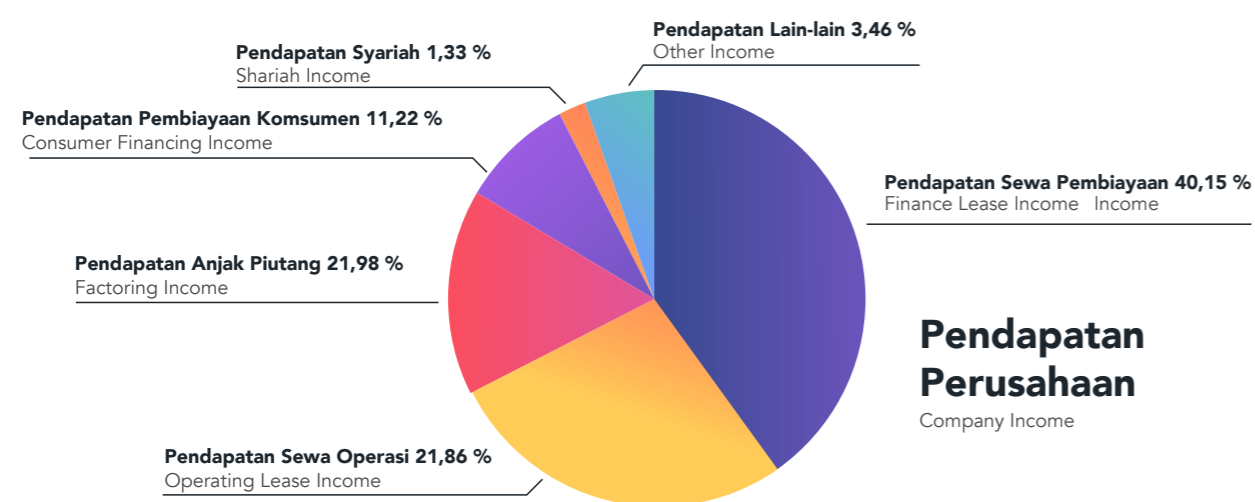
### Laporan Laba Rugi

Sepanjang tahun 2019, dengan peningkatan sebesar 9,59% atas total piutang pembiayaan yang dikelola, Perseroan membukukan jumlah Pendapatan sebesar Rp. 177,8 miliar, meningkat sebesar 9,69% dibandingkan dengan pencapaian tahun 2018 sebesar Rp. 160,6 miliar.

## FINANCIAL ANALYSIS REPORT

### Profit-Loss Statement

During 2019, by the increase at 9.59% on the total financing receivables managed, the Company posted the total Income of Rp.177.8 billion, increasing at 9.69% from the achievement in 2018 of Rp.160.6 billion.



Jumlah Pendapatan Perseroan sebesar Rp. 177,8 miliar pada tahun 2019, diperoleh dari Pendapatan Sewa Pembiayaan sebesar Rp. 71,4 miliar, Pendapatan Sewa Operasi sebesar Rp. 38,9 miliar, Pendapatan Anjak Piutang sebesar Rp. 39,1 miliar, Pendapatan Pembiayaan Konsumen sebesar Rp. 19,9 miliar, Pendapatan Syariah sebesar Rp.2,4 miliar dan Rp. 6,1 miliar pendapatan lain-lain. Komposisi pendapatan Perseroan dari Pembiayaan Sewa Pembiayaan, Pembiayaan Sewa Operasi, Pembiayaan Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, Pembiayaan Syariah dan lain-lain berturut-turut adalah 40,15%, 21,86%, 21,98%, 11,22%, 1,33% dan 3,46%.

The Company's Total Income of Rp.177.8 billion in 2019 was obtained from the Finance Lease Income of Rp.71.4 billion, Operating Lease Income of Rp.38.9 billion, Factoring Income of Rp.39.1 billion, Consumer Financing Income of Rp.19.9 billion, Sharia Income of Rp.2.4 billion and other income of Rp.6.1 billion. The Company's composition of income from Finance Lease Financing, Operating Lease Financing, Factoring Financing, Consumer Financing, Sharia Financing and others is consecutively 40.15%, 21.86%, 21.98%, 11.22%, 1.33% and 3.46%.

(Dalam Miliar Rupiah)

(In Billion Rupiah)

Uraian Description	2017 (Audited)	2018 (Audited)	2019 (Audited)
Jumlah Pendapatan Total Income	116.226	160.589	177.813
Jumlah Beban Total Expense	100.624	128.476	141.397
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	15.602	32.113	36.416
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense	(3.782)	(7.891)	(9.714)
Laba Bersih (Laba Neto) Net Profit	11.820	24.222	26.702

Jumlah Beban Perseroan juga mengalami kenaikan sejalan dengan pertumbuhan usaha dan mencapai Rp.141,397 miliar pada tahun 2019 dari sebesar Rp.128.476 miliar pada tahun 2018. Kenaikan Beban pada tahun 2019 disebabkan oleh kenaikan biaya operasional antara lain kenaikan biaya gaji dan tunjangan disebabkan karena penambahan jumlah tenaga kerja untuk mendukung operasional perusahaan dan kenaikan biaya penyusutan dan asuransi aset tetap sehubungan dengan dengan aset tetap operasi milik Perseroan. Kenaikan beban tersebut seiring dengan kenaikan nilai piutang yang dikelola oleh Perusahaan. Dengan pencapaian ini, Perseroan berhasil membukukan Laba Bersih untuk tahun 2019 sebesar Rp.26,70 miliar atau meningkat sebesar 9,3% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp.24,22 miliar.

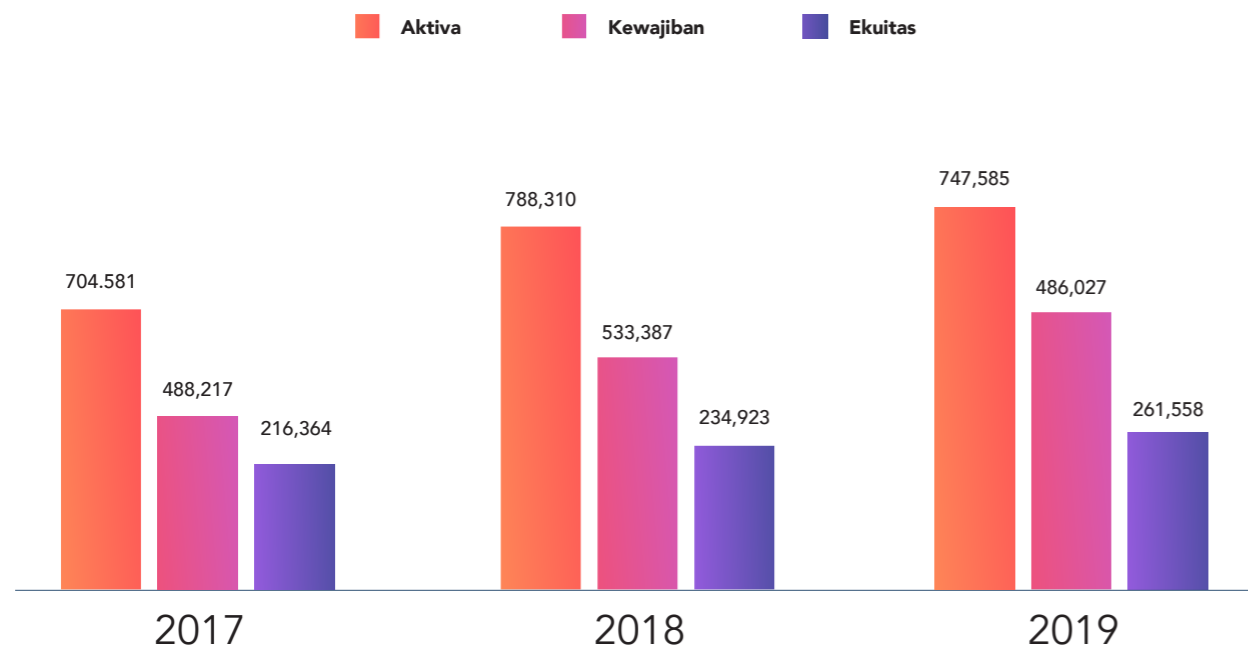
The Company's Total Expense also increased in line with the business growth and reached Rp.141.397 billion in 2019 from Rp.128.476 billion in 2018. The Expense increase in 2019 was caused by the increase of operational expense, namely the increase of salary expense and allowances due to the increase of number of manpower to support the company's operation and the increase depreciation cost and the insurance of fixed assets in connection with the Company's operating fixed assets. The expense increase is along with the increase of accounts receivable value managed by the Company. By this achievement, the Company was able to book Net Profit for 2019 of Rp.26.70 billion or an increase at 9.3% from that in 2018 of Rp.24.22 billion.

### Neraca

Pada akhir tahun 2019, total aset yang dikelola Perseroan telah mencapai kurang lebih Rp.747,6 miliar (asset on book) sedangkan total aset managed pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.099,6 miliar terjadi peningkatan sebesar 8,50% jika dibandingkan dengan Rp.1.013,4 miliar pada tanggal 31 Desember 2018. Secara asset on book terjadi penurunan sebesar 5,17% jika dibandingkan dengan Rp.788,3 miliar pada tanggal 31 Desember 2018. Pertumbuhan Aset dikontribusikan pertumbuhan Piutang Pembiayaan oleh Perseroan sebesar 9,59% atau sebesar Rp.79,8 miliar.

### Balance Sheet

At the end of 2019, the total assets managed by the Company reached approximately Rp.747.6 billion (assets on book), while the total assets managed as of 31st December 2019 was Rp.1,099.6 billion, increasing at 8.50% from that as of 31st December 2018 of Rp.1,013.4 billion. The assets on book decreased at 5.17% from that as of 31st December 2018 of Rp.788.3 billion. The assets growth was contributed by the growth of Financing Receivables by the Company at 9.59% or of Rp.79.8 billion.



Seiring dengan peningkatan aset, Perseroan juga mencatatkan kewajiban sebesar Rp.486,0 miliar pada akhir tahun 2019 menurun 12,17% dibandingkan Rp.553,4 miliar pada akhir tahun 2018.

Along with the increase of assets, the Company also recorded liabilities of Rp.486.0 billion at the end of 2019, decreasing at 12.17% from that of Rp.553.4 billion at the end of 2018.

Dengan bertumbuhnya Aset produktif, dibukukannya peningkatan Laba Bersih pada akhir tahun 2019, ekuitas Perseroan meningkat sebesar 11,34% menjadi Rp.261,56 miliar dari Rp.234,92 miliar pada tahun 2018.

By the growth of productive Assets, the posting of Net Profit increase at the end of 2019, the Company's equity increased at 11.34% to Rp.261.56 billion from Rp.234.92 billion in 2018.

## MANAJEMEN RISIKO

### Risk Management

Dalam menjalankan bisnisnya, Perusahaan dihadapkan pada risiko yang melekat (inheren) pada seluruh kegiatan bisnis dan operasional.

In undertaking its business, the Company encounters the inherent risks in all business and operational activities.

Perusahaan menerapkan suatu Kerangka Manajemen Risiko (Risk Management Framework) yang terdiri dari Visi dan Misi Perusahaan, Risk Appetite & Risk Tolerance, Risk Process, Risk Oversight, Risk Structure, Risk Assurance, dan serta Risk Infrastructure untuk memastikan bahwa seluruh risiko yang dihadapi dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan tepat.

The Company applies a Risk Management Framework composed of the Company's Vision and Mission, Risk Appetite & Risk Tolerance, Risk Process, Risk Oversight, Risk Structure, Risk Assurance, and Risk Infrastructure to ensure that all risks encountered could be identified, measured, monitored, controlled and reported appropriately.



Proses manajemen risiko mengacu terdiri dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian yang diterapkan pada lini organisasi yang digolongkan menjadi 3 (tiga), yaitu: business unit sebagai risk taking, risk unit sebagai risk control, dan compliance.

The risk management process refers to identification, measuring, monitoring, and control applied in the organization line classified into 3 (three), namely: business unit as risk taking, risk unit as risk control, and compliance.

Penerapannya dilakukan pengawasan (oversight) oleh Dewan Komisaris, dibantu oleh Komite Pemantau Risiko, serta diawasi oleh Direksi dibantu oleh Internal Audit sebagai risk assurance.

The application is conducted by supervision (oversight) by the Board of Commissioners, assisted by the Risk Monitoring Committee, and supervised by the Board of Directors assisted by the Internal Audit as risk assurance.

Dalam rangka penerapan manajemen risiko membutuhkan risk infrastructure yang handal, seperti sumber daya manusia, teknologi informasi, dan kebijakan & prosedur.

In order to apply the risk management, it requires reliable risk infrastructures such as human resources, information technology, and policy & procedure.

Penerapan manajemen risiko dilakukan untuk mencapai visi dan misi Perusahaan dengan prinsip kehati-hatian dan praktik bisnis yang sehat. Untuk mencapai visi dan misi Perusahaan, juga ditetapkan Risk Appetite & Risk Tolerance yang sesuai untuk menjadi rambu dalam menjalankan kegiatan bisnis dan operasional.

The risk management application is conducted to reach the Company's vision and mission by the principle of prudence and sound business practice. To achieve the Company's vision and mission, suitable Risk Appetite & Risk Tolerance are also specified to serve as the signs in undertaking the business and operational activities.

Secara keseluruhan, Kerangka Manajemen Risiko mengacu dan sejalan dengan ruang lingkup manajemen risiko yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencakup:

In overall, the Risk Management Framework refers and is in line with the risk management scope specified by the Financial Services Authority (OJK), covering:





**a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Guna membantu pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris telah membentuk beberapa komite, antara lain:

1. Komite Pemantau Risiko
2. Komite Tata Kelola
3. Komite Audit
4. Komite Nominasi & Remunerasi

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Dewan Komisaris maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola, dan Komite Audit.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris terkait dengan pengawasan aktif dalam kegiatan manajemen risiko antara lain meliputi:

1. Mengarahkan dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko secara berkala atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan..

**a. Active Supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors**

To assist its job performance, the Board of Commissioners has established several committees, namely:

1. Risk Monitoring Committee
2. Governance Committee
3. Audit Committee
4. Nomination & Remuneration Committee

The implementation of the Board of Commissioners' supervising function is conducted by the forum of Board of Commissioners' Meeting and the meetings of Risk Monitoring Committee, Governance Committee and Audit Committee.

The Board of Commissioners' jobs, responsibilities, and authorities related to active supervision in risk management activities, among others covering:

1. To direct and approve the Risk Management Policy, including the risk strategy and management framework specified according to the risk level to be taken (risk appetite) and risk tolerance.
2. To evaluate the risk management policy and strategy periodically or more frequently in case of any change to the factors affecting the business activities significantly.

3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko secara efektif.
4. Berwenang membentuk Komite Pemantau Risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi.
5. Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Perusahaan.
6. Memahami dengan baik jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan.

**b. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko**

Perusahaan memiliki Kebijakan Manajemen Risiko yang dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan manajemen risiko. Untuk area bisnis yang lebih spesifik, Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur yang lebih khusus. Dalam kebijakan dan prosedur tersebut, antara lain diatur mengenai penetapan limit untuk masing-masing aktivitas, baik pada level portofolio maupun transaksional.

Kebijakan Manajemen Risiko (KMR) dijadikan sebagai pedoman utama dalam melaksanakan pengelolaan risiko secara operasional di Perusahaan, mencakup:

1. Prinsip Kehati-hatian, terdiri dari prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Kepatuhan pada Ketentuan dan Hukum yang Berlaku
  - b. Sistem Peringatan Dini
  - c. Penetapan Limit
  - d. Prinsip Mengenal Nasabah
  - e. Know Your Employee (KYE)
  - f. Risk Transfer
  - g. Diversifikasi Risiko
  - h. Prinsip Dual Control dan Segregation of Duties
  - i. Prinsip Umum Manajemen Risiko
  - j. Kerangka Kerja Manajemen Risiko (Risk Management Framework)
  - k. Tiga Lini Pertahanan
  - l. Prinsip Keterbukaan dan Budaya Sadar Risiko

3. To evaluate the Board of Directors' accountability and to give directions for improvement on the implementation of Risk Management Policy periodically. The evaluation shall be conducted in order to ensure that the Board of Directors manages the activities and risks effectively.
4. To have the authority to establish the Risk Monitoring Committee assigned to assist the Board of Commissioners in monitoring the implementation or risk management prepared by the Board of Directors.
5. To ensure that the risk management application has been adequate according to the Company's risk characteristics, complexity and profile.
6. To well understand the types and levels or risks inherent in the Company's business activities.

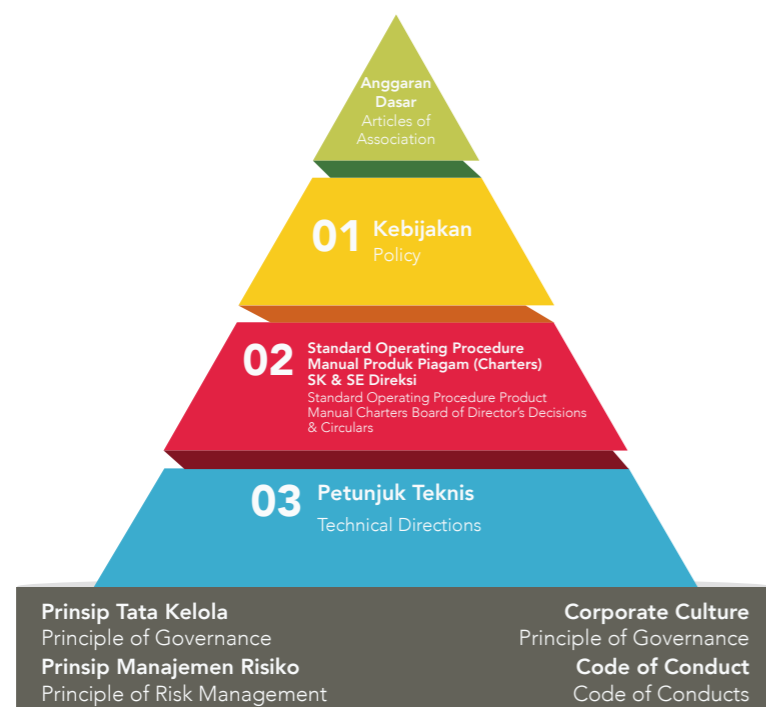
**a. Risk Management Policy and Procedure and Risk Limit Setting**

The Company has the Risk Management Policy to serve as the main guidelines in carrying out the risk management. For more specific business areas, the Company has more specific policy and procedure. In the policy and procedure is regulated among other the limit setting for each activity, either at portfolio or transactional level.

The Risk Management Policy (RMP) serves as the main guideline in carrying out the risk management operationally in the Company, covering:

1. Principle of Prudence, consisting of the following principles:
  - a. Compliance to the Prevailing Conditions and Law
  - b. Early Warning System
  - c. Limit Setting
  - d. Know Your Customer Principle
  - e. Know Your Employee (KYE)
  - f. Risk Transfer
  - g. Risk Diversification
  - h. Principle of Dual Control and Segregation of Duties
  - i. General Principle of Risk Management
  - j. Risk Management Framework
  - k. Three Defense Lines
  - l. Principle of Transparency and Risk Awareness Culture

Perusahaan menetapkan hierarki atas ketentuan internal, sebagai berikut:



The Company specifies the hierarchy on internal conditions as follows:

Penerbitan ketentuan internal Limit dan kewenangan secara berkala dievaluasi secara berkala. Selama tahun 2019, Perusahaan telah melakukan evaluasi terhadap limit dan kewenangan sehingga diterapkan secara berjenjang dan lebih prudent, antara lain terkait dengan aktivitas:

- Pemberian keputusan pembiayaan (batas wewenang memutus pembiayaan)
- Pemberian diskon denda atas keterlambatan
- Diskon atau keringanan penalti atas pelunasan dipercepat (early termination).
- Hapus buku
- Hapus tagih
- Limit Kas Kecil

Pada tahun 2019, Perusahaan telah melakukan evaluasi dan penetapan Risk Appetite & Risk Tolerance Tahun 2019, yang terdiri dari:

- Permodalan
- Rentabilitas
- 7 (tujuh) Risiko, antara lain: Risiko Pembiayaan, Risiko Operasional, Risiko Kepengurusan, Risiko Tata Kelola, Risiko Stratejik, Risiko Aset & Liabilitas, dan Risiko Dukungan Dana.

The periodical issuance of Internal Limit conditions and authorities shall be evaluated periodically. During 2019, the Company has conducted evaluation on the limit and authorities until they are applied in stages and more prudently, among others related to the activities of:

- Making decision on financings (limit of authority in deciding the financing)
- Giving discount for fines on delay
- Discount or relief for fines on accelerated settlement (early termination)
- Write-off
- Charge-off
- Petty Cash Limit

In 2019, the Company conducted evaluation and specification of Risk Appetite & Risk Tolerance of 2019, consisting of:

- Capitalization
- Rentability
- 7 (seven) Risks, namely: Financing Risk, Operational Risk, Management Risk, Governance Risk, Strategic Risk, Assets & Liabilities Risk, and Fund Support Risk.

c. Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko.

1. Identifikasi  
Proses Identifikasi risiko dilakukan untuk menganalisa sumber, tingkat kemungkinan timbulnya risiko dan dampaknya.
2. Pengukuran  
Proses pengukuran risiko dilakukan untuk mengetahui besarnya eksposur risiko sebagai acuan dalam melakukan pengendalian risiko. Pengukuran risiko dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif sesuai metode pengukuran yang ditetapkan oleh regulator atau dengan menggunakan metode internal untuk metode yang belum ditetapkan secara khusus.
3. Pemantauan  
Proses pemantauan risiko dilakukan untuk memastikan bahwa risiko telah dikelola dengan baik antara lain melalui pemantauan terhadap mitigasi dan limit risiko yang telah ditetapkan. Pemantauan risiko dilakukan baik oleh Business Unit (risk taking unit) sebagai pemilik risiko (risk owner) maupun oleh Fungsi Manajemen Risiko sebagai risk control unit. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindak lanjut yang diperlukan.
4. Pengendalian Risiko  
Proses pengendalian risiko dilakukan terutama untuk mengelola risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan. Strategi pengendalian risiko yang dilakukan oleh Perusahaan adalah menerima risiko (risk acceptance), menghindari risiko (risk avoidance), memindahkan risiko (risk transfer) dan mengurangi risiko (risk mitigation).

d. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi Manajemen Risiko ditujukan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, dan memastikan tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan sehingga dapat digunakan dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Manajemen.

Pada level individual entitas, Perusahaan memiliki Risk Management Dashboard yang berisi indikator risiko tertentu dipergunakan untuk mengukur dan memantau kejadian aktual dengan limit risiko yang

c. Process of Risk Identification, Measuring, Monitoring and Control

1. Identification  
The process of risk identification is conducted to analyze the sources, level of risk possibility and its impacts.
2. Measuring  
The process of risk measuring is conducted to find out the extent of risk exposure as a reference in conducting risk control. Risk measuring is conducted quantitatively and/or qualitatively according to the measuring method specified by the regulator or by applying internal methods for methods not yet specifically specified.
3. Monitoring  
The process of risk monitoring is conducted to ensure that the risk has been well managed, among others by monitoring on the specified risk mitigation and limit. Risk monitoring is conducted either by the Business Unit (risk taking unit) as the risk owner or the Risk Management Function as the risk control unit. The monitoring results are presented in periodical reports submitted to the management in order to mitigate the risks and for the required follow-up.
4. Risk Control  
The process of risk control is conducted particular to manage risks that can interfere with the Company's business continuation. The risk control strategies conducted by the Company are risk acceptance, risk avoidance, risk transfer and risk mitigation.

d. Risk Management Information System

Risk Management Information System is intended to support the implementation of the processes of risk identification, measuring, monitoring, and control, and to ensure the availability of accurate, complete, informative, timely and reliable information so that they can be used in the process of decision making by the Management.

At individual entity level, the Company has a Risk Management Dashboard containing certain risk indicators used for measuring and monitoring actual events by the set risk limit. The results of monitoring are submitted to the management as

telah ditetapkan. Hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen sebagai bahan evaluasi dan warning system untuk mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengendalian risiko. Pada level konglomerasi keuangan, Perusahaan menggunakan Integrated Risk Management System yang merupakan sistem informasi manajemen risiko yang dipergunakan oleh seluruh anggota konglomerasi keuangan. Hasil pemantauan disampaikan kepada manajemen, perusahaan induk, dan entitas utama, termasuk Komite Manajemen Risiko Terintegrasi.

**e. Sistem Pengendalian Internal Yang Menyeluruh**

Perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal secara berkesinambungan dengan melakukan review secara berkala atas kecukupan pemisahan tugas, dual control atau four eyes principle, rekonsiliasi, kebijakan dan prosedur. Dewan Komisaris melalui Komite Audit bertanggung jawab dalam mengkaji kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal serta mengevaluasi kecukupan upaya manajemen dalam mengembangkan budaya pengendalian.

Untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang efektif, maka Direksi melakukan upaya sebagai berikut:

1. Menyusun atau menyesuaikan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan Perusahaan dan menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit.
2. Jalur pelaporan dan pemisahan fungsi dari business unit atau operasional unit dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.

Aktivitas pengendalian melalui pemisahan fungsi (segregation of duties) dilakukan melalui:

- a. Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Struktur organisasi dibuat dengan memisahkan fungsi pencatatan, pemeriksaan, operasional dan non operasional (segregation of duties), sehingga tercipta suatu sistem dual control, dual custody, dan terhindar dari

the materials for evaluation and warning system to prepare the measures required for risk control.

At finance conglomeration level, the Company applies an Integrated Risk Management System as the risk management information system applied by all members of finance conglomeration. The results of monitoring are submitted to the management, parent company and main entities, including the Integrated Risk Management Committee.

**e. Comprehensive Internal Control System**

The Company applies the internal control system sustainably by conducting periodical review on the adequacy of job separation, dual control or four eyes principle, reconciliation, policy and procedure. The Board of Commissioners through the Audit Committee shall be responsible for studying the adequacy and effectiveness of the internal control system and to evaluate the adequacy of management efforts in developing the control culture.

To actualize an effective internal control system, the Board of Directors shall make the following efforts:

1. To prepare or adjust the organizational structure according to the Company's objectives and to describe clearly the jobs and responsibilities of each unit.
2. The line for reporting and segregation of duties of business unit or operational unit from the work unit performing the control function.

The control activity through segregation of duties is conducted by:

- a. Segregation of functions is intended that any persons in their positions do not have the opportunity to make and conceal any mistakes or deviations in performing their duties.
- b. The organizational structure is produced by separating the recording, audit, operational and non-operational functions (segregation of duties) in order to create a dual control, dual custody system, to

duplikasi kerja dalam setiap kegiatan serta terhindar dari benturan kepentingan (conflict of interest).

**c. Dalam pelaksanaan pemisahan fungsi tersebut, Perusahaan melakukan langkah-langkah antara lain:**

- i. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu pada Perusahaan yang dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data/informasi Perusahaan atau penyalahgunaan aset Perusahaan.
- ii. Pemisahan fungsi tersebut tidak terbatas pada kegiatan front line dan back line, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
  - Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
  - Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi pembiayaan.
  - Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - Independensi fungsi manajemen risiko dan fungsi internal audit pada Perusahaan

3. Pemantauan oleh Internal Audit terhadap perbaikan atas hasil temuan.

4. Melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan pengembangan karir dan kebutuhan.

5. Memberikan arahan serta memperhatikan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perusahaan dan penerapan manajemen risiko.

Salah satu bentuk sistem pengendalian internal yang dilakukan adalah dengan menerapkan strategi dan desain proses yang bertujuan untuk secara dini mengidentifikasi kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan. Hal itu, antara lain dengan cara:

1. Memperbaiki dan mengevaluasi secara berkala sistem yang digunakan sehingga laporan yang disusun dapat terjamin keakuratan dan dapat diandalkan.
2. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional.

avoid work duplication in each activity and avoid conflict of interest.

**c. In the implementation of segregation of duties, the Company take the measures, among others:**

- i. To specify certain functions or jobs in the Company separated or allocated to several persons in order to mitigate the risks of occurrence of Company's data/information manipulation or Company's misuse of assets.
- ii. The segregation of duties is not limited to front line and back line activities, but also in order to control:
  - Approval on expenses and expenditure realization.
  - Assessment on the adequacy of finance documentation.
  - Other business activities that may cause conflict of interest.
  - Independent risk management function and internal audit function in the Company.

3. Monitoring by Internal Audit on correction of findings.

4. Conducting training and development of human resources according to career development and requirement.

5. Giving direction and considering external factors that can influence the Company's operational activities and risk management application.

One of the forms of internal control system conducted is by applying the strategy and process design intended to early identify any possible occurrence of event that could affect the Company's business activities, among others by:

1. Improving and evaluating periodically the system applied so that the report prepared could be guaranteed of its accuracy and is reliable.
2. Increasing the effectiveness and efficiency in the operational activities.

3. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku.
4. Mengantisipasi dan memitigasi kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.
5. Penerapan sistem pelaporan secara rutin dan non rutin kepada manajemen.

3. Increasing adherence to the prevailing laws and regulations.
4. Anticipating and mitigating any loss, deviation, and breach of the principle of prudence.
5. Applying regular and irregular reporting systems to the management.

Sistem pengendalian internal Perusahaan berfungsi untuk mengelola risiko agar tetap berada dalam batas toleransi. Dalam kegiatan operasional, sistem pengendalian internal dirancang dan diterapkan untuk mengelola dan mengendalikan risiko, namun bukan untuk menghilangkan risiko. Oleh karena itu, sistem pengendalian internal diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pengendalian suatu entitas, namun tidak menjamin secara mutlak terhadap adanya salah saji yang material, kerugian, atau terjadinya kondisi lain yang tidak terduga.

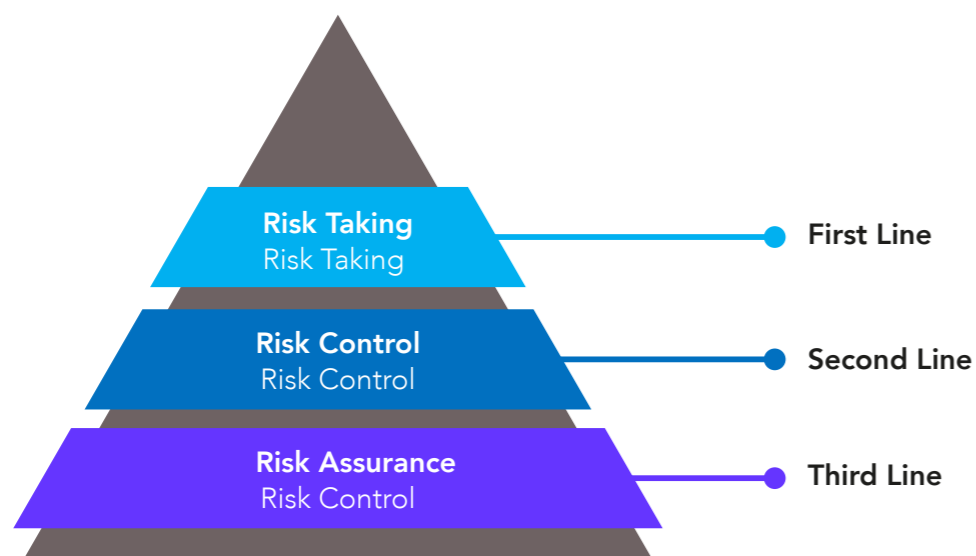
The Company's internal system functions to manage the risks to remain within the tolerance limit. In operational activities, the internal control system is designed and applied to manage and control risks, instead of to eliminate risks. Therefore, the internal control system is expected to be able to give adequate confidence regarding the achievement of an entity's control goals, but does not absolutely guarantee any material misstatement, loss, or occurrence of other unexpected conditions.

Pelaksanaan pengendalian intern Perusahaan juga dilakukan melalui pengendalian keuangan, dimana Direksi menyusun dan mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris atas rencana strategis yang dituangkan dalam Rencana Bisnis sebagai acuan strategi bisnis.

The implementation of the Company's internal control is also conducted by financial control, in which the Board of Directors prepares and obtains the Board of Commissioners' approval on the strategic plan articulated in the Business Plan as the business strategy reference.

Kerangka kerja pengendalian internal Perusahaan menerapkan pendekatan pertahanan berlapis (Three Lines of Defenses), yang masing-masing bekerja secara independen:

The Company's internal control framework applies a layered defense approach (Three Lines of Defenses), each works independently:



- Seluruh unit bisnis dan unit operasional berfungsi sebagai First Line of Defense yang mengelola risiko terkait unit kerjanya (risk owner).
- Risk & Compliance Department berfungsi sebagai Second Line of Defense yang memantau penerapan kebijakan dan panduan manajemen risiko secara korporasi.
- Internal Audit & Anti Fraud Department berfungsi sebagai Third Line of Defense bertugas memberikan risk assurance terhadap kecukupan dan efektivitas penerapan tata kelola manajemen risiko dan sistem pengendalian internal dan memastikan bahwa semua risiko yang melekat (inherent risk) telah dikelola sehingga risiko residual sesuai dengan toleransi risiko yang telah disepakati dan risk appetite yang ditetapkan Perusahaan.

- All business units and operational units function as the First Line of Defense that manages the risks related to the work units (risk owner).
- The Risk & Compliance Department functions as the Second Line of Defense that monitors the application of policy and guidelines for risk management in corporation.
- The Internal Audit & Anti Fraud Department functions as the Third Line of Defense that is assigned to give risk assurance on the adequacy and effectiveness of application of risk management governance and internal control system and ensures that all inherent risks have been managed so that the residual risks will be according to the risk tolerance agreed and risk appetite specified by the Company.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit mempunyai fungsi pengawasan yang berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian internal, dan proses tata kelola pada semua aspek kegiatan Perusahaan dengan pendekatan berbasis risiko. Dengan demikian fungsi pengawasan tersebut dilakukan terhadap lini pertahanan pertama (Risk Taking Unit) serta juga terhadap lini pertahanan kedua (Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko).

As part of the internal control system in the third line of defense, the Internal Audit has the supervising function playing the role in making evaluation on the risk management, internal control effectiveness, and the governance process in all aspects of the Company's activities by a risk-based approach. Therefore the supervising function is conducted on the first line of defense (Risk Taking Unit) and on the second line of defense (Compliance and Work Unit of Risk Management).

Evaluasi yang dilakukan oleh Internal Audit terhadap efektivitas pengendalian internal turut memperhatikan organisasi dan sumber daya manusia, pelayanan terhadap nasabah, infrastruktur Perusahaan maupun kualitas pelaksanaan proses-proses utama yang memiliki risiko bagi Perusahaan.

The evaluation conducted by the Internal Audit on the effectiveness of internal control also considers the organization and human resources, service to customers, the Company's infrastructures and the performance quality of main processes having risks to the Company.

Atas setiap temuan Internal Audit melakukan pemantauan status perbaikan yang dilakukan secara berkala dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Direksi terkait maupun Komite Audit. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Internal Audit dilakukan berdasarkan Piagam Audit Internal dan SOP Audit Internal yang disusun berdasarkan best practice dan ketentuan dari regulator yang berlaku.

On any findings, the Internal Audit conducts monitoring of the repair status conducted periodically and reports it to the President Director, related Directors or the Audit Committee. The supervising function carried out by the Internal Audit is conducted based on the internal Audit Charter and Internal Audit SOP prepared based on best practice and the regulator's prevailing conditions.

f. Upaya Peningkatan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko 7 (Tujuh) Risiko Utama Sepanjang Tahun 2019

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.05/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, maka Perusahaan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dari penerapan manajemen risiko di Perusahaan sepanjang tahun 2019 terhadap setiap jenis risiko yang dikelola, antara lain:

1. Risiko Pembiayaan

- Risiko pembiayaan timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Di industri perusahaan pembiayaan, risiko pembiayaan dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional perusahaan pembiayaan, seperti risiko yang timbul dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah.
- Perusahaan berupaya melakukan perbaikan kualitas manajemen dan pengendalian risiko pembiayaan dengan melakukan pengelolaan risiko pembiayaan pada tingkat individual maupun di tingkat portofolio.
- Perbaikan kualitas pengelolaan risiko pembiayaan dilaksanakan semakin intensif sepanjang tahun 2019, dengan melakukan antara lain beberapa aktivitas antara lain:
  - a. Membentuk fungsi kustodian dokumen pembiayaan untuk mengelola dokumen pembiayaan secara keseluruhan. Penyimpanan dokumen pembiayaan secara hardcopy dikelola oleh beberapa unit berdasarkan fungsinya, misalnya dokumen terkait perjanjian disimpan oleh Legal Dept, dokumen jaminan disimpan oleh Credit Admin, dan Marketing File disimpan oleh Business Support. Hal ini menyebabkan proses yang cukup lama jika terdapat permintaan atas dokumen pembiayaan untuk suatu debitur. Oleh karena itu, Perusahaan membentuk fungsi kustodian dokumen pembiayaan

f. Efforts of Increasing the Quality of Risk Management Application of 7 (Seven) Main Risks During 2019

Referring to Financial Services Authority Regulation No.1/POJK.05/2015 dated 26th March 2015 on Risk Management Application For Non-Bank Financial Service Institutions, the Company made various effort to increasing the quality of risk management application in the Company during 2019 on any types of risk managed, among others:

1. Financing Risk

- Financing risk arose due to failure of the customers or other parties in fulfilling their liabilities to the Company according to the agreement. In finance company industry, financing risk can arise from various functional activities of finance composition, such as the risk arising from finance distribution to customers.
- The Company sought to improve the quality of financing risk management and control by conducting financing risk management at individual level and portfolio level.
- Improvement of financing risk management quality was conducted more intensively during 2019, namely by conducting some activities such as:
  - a. Establishing a custodian function of financing documents to manage financing documents in overall. The keeping of hardcopy financing documents is managed by several units based on their functions, for example documents related to agreements are kept by the Legal Department, guarantee documents are kept by the Credit Administration, and Marketing Files are kept by the Business Support. This causes a quite long process in case of request for any financing document for a debtor. Therefore the Company established a custodian function of financing documents under the Business Support Department

yang berada di bawah Business Support Department yang bertugas mengelola seluruh dokumen pembiayaan secara digital.

b. Tambahan Analisa Kewajaran Nilai Obyek Pembiayaan & Kemampuan Supplier

- Pada proses analisa pembiayaan oleh Credit Analyst, juga ditambahkan analisa terhadap kewajaran nilai objek pembiayaan yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai perbandingan kewajaran (benchmarking).
- Dalam hal nilai unit yang diajukan kurang sesuai atau terlalu tinggi, maka Credit Analyst akan menyesuaikan pada rekomendasi untuk mitigasi risiko, misalnya pengurangan eksposur, penambahan uang muka, persyaratan additional collateral, dan sebagainya.
- Selain itu, untuk produk yang memiliki fitur Buy Back Guarantee (BBG), maka perlu diketahui kemampuan supplier untuk mengantisipasi jika terjadi default. Oleh karena itu, untuk produk yang memiliki BBG juga dilakukan analisa kemampuan supplier.

c. Kerjasama dan Penggunaan Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP)

- Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan (LPIP) adalah lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan.
- Pada tahun 2019, Perusahaan menjalin kerjasama dengan salah satu LPIP, yaitu Pefindo Biro Kredit.
- Dengan adanya kerjasama tersebut, maka Perusahaan dapat menggunakan aplikasi scoring yang disediakan oleh Pefindo.

assigned to manage all financing documents digitally.

b. Addition of Analysis of Fairness of Financing Object Value & Supplier Capability

- In the process of financing analysis by the Credit Analyst is also added an analysis on the fairness of the financing object value obtained from various sources as comparison of fairness (benchmarking).
- In case the unit value proposed is not proper or too high, the Credit Analyst will adjust at recommendation for risk mitigation, e.g. reduction exposure, addition of advance pay, requirement of additional collateral, etc.
- Besides, for products having the Buy Back Guarantee (BBG) feature, the supplier's capacity should be identified to anticipate any default that could occur. Therefore, for products having BBG is also conducted analysis on supplier's capacity.

c. Cooperation and Use of Credit Information Management Agency (LPIP)

- Credit Information Management Agency (LPIP) is an institution or agency collecting and processing credit data and other data to produce credit information.
- In 2019, the Company established cooperation with an LPIP, i.e. Pefindo Biro Kredit.
- By the existing cooperation, the Company could use the scoring application provided by Pefindo.

- Hasil scoring dari aplikasi Pefindo tersebut dapat digunakan untuk salah satu referensi dalam analisa atau pemberian keputusan pembiayaan.
- d. Mengevaluasi dan memperbarui limit dan kewenangan anggota Komite Pembiayaan secara berkala.
- e. Mengevaluasi dan memperbarui Risk Appetite Statement (RAS) dan Risk Tolerance Tahun 2019.
- f. Menetapkan mekanisme penagihan dan penjualan aset yang ditarik untuk pembiayaan medical equipment.
- g. Menetapkan larangan praktek plafondering pada saat restrukturisasi pembiayaan.
- h. Pemberian ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan Berdasarkan POJK No.35/POJK.05/2018 khususnya pasal 38 ayat 1 yang berbunyi "Perusahaan Pembiayaan wajib menjelaskan ilustrasi Perhitungan pokok piutang pembiayaan dan bunga selama jangka waktu pembiayaan serta ilustrasi pengenaan denda dan biaya eksekusi agunan dalam hal Debitur wanprestasi kepada Debitur sebelum penandatanganan perjanjian pembiayaan". Perusahaan telah menerapkan hal tersebut ke dalam suatu dokumen yang salah satunya berisi penjelasan ilustrasi pada Nasabah untuk ditandatangani oleh Nasabah.
- i. SMS Blast Pengembalian Dokumen Jaminan Berdasarkan POJK No.35/POJK.05/2018 pasal 46, salah satu kewajiban Perusahaan Pembiayaan adalah menyampaikan pemberitahuan terkait pengembalian bukti kepemilikan atas agunan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pelunasan piutang pembiayaan. Selaras dengan ketentuan tersebut maka Perusahaan menyampaikan pemberitahuan tertulis tersebut kepada nasabah yang pembiayaannya telah diselesaikan

- The result of scoring from Pefindo application can be used as a reference in the analysis or in giving the financing decision.

- d. Evaluating and renewing the limit and authority of members of the Financing Committee periodically.
- e. Evaluating and renewing the Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Tolerance of 2019.
- f. Specifying the mechanism of billing and selling of assets drawn by medical equipment financing.
- g. Specifying the prohibition of plafondering practice at the time of financing restructuring.
- h. Giving illustration on imposition of fine and collateral execution fee Based on POJK No.35/POJK.05/2018 particularly article 38 paragraph 1, reading "The Finance Company shall clarify the illustration on Calculation of financing receivables principle and interest during the financing period and the illustration on imposition of fine and collateral execution fee in case of Debtor's non-performance to the Debtor before the signing of financing agreement". The Company has applied this in a document containing among others, clarification of illustration to Customer to be signed by the Customer.
- i. SMS Blast of Guarantee Document Return Based on POJK No.35/POJK.05/2018 article 46, one of the obligations of Finance Companies is to give notification related to the return of proof of ownership for collateral not later than 1 (one) month since the date of settlement of financing receivables. In line with the above condition, the Company gives the written information to customers whose financing have been settled (paid-off) via Short Message Service (SMS).

(lunas) melalui Short Message Service (SMS).

- j. Perbaikan proses dan tata cara pengajuan banding atas keputusan Komite Pembiayaan Dalam hal terdapat keberatan dari pihak calon debitur atas keputusan Komite Pembiayaan, maka dapat dilakukan "banding" yang dituangkan oleh Pihak Marketing dalam dokumen Credit Approval Memorandum (CAM). Perbaikan proses berupa penggolongan CAM berdasarkan 3 (tiga) kategori, yaitu CAM Risk, CAM Non Risk, dan CAM Komersial dimana terdapat level kewenangan untuk masing-masing jenis CAM dengan mempertimbangkan risiko dan dampak CAM.
- k. Penetapan reward bagi internal Perusahaan untuk penanganan dan penyelesaian pembiayaan yang menunggak.
- l. Pengembangan aplikasi iTracking, sebagai alat bantu untuk tracking atau merekam proses pembiayaan mulai dari proses aplikasi, analisa, approval, signing, hingga pencairan sehingga Service Level Agreement (SLA) dapat diukur dan menjadi bahan evaluasi.
- m. Pengembangan dashboard company performance sebagai salah satu bentuk Early Warning System yang mencantumkan pencapaian dan kinerja perusahaan, antara lain: total pencairan bulan berjalan, aging pembiayaan, dokumen pending, dan sebagainya.
- n. Pengembangan pada sistem untuk Customer Grouping dalam rangka mengelompokkan debitur untuk pemantauan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP) kelompok debitur.
- o. Pengembangan pada sistem untuk menu Desk Collection pada sistem, sehingga report desk collection dan performance desk collection secara harian dapat dipantau, serta

- j. Improvement of process and procedure for appeal against the Financing Committee's decision In case of any objection of prospective debtors to the Financing Committee's decision, an "appeal" may be conducted as articulated by the Marketing Party in the Credit Approval Memorandum (CAM) document. Correction of the process is in the form of classification based on 3 (three) categories, namely Risk CAM, Non-Risk CAM, and Commercial CAM in which there is an authority level for each type of CAM by considering the risks and impacts of CAM.
- k. Determination of reward for the Company's internally for handling and settlement of delinquent financings.
- l. Development of Itracking application as a device for tracking or recording the financing process from the process of application, analysis, approval, signing, to disbursement to enable to measure the Service Level Agreement (SLA) and to serve as the material for evaluation.
- m. Development of dashboard company performance as a form of Early Warning System specifying the company's achievement and performance, namely: total disbursement of current month, financing aging, pending documents, etc.
- n. Development in the system for Customer Grouping in order to group debtors for monitoring the Maximum Limit of Financing Provision (BMPP) of debtor group.
- o. Development in the system for Desk Collection menu in the system, so that the report on desk collection and the performance of desk collection can be monitored daily,

- informasi mengenai Debitur yang perlu dilakukan penagihan dapat diketahui langsung pada menu tersebut.
- p. Penggunaan Form Checklist Dokumen & Checklist Legalitas  
Untuk memastikan kelengkapan dokumen persyaratan dokumen pembiayaan dan dokumen legalitas, maka diterbitkan.
- q. Evaluasi dan pembaruan kewenangan Pemberian Diskon Denda, Penalti, Hapus Buku dan Hapus Tagih
- Denda dapat timbul akibat terjadi tunggakan karena keterlambatan pembayaran dengan besaran sesuai yang telah diperjanjikan. Penalti dapat timbul akibat pelunasan dipercepat (early termination) dengan besaran sesuai yang telah diperjanjikan.
  - Dalam prakteknya, terdapat kondisi dimana Debitur meminta keringanan atas denda atau penalti. Pada tahun 2019, telah dilakukan evaluasi untuk kewenangan memutus pemberian diskon denda dimana sebelumnya untuk nominal tertentu dapat diputus di level di bawah Direksi. Setelah evaluasi, maka untuk lebih hati-hati dalam pemberian kewenangan, kewenangan memutus dipegang sepenuhnya oleh pejabat di level Direksi.
  - Pada tahun 2019, dilakukan penyesuaian kewenangan Hapus Buku dan Hapus Tagih atas pembiayaan dengan memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip kehati-hatian.
- r. Pemberitahuan kepada Debitur terkait giro tolakan.  
Salah satu metode pembayaran angsuran/sewa yang diterima oleh Perusahaan adalah menggunakan giro. Dalam prakteknya, dapat terjadi tolakan giro yang disebabkan karena beberapa hal, salah satunya karena
- and information on Debtors who have to be billed will be able to find out directly in the menu.
- p. Use of Document Checklist & Legality Checklist Forms  
To ensure the completeness of required documents, financing document and legality document, are issued.
- q. Evaluation and renewal of authority for Giving Fine Discount, Penalty, Write-off and Charge-off
- Fines may arise resulting from arrears due to delayed payment of the amounts as agreed. Penalties may arise resulting from accelerated settlement (early termination) of the amounts as agreed.
  - In practice, there is a condition when the Debtor asks for relief on the fine or penalty. In 2019, evaluation was conducted for authority to decide the giving of discount for fine, as formerly for certain nominal could be decided at the level below the Board of Directors. After evaluation, to be careful in giving authority, the authority to decide is fully held by the officials at the level of Board of Directors.
  - In 2019, adjustment was made to the authority for Write-off and Charge-off on financing with respect to the Articles of Association and the principle of prudence.
- r. Notification to Debtors related to current account repulsion.  
One of the payment methods of installment/lease received by the Company is by using current account. In practice, repulsion of current account may occur for some reasons, one of them is because the
- dana tidak cukup pada rekening Debitur (Not Sufficient Fund).  
Dalam hal terjadi tolakan giro akibat dana tidak cukup pada rekening Debitur atau Not Sufficient Fund, pihak Perusahaan segera menyampaikan secara tertulis kepada Debitur berupa pemberitahuan giro tolakan Debitur.
- s. Stock Opname File Marketing  
Untuk memastikan kelengkapan dari file marketing Debitur, maka pada periode tertentu secara berkala dilakukan stock opname atas file marketing.
- t. Melakukan simulasi dan persiapan implementasi PSAK 71  
Surat OJK No. S-669/NB.22/2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal Persiapan Implementasi PSAK 71, maka Perusahaan bekerja sama dengan konsultan melakukan simulasi perhitungan berdasarkan PSAK 71 dan telah menyampaikan hasil simulasi kepada OJK. Selain itu, Perusahaan telah mengikutsertakan karyawan di unit kerja terkait untuk pelatihan terkait PSAK 71 untuk mempersiapkan implementasi PSAK 71 di tahun 2020.
- fund in the Debtor's account is not sufficient (Not Sufficient Fund).  
In case of current account repulsion resulting from insufficient fund in the Debtor's account, the Company shall immediately inform in writing to the Debtor by notification of Debtor's current account repulsion.
- s. Inventory Taking of Marketing File  
To ensure the completeness of the Debtor's marketing file, inventory taking is conducted on the marketing file periodically for a specific period.
- t. Conducting simulation and preparation of PSAK 71 implementation  
OJK Letter No. S-669/NB.22/2018 dated 11th May 2018 on Preparation of PSAK 71 Implementation, the Company in cooperation with the consultant conducted calculation simulation based on PSAK 71 and submitted the result of simulation to OJK. Besides, the Company has included participation of employees in the related work unit for training related to PSAK 71 in order to prepare PSAK 71 implementation in 2020.
2. Risiko Operasional
- Risiko operasional merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan, tidak berfungsinya atau ketidakcukupan proses internal, kesalahan manusia, sistem atau faktor eksternal yang mempengaruhi aktivitas operasional Perusahaan.
  - Risiko operasional dapat secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan kerugian baik secara finansial maupun non-finansial serta dapat menghambat Perusahaan dalam mencapai keuntungan dan pertumbuhan.
  - Perbaikan kualitas pengelolaan risiko operasional sepanjang tahun 2018, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:
    - a. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan melalui pelaksanaan pelatihan yang sesuai dengan rencana pelatihan
2. Operational Risk
- Operational risk is a risk caused by failure, non-functioning or inadequacy of internal process, human errors, system errors or external factors affecting the Company's operational activities.
  - Operational risk may directly or indirectly cause a loss, either financially or non-financially, and may hamper the Company in making a profit and growth.
  - Improvement of the management quality of operational risk of 2018 was conducted by several activities, among others:
    - a. Improvement of the Human Resources (HR) quality sustainably by carrying out trainings according

dan disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi pegawai.

- b. Melakukan uji Disaster Recovery Center (DRC)  
Uji DRC dilakukan untuk memastikan kesiapan DRC ketika kondisi darurat terjadi sehingga kegiatan usaha Perusahaan tetap dapat berjalan.
- c. Pengembangan dan Perbaikan Sistem Teknologi  
Pengembangan dan perbaikan sistem dan teknologi informasi yang digunakan salah satunya ditujukan untuk meminimalisir pekerjaan yang bersifat manual yang rentan akan terjadinya human error.

Beberapa pengembangan dan perbaikan dari segi sistem dan teknologi informasi di tahun 2019, antara lain:

- i. Perbaikan Surat Peringatan (SP)
  - Surat Peringatan berisi reminder dan penagihan atas tunggakan kewajiban Debitur.
  - Perbaikan yang dilakukan adalah terhadap format Surat Peringatan menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan penambahan disclaimer pada Surat Peringatan sehingga tidak memerlukan tanda tangan basah.
  - Selain itu, untuk keperluan monitoring penyampaian SP, maka ditambahkan kolom untuk penginputan nomor resi atau referensi pengiriman SP.

to the training plan and prepared based on employee's competence requirement.

- b. Conducting Disaster Recovery Center (DRC) test  
DRC test was conducted to ensure DRC readiness during emergency to enable to continue operation of the Company's business activities.
- c. Development and Improvement of Technology System  
One of the objectives in the development and improvement of the system and technology of information applied is to minimize manual works that are sensitive to human errors.

Some developments and improvements of the system and technology of information in 2019 are among others:

- i. Improvement of Warning Letters (SP)
  - Warning Letters contain reminder and billing on the Debtors' liabilities in arrears.
  - The improvement is made on the format of Warning Letters to adjust to OJK Regulation No.35/POJK.05/2018 on Operation of Finance Company's Business and disclaimer addition in Warning Letter, which do not require wet signature.
  - Besides, for the requirement in monitoring of SP delivery, a column is added for input of SP delivery receipt or reference.

ii. Sistem Pendaftaran Fidusia

- Untuk produk pembiayaan yang menggunakan mitigasi risiko berupa fidusia atas jaminan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, diwajibkan untuk melakukan pendaftaran fidusia maksimum 1 bulan sejak tanggal perjanjian.
- Untuk monitoring dan kontrol terkait hal tersebut, maka setiap pendaftaran fidusia dicatat ke dalam sistem.

iii. Perbaikan Sistem Penanggalan Kontrak

Perbaikan dilakukan sehingga tanggal kontrak pada sistem dapat menyesuaikan dengan tanggal kontrak pada dokumen pembiayaan.

iv. Enhancement sistem terkait dengan pelaporan kepada regulator

Perusahaan melakukan beberapa enhancement pada core system yang digunakan untuk menyediakan informasi yang diperlukan khususnya untuk pelaporan kepada regulator seperti laporan debitur (SLIK) dan laporan bulanan, sehingga informasi yang sebelumnya kosong atau tidak muncul, dapat tersedia untuk pelaporan.

v. Validasi atas beberapa data debitur sudah dipasang pada sistem untuk mengurangi kesalahan input data debitur oleh Account Manager pada sistem, antara lain:

- Validasi terhadap format nomor KTP dan NPWP sesuai perundang-undangan yang berlaku.

ii. Fiduciary Registration System

- For financing products applying risk mitigation in the form of fiduciary on guarantee, according to OJK Regulation No.35/POJK.05/2018 on Operation of Finance Company's Business, it is required to make fiduciary registration maximum 1 month since the agreement date.
- For monitoring and control related to the above matter, each fiduciary registration shall be recorded into the system.

iii. Improvement of Contract Dating System

Improvement was made to enable adjustment of the contract date in the system to the contract date in the financing document.

iv. Enhancement of system related to reporting to the regulator

The Company made some enhancements in the core system applied to provide the required information, especially for reporting to the regulator as debtor reports (SLIK) and monthly reports, so that information formerly not available or not appearing will be available for reporting.

v. Validation on some debtors' data have been installed in the system to minimize errors of debtors' data input by the Account Manager in the system, namely:

- Validation on the format of KTP (Identity Card) and NPWP (Tax ID Number) numbers according to the prevailing legislation.



- Validasi terhadap nama ibu kandung, NIK, dan NPWP untuk menghindari double input data.
- Validasi penginputan nomor telepon dan nomor handphone sesuai format yang lebih sesuai.
- vi. Telah dilakukan pengembangan menu "things to do" untuk pencairan giro angsuran setiap hari nya agar tidak terlewatkan untuk dijalankan/proses kliring.
- vii. Telah dilakukan pengembangan untuk Automatic Mail Notification (Insurance, Agreement, dan sebagainya), dimana engine email yang dibuatkan untuk mengirimkan secara otomatis informasi-informasi kepada bisnis unit sesuai dengan keperluan.
- viii. Collateral Validation telah dapat dilakukan melalui sistem, dimana validasi ketika menerima dan mengeluarkan collateral agar informasi yang dicatat lengkap, seperti nama penerima, tanggal janji kembali dokumen, nama yang mengeluarkan, termasuk juga setting layout form printing Berita Acara Serah Terima (BAST) dokumen Collateral, sehingga tidak perlu cetak manual lagi.
- ix. Menu Reporting  
Pada core system yang digunakan telah ditambahkan beberapa menu reporting untuk penyediaan data yang digunakan untuk reporting, baik untuk pelaporan internal maupun eksternal.
- Penerapan Strategi Anti Fraud
  - i. Penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh karyawan dan Manajemen
- Validation on the name of biological mother, NIK (Population ID Number), and NPWP to avoid double data input.
- Validation of telephone number and hand phone number input according to more suitable formats.
- vi. "Things to do" menu has been developed for disbursement of current account of installments everyday in order to avoid missing of disbursement execution/process.
- vii. Automatic Mail Notification (Insurance, Agreement, etc.) has been developed, in which the engine email is produced for automatically sending information to business units as required.
- viii. Collateral Validation has been able to conduct by the system, in which validation is conducted when receiving and issuing collateral to enable to record complete information, such as the receiver's name, date promised for document return, name of issuer, including printing form layout setting of Minutes of Transfer (BSAT) of Collateral document, so that manual printing is no more required.
- ix. Reporting Menu  
In the core system applied has been added some reporting menus for providing the data used for either internal or external reporting.
- Application of Anti Fraud Strategy
  - i. Signing of Integrity Pact by all employees and the Management.
- ii. Kampanye Anti Fraud Awareness kepada seluruh cabang dan unit kerja melalui email dan morning briefing.
- iii. Pemeriksaan secara berkala oleh Departemen Anti Fraud.
- Evaluasi dan standarisasi ulang Perjanjian Pembiayaan, mencakup untuk skema pembiayaan installment financing, sale and leaseback, dan finance lease.
- 3. Risiko Tata Kelola
  - Risiko Tata Kelola merupakan risiko kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Perusahaan.
  - Perbaikan kualitas pengelolaan risiko tata kelola sepanjang tahun 2019, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:
    - a. Melengkapi beberapa governance documents, seperti:
      - i. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah
      - ii. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi
    - b. Penyelenggaraan rapat Direksi minimal 1 (kali) dalam sebulan, termasuk memastikan Direksi menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun dan mendokumentasikan pelaksanaan rapat dalam risalah rapat.
    - c. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris minimal 1 (kali) dalam 3 (tiga) bulan, termasuk memastikan Anggota Dewan Komisaris perusahaan menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun dan mendokumentasikan pelaksanaan rapat dalam risalah rapat.
- ii. Anti Fraud Awareness campaign to all branches and work units by email and morning briefing.
- iii. Periodical audit by the Anti Fraud Department.
- Evaluation and standardization of Financing Agreement, covering the scheme of installment financing, sale and leaseback, and finance lease.
- 3. Governance Risk
  - Governance Risk is a risk of failure in the implementation of good governance, inaccuracy of management style, control environment, and behavior of any parties directly or indirectly involved in the Company.
  - Improvement of the quality of governance risk management during 2019, conducted by some activities, among others:
    - a. Completing some governance documents, such as:
      - i. Policy of Remuneration for the Board of Directors, Board of Commissioners and Sharia Supervisory Board.
      - ii. Charter of Nomination and Remuneration Committee.
    - b. Organizing the Board of Directors' meeting at least 1x (once) a month, including ensuring the Board of Directors to attend the Board of Directors' meeting at least 50% (fifty percent) of the number of Board of Directors' meetings within 1 (one) year and documenting the meeting implementation in the meeting minutes.
    - c. Organizing the Board of Commissioners' meeting at least 1x (once) in 3 (three) months, including ensuring the company's Members of Board of Commissioners to attend the Board of Commissioners' meeting at least 75% (seventy five percent) of the number of Board of Commissioners' meetings within 1 (one) year and documenting the meeting implementation in the meeting minutes.

- d. Pemberian pelatihan atau seminar bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, terutama untuk pemenuhan syarat keberlanjutan sesuai Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
- e. Mengikutsertakan Direksi untuk sertifikasi ahli pembiayaan bagi Direksi.
- f. Mengikutsertakan Komisaris Utama untuk sertifikasi dasar pembiayaan bagi Komisaris.
- g. Untuk prinsip transparansi dan menyesuaikan dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, maka pada Kantor Pusat dan Kantor Selain Kantor Cabang (KSKC) dipasang beberapa pengumuman:
  - i. Pengumuman terkait suku bunga atau margin yang digunakan.
  - ii. Pengumuman yang menginformasikan kepada calon Debitur dan Debitur agar membaca dan memahami isi kontrak yang diatur dalam perjanjian pembiayaan.

#### 4. Risiko Kepengurusan

- Risiko kepengurusan merupakan risiko yang risiko kegagalan Perusahaan dalam mencapai tujuan Perusahaan akibat kegagalan Perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.
- Perbaikan kualitas pengelolaan risiko kepengurusan sepanjang tahun 2019, dilakukan antara lain melalui beberapa aktivitas antara lain:
  - a. Melengkapi job description bagi Direksi.
  - b. Menjaga komposisi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah minimal sesuai dengan ketentuan regulator.

- d. Giving trainings or seminars to the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board, especially for fulfilling the continuation conditions according to OJK Regulation No.35/POJK.05/2018 on Operation of Finance Company's Business.
- e. Including the Board of Directors' participation for certification of finance experts for the Board of Directors.
- f. Including the President Commissioner' participation for certification of basic financing for the Commissioner.
- g. For the principle of transparency and adjustment to OJK Regulation No.35/POJK.05/2018 on Operation of Finance Company's Business, in the Head Office and Offices Other than Branch Offices (KSKC) shall be posted some announcements:
  - i. Announcement related to interest rate or margin applied.
  - ii. Announcement informing to prospective Debtors and Debtors to read and understand the contract content regulated in the financing agreement.

#### 4. Stewardship Risk

- Stewardship risk is a risk of Company's failure in achieving the Company's goals resulting from the Company's failure in maintaining the best composition of the management having high competence and integrity.
- Improvement of the quality of stewardship risk management during 2019 is conducted by some activities, among others:
  - a. Completing the job description for the Board of Directors.
  - b. Maintaining the composition of Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board at least according to the regulator's conditions.

- c. Pendidikan dan pelatihan bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah secara berkala.
- d. Penandatanganan Pakta Integritas oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

#### 5. Risiko Dukungan Dana

- Risiko dukungan dana merupakan risiko yang muncul akibat ketidakcukupan dana/modal yang ada pada Perusahaan, termasuk kurangnya akses tambahan dana/modal dalam menghadapi kerugian atau kebutuhan dana/modal yang tidak terduga.
- Nilai dukungan dana mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menyerap kerugian yang tidak terduga yang berasal dari pengelolaan aset dan liabilitas perusahaan. Dalam menentukan dukungan dana, perusahaan mempertimbangkan aspek kemampuan permodalan dan tambahan permodalan.
- Upaya untuk peningkatan kualitas pengelolaan risiko dukungan dana sepanjang tahun 2019, antara lain:
  - a. Menjaga rasio permodalan senantiasa di atas 50% (lima puluh persen) (standar regulator adalah minimal 10%).
  - b. Melakukan efisiensi pengeluaran biaya untuk menjaga rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sesuai target yang ditetapkan.
  - c. Menjaga tingkat profitabilitas sesuai target yang ditetapkan.

#### 6. Risiko Aset & Liabilitas

- Risiko aset & liabilitas adalah risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas Perusahaan, yang menimbulkan kekurangan dana dalam pemenuhan kewajiban perusahaan.
- Upaya untuk peningkatan kualitas pengelolaan risiko aset dan liabilitas sepanjang tahun 2019, antara lain:
  - a. Mengevaluasi dan memperbarui Risk Appetite Statement (RAS) dan Risk Tolerance untuk risiko aset dan liabilitas tahun 2019.

- c. Education and trainings for the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board periodically.
- d. Signing of Integrity Pact by the Board of Directors and Board of Commissioners.

#### 5. Fund Support Risk

- Fund support risk is a risk arising from insufficient fund/capital available in the Company, including shortage of access to fund/capital addition in encountering unanticipated loss or fund/capital requirement.
- The value of fund support reflects the company's capacity in absorbing any anticipated loss from the company's assets and liabilities management. In deciding the fund support, the company considers the aspects of capitalization capacity and capitalization addition.
- The efforts in improving the quality of risk management of fund support during 2019 are among others:
  - a. Maintaining the capitalization ratio to be consistently over 50% (fifty percent) (the regulator's standard is minimum 10%).
  - b. Making efficiency in expenses for maintaining the ratio of Operating Cost to Operating Income (BOPO) according to the set target.
  - c. Maintaining the profitability level according to the set target.

#### 6. Assets & Liabilities Risk

- Assets & liabilities risk is a risk occurring from the existing potential failure in the Company's assets and liabilities management, giving rise to fund shortage in fulfillment of the company's liabilities.
- The efforts in improving the quality of assets and liabilities risk management during 2019 are namely:
  - a. Evaluating and renewing the Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Tolerance for assets and liabilities risk in 2019.

- b. Menyusun Laporan Arus Kas secara mingguan.
- c. Optimalisasi penggunaan dana, salah satu strateginya dengan mengalihkan dana menjadi Restricted Cash untuk memperoleh fasilitas pinjaman dana dari pihak ketiga.
- d. Melakukan efisiensi pengeluaran biaya untuk menjaga rasio Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sesuai target yang ditetapkan.
- e. Menjaga tingkat profitabilitas sesuai target yang ditetapkan.
- f. Memantau profil maturitas (maturity profile).
- g. Menjaga reputasi dan image Perusahaan terhadap seluruh stakeholders, antara lain dengan:
  - Memantau pemberitaan terhadap Perusahaan.
  - Memantau dan menindaklanjuti setiap pengaduan nasabah.

#### 7. Risiko Strategi

Risiko strategi dapat muncul akibat kegagalan penetapan strategi yang tepat dalam rangka pencapaian sasaran dan target utama Perusahaan.

Dalam hal mengelola risiko strategi sepanjang tahun 2019, perusahaan melakukan hal-hal berikut:

- Perusahaan telah menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) dan Risk Tolerance untuk risiko strategi, yang mencakup antara lain Realisasi Aktual terhadap Rencana Bisnis (dinilai dari rasio Return on Asset dan Return on Equity).
- Penyusunan dan pemantauan atas rencana bisnis.
- Penyelenggaraan rapat kerja setiap semester guna melakukan evaluasi dan rencana perbaikan terhadap kinerja usaha.

- b. Producing the Cash Flow Report weekly.
- c. Optimizing the utilization of funds, one of the strategies is by transferring funds into Restricted Cash for obtaining loan facilities of funds from third parties.
- d. Making efficiency of expenses for maintaining the ratio of Operating Cost to Operating Income (BOPO) according to the set target.
- e. Maintaining the profitability level according to the set target.
- f. Monitoring the maturity profile.
- g. Maintaining the Company's reputation and image against all stakeholders, among other by:
  - Monitoring the news about the Company.
  - Monitoring and following-up any customer complaints.

#### 7. Strategy Risk

Strategy risk may arise due to failure in deciding the right strategy in order to achieve the Company's main goal and target.

In managing the strategy risk during 2019, the company conducted as follows:

- The Company has specified the Risk Appetite Statement (RAS) and Risk Tolerance for the strategy risk, covering among others the Actual Realization on the Business Plan (evaluated from the ratio of Return on Asset and Return on Equity).
- Preparing and monitoring the business plan.
- Organizing a work meeting each semester for making evaluation and improvement plan on the business performance.

- Meningkatkan kualitas pelayanan kepada Debitur, antara lain:
  - a. Mengirimkan Starter Pack  
Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada Debitur adalah dengan menyampaikan Starter Pack akan diberikan kepada Debitur yang fasilitas pembiayaannya baru dicairkan.  
Starter pack terdiri atas beberapa dokumen, antara lain:
    - i. Kontrak;
    - ii. Polis Asuransi;
    - iii. Panduan Pengaduan Nasabah;
    - iv. Panduan Pembayaran Angsuran;
    - v. Panduan Claim Asuransi; dan
    - vi. Thank You Letter.
  - b. Pembaruan Hotline untuk Customer Care

- Improving the service quality to the Debtors, namely:
  - a. Sending Starter Pack  
One of the efforts in improving the service quality to Debtors is by sending a Starter Pack to be provided to Debtors whose financing facilities are just disbursed.  
  
The starter pack consists of several documents, namely:
    - i. Contract;
    - ii. Insurance Policy;
    - iii. Customer Complaint Guide;
    - iv. Installment Payment Guide;
    - v. Insurance Claim Guide; and
    - vi. Thank You Letter.
  - b. Renewing Hotline for Customer Care



TATA KELOLA  
PERUSAHAAN

**06**

## 1. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

### a. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan.
2. Direksi bertanggung jawab untuk menetapkan arah strategis jangka pendek dan jangka panjang serta prioritas Perseroan.
3. Direksi wajib:
  - Memimpin dan mengurus Perusahaan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
  - Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan perundang-undangan peraturan yang berlaku.
  - Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
  - Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan.
  - Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal Perusahaan dalam setiap tingkatan manajemen.
  - Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi audit internal Perusahaan, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan hasil pengawasan otoritas lainnya.
  - Dengan konsisten melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - Mempertimbangkan risiko usaha dalam setiap pengambilan keputusan.
  - Membangun dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Perusahaan.
4. Direksi wajib memelihara hubungan yang sehat dan terbuka dengan Dewan Komisaris

## 1. JOBS AND RESPONSIBILITIES OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS)

### a. Jobs and Responsibilities of Board of Directors

1. The Board of Directors is fully responsible for the implementation of Company's stewardship.
2. The Board of Directors is responsible for specifying the Company's short-term and long-term strategic directions and priorities.
3. The Board of Directors shall be required to:
  - Direct and manage the Company according to the Company's objectives.
  - Manage the Company according to its authorities and responsibilities as regulated in the Articles of Association and the prevailing legislation.
  - Each member of the Board of Directors shall in good faith and with full responsibility perform his jobs by observing the prevailing lg.
  - Organize annual General Meeting of Shareholders (RUPS) and other RUPS as regulated in the legislation and Articles of Association.
  - Control, maintain, and manage the Company's properties in the Company's interest.
  - Create the internal control structure, ensure the coordination of Company's internal audit function in each management level.
  - Follow-up findings and recommendations of the Company's internal audit, external auditor, results of supervision of Financial Services Authority (OJK), and results of supervision of other authorities.
  - Consistently perform the principles of Governance in each business activity at all organizational levels or stages.
  - Consider the business risks in any decision makings.
  - Build and actualize the implementation of compliance culture at all organizational levels and business activities of the Company.
4. The Board of Directors shall maintain a healthy and open relationship with the Board

dan mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan perannya sebagai organ pengawas.

5. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
6. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, Direksi dapat membentuk komite sesuai kebutuhan Perusahaan.
7. Mekanisme kerja dari para anggota Direksi Perusahaan dibagi berdasarkan job description masing-masing.

### b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan tugas pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris.
5. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan:
  - Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;
  - Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
  - Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.

of Commissioners and support the Board of Commissioners in carrying out its role as supervisory organ.

5. The Board of Directors shall supply accurate, relevant and timely data and information to the Board of Commissioners.
6. In performing its jobs, the Board of Directors may establish committees according to the Company's requirement.
7. The work mechanism of members of the Company's Board of Directors shall be divided based on the respective job descriptions.

### b. Jobs and Responsibilities of Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners shall conduct supervisory job on the management policy, management operation in general, either on the Company or the Company's business, and give advice to the Board of Directors.
2. Each member of the Board of Commissioners shall in good faith, prudentially, and responsibly perform the supervisory job and give advice to the Board of Directors.
3. Each member of the Board of Commissioners shall also personally be responsible for the Company's loss, if he makes a mistake or fails in performing his job.
4. In case the Board of Commissioners consists of 2 (two) or more members, the responsibility shall apply jointly and severally for each member of the Board of Commissioners.
5. Members of the Board of Commissioners may not be asked for justification on the Company's loss, if they can prove of:
  - Having conducted the supervision in good faith and prudentially in the Company's interest and according to the Company's purpose and objectives;
  - Having no personal interest directly or indirectly in the Board of Directors' management action causing such loss; and
  - Having given advice to the Board of Directors to prevent occurrence or continuance of the loss.
6. Supervision and giving of advice are conducted in the Company's interest and according to the Company's purpose and objective and to maintain the balance of all parties' interests.

- |  |   |
|--|---|
| <p>7. Menyusun laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.</p> <p>8. Memantau efektivitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik.</p> <p>9. Komisaris Independen mempunyai tugas pokok melakukan fungsi pengawasan untuk menyuarakan kepentingan Debitur, Kreditur, dan Pemangku Kepentingan lainnya.</p>  | <p>7. To prepare the report on Board of Commissioners' activities as part of the report on Good Corporate Governance application.</p> <p>8. To monitor the effectiveness of good Corporate Governance application.</p> <p>9. Independent Commissioners shall have the main job of performing the supervision function to express the interests of Debtors, Creditors, and other Stakeholders.</p>   |
| <p>c. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah</p>  |   |
| <p>1. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan wewenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi dan mengawasi aspek syariah kegiatan operasional pembiayaan syariah, antara lain Akad Pembiayaan Syariah dan praktik pemasaran pembiayaan syariah.</p> <p>2. Pengawasan terhadap pembentukan produk pembiayaan dengan berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>3. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas - kegiatan pembiayaan.</p> <p>4. Melakukan review, menilai dan mengevaluasi pemenuhan kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah secara berkala atas transaksi-transaksi keuangan, termasuk kebijakan dan Standard Operating Procedure (SOP) Perusahaan untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan dan praktek di lapangan.</p> <p>5. Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi atas rencana bisnis pembiayaan dengan prinsip syariah di dalam rapat DPS.</p> <p>6. Mengawasi proses pengembangan produk baru kegiatan pembiayaan dengan prinsip syariah sejak awal sampai dengan diluncurkan.</p> <p>7. Memberikan opini syariah dan persetujuan terhadap seluruh produk baru, kebijakan, SOP, akad-akad, sistem pencatatan (akuntansi) dan transaksi-transaksi syariah.</p> <p>8. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional atas produk-produk baru pembiayaan dengan prinsip syariah yang belum ada fatwanya.</p> <p>9. Memberi nasihat dan saran kepada manajemen Perusahaan dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara tepat dan konsisten, serta mendorong pengembangan dan pertumbuhan serta kinerja kegiatan pembiayaan syariah.</p> | <p>c. Jobs and Responsibilities of Sharia Supervisory Board</p> <p>1. The Sharia Supervisory Board has the jobs and authorities to give advices and suggestions to the Board of Directors and to supervise the sharia aspects of sharia financing operational activities, such as Sharia Financing Agreement and sharia financing marketing practice.</p> <p>2. To supervise the establishment of financing products based on sharia principles.</p> <p>3. To analyze the reports presented by and/or asked from the Board of Directors to find out the performance quality of sharia principle fulfillment on the financing activities.</p> <p>4. To conduct review, assess and evaluate the fulfillment of financing activities by sharia principles periodically on financial transactions, including the Company's policy and Standard Operating Procedure (SOP) to ensure compatibility between sharia conditions with the field performance and practice.</p> <p>5. To give inputs and advices and recommendations on the financing business plan by sharia principles in DPS meeting.</p> <p>6. To supervise the development process of new products of financing activities by sharia principles from the beginning until they are launched.</p> <p>7. To give sharia opinions and approval on all new products, policies, SOPs, agreements, (accounting) recording system and sharia transactions.</p> <p>8. To ask for fatwa from the National Sharia Board on the financing new products by sharia principles having had no fatwa.</p> <p>9. To give advices and suggestions to the Company's management in the frame of improvement, fulfillment of sharia principles appropriately and consistently, and to encourage the development and growth and performance of sharia financing activities.</p> |

- |  |   |
|--|---|
| <p>10. Mengadakan rapat rutin DPS.</p> <p>11. Menghadiri rapat-rapat Direksi dan Komisaris apabila dipandang perlu.</p> <p>12. Memeriksa dan meminta keterangan, informasi, penjelasan dan data pendukung dari pejabat Perusahaan yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan pembiayaan dengan prinsip syariah.</p> <p>13. Melakukan review dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip syariah dan akad yang dikeluarkan oleh Perusahaan.</p> <p>14. Dewan Pengawas Syariah wajib menyusun tata tertib kerja Dewan Pengawas Syariah.</p> <p>15. Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi secara lengkap dan tepat waktu.</p> | <p>10. To organize DPS regular meetings.</p> <p>11. To attend meetings of the Board of Directors and Commissioners if deemed necessary.</p> <p>12. To examine and ask for description, information, clarification and supporting data from the authorized Company's officials on the objectives, characteristics, policies, SOPs and agreements applied in the products and activities of financing by sharia principles.</p> <p>13. To conduct review and approve all policies, systems, SOPs, products related to sharia principles and agreements issued by the Company.</p> <p>14. The Sharia Supervisory Board shall make the work orders of Sharia Supervisory Board.</p> <p>15. Members of Sharia Supervisory Board shall be entitled to receive information from the Board of Directors in complete and timely.</p> |
|--|---|

## 2. RANGKAP JABATAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)

Definisi rangkap jabatan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 30/POJK.05/2014 perihal Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.

Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perusahaan tidak memiliki rangkap jabatan di luar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang oleh peraturan perundangan.

## 2. DUAL OFFICE OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS)

The definition of dual office refers to Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 30/POJK.05/2014 on Good Corporate Governance for Finance Companies.

Members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board have no dual office other than those allowed by the prevailing regulation and may cause conflict of interest prohibited by the legislation.

### a. Rangkap Jabatan Direksi

No No	Nama Name	Posisi di perusahaan Position in Company	Posisi di perusahaan lain Position in Other Company	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud Name of Other Company Referred to	Bidang usaha Business Line
1.	Paulus Cholot Janala	Direktur Utama President Director	N/A	N/A	N/A
2.	Yusnandi Liauw	Direktur Director	N/A	N/A	N/A
3.	Henri Gunawan	Direktur Director	N/A	N/A	N/A

**b. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris**

No No	Nama Name	Posisi di perusahaan Position in Company	Posisi di perusahaan lain Position in Other Company	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud Name of Other Company Referred to	Bidang usaha Business Line
1.	Wito Mailoa	Komisaris Utama President Commissioner	N/A	N/A	N/A
2.	Erdie S. Manan	Komisaris Independen Independent Commissioner	N/A	N/A	N/A

**c. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah**

No No	Nama Name	Posisi di perusahaan Position in Company	Posisi di perusahaan lain Position in Other Company	Nama Perusahaan Lain yang Dimaksud Name of Other Company Referred to	Bidang usaha Business Line
1	Muhamad Nadratuzaman Hosen	Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of Sharia Supervisory Board	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk	Pembiayaan Financing
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Treasure Fund Investama	Investasi Investment
2	Jaenal Effendi	Anggota Dewan Pengawas Syariah Member of Sharia Supervisory Board	Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT GAP Capital	Investasi Investment
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Tifa Finance Tbk	Pembiayaan Financing
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT Reindo Syariah	Asuransi Insurance
			Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board	PT. Manulife	Asuransi Insurance

**3. PELATIHAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)**

**3. TRAINING OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD (DPS)**

**b. Pelatihan/Workshop/Seminar/Pembicara Direksi**

No No	Nama Name	Pelatihan/ Pembicara Training/Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
1.	Paulus Cholot Janala – Direktur Utama President Director	Seminar “Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Keuangan 2020” Seminar on “Development of Finance Industry Human Resources in 2020”	10 Oktober 2019 10 <sup>th</sup> October 2019	LPMI	Jakarta
		Pelatihan “Anti Fraud Awareness Untuk Perusahaan Pembiayaan” Training on “Anti Fraud Awareness For Finance Company”	2-3 Oktober 2019 2 <sup>nd</sup> -3 <sup>rd</sup> October 2019	APPI	Jakarta
		Seminar “Peluang dan Tantangan Tahun 2020” Seminar on “Opportunities and Challenges in 2020”	26 November 2019 26 <sup>th</sup> November 2019	APPI	Hotel Sheraton
		Pembicara/pengajar pada Training Basic Certification Program Speaker/instructor in Training Basic Certification Program	2 Mei 2019 2 <sup>nd</sup> May 2019	APPI	Swiss BelHotel – Jakarta
2.	Yusnandi Liauw – Direktur Director	Pembicara/pengajar pada Training Basic Certification Program Speaker/instructor in Training Basic Certification Program	13 Agustus 2019 13 <sup>th</sup> August 2019	APPI	Hotel Grand Orchardz – Jakarta
		Pembicara/pengajar pada Training Basic Certification Program Speaker/instructor in Training Basic Certification Program	15 Oktober 2019 15 <sup>th</sup> October 2019	APPI	Swiss BelHotel – Jakarta
		Pembicara/pengajar pada Training Basic Certification Program Speaker/instructor in Training Basic Certification Program	12-13 November 2019 12 <sup>th</sup> -13 <sup>th</sup> November 2019	APPI	Hotel Grand Orchardz – Jakarta
		Pembicara/pengajar pada Training Basic Certification Program Speaker/instructor in Training Basic Certification Program	12-13 Desember 2019 12 <sup>th</sup> -13 <sup>th</sup> December 2019	APPI	Haris Vertu Hotel Harmoni – Jakarta

No No	Nama Name	Pelatihan/ Pembicara Training/Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
3.	Henri Gunawan - Direktur Director	Sertifikasi Ahli Pembiayaan	18 September 2019	APPI	Mandarin Oriental Hotel – Jakarta
		Certification of Financing Expert	18 <sup>th</sup> September 2019		
		Workshop Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Batch 2 Workshop on Sustainable Finance Application for Company, Batch 2	19-20 November 2019 19 <sup>th</sup> -20 <sup>th</sup> November 2019	APPI	Kampus Bumi LPPI Jakarta

**b. Pelatihan/Workshop/Seminar Dewan Komisaris**

No No	Nama Name	Pelatihan/ Pembicara Training/Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
1.	Wito Mailoa - Komisaris Utama President Commissioner	Sertifikasi Dasar Pembiayaan Komisaris Certification of Commissioner's Basic Financing	7 Februari 2019 7 <sup>th</sup> February 2019	SPPI	Le Meridien Hotel Jakarta
		Seminar "Peluang & Tantangan Industri Asuransi Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0" Seminar on "Opportunities & Challenges of Insurance Industry In Encountering Industrial Revolution 4.0"	25 Februari 2019 25 <sup>th</sup> February 2019	Indonesian Insurance Management Experts Association	Brawa Assembly hall Hotel Bidakara Jakarta
		Training Ahli Tata Kelola Risiko Terintegrasi (ATKRT) Training on Integrated Risks Governance Expert (ATKRT)	19 – 20 November 2019 19 <sup>th</sup> – 20 <sup>th</sup> November 2019	LSPMR	Hotel Manhattan Kuningan – Jakarta
		Seminar Internasional "Multifinance: Consumer Protection, Risk Management and Fraud Early Warning System in Digital Era" International Seminar on "Multi Finance: Consumer Protection, Risk Management and Fraud Early Warning System in Digital Era"	26 April 2019 26 <sup>th</sup> April 2019	APPI	Hotel Conrad, Bali

**b. Pelatihan/Workshop/Seminar Dewan Pengawas Syariah**

No No	Nama Name	Pelatihan/ Pembicara Training/Speaker	Tanggal Date	Penyelenggara Organizer	Tempat Place
1.	Muhamad Nadratuzzaman Hosen - Ketua DPS Chairman of DPS	Sertifikasi bidang Asesmen/Uji Kompetensi dengan kualifikasi Asesor Certification of Competence Assessment/Test by Competence Assessor qualification	20 Agustus 2019 20 <sup>th</sup> August 2019	BNSP	Jakarta
		Workshop Pra-Ijtima' Sanawi DPS tahun 2019 Bidang Pasar Modal Syariah Workshop on Pra-Ijtima' Sanawi of DPS of 2019, Syariah Capital Market	18 September 2019 18 <sup>th</sup> September 2019	MUI	Jakarta
		Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS – DSN MUI 2019 Ijtima' Sanawi & Semiloka DPS – DSN MUI 2019	2-4 Oktober 2019 2 <sup>nd</sup> -4 <sup>th</sup> October 2019	MUI	Hotel Aston Bogor
		Sertifikasi bidang Asesmen/Uji Kompetensi dengan kualifikasi Asesor Kompetensi Certification of Competence Assessment/Test by Competence Assessor qualification	20 Agustus 2019 20 <sup>th</sup> August 2019	BNSP	Jakarta
		Workshop Pra-Ijtima' Sanawi DPS tahun 2019 Bidang Pembiayaan, Penjaminan, Modal Ventura, dan Fintech Syariah Workshop on Pra-Ijtima' Sanawi of DPS of 2019, Sharia Financing, Securing, Venture Capital, and Fintech	19 September 2019 19 <sup>th</sup> September 2019	MUI	Jakarta



#### 4. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

a. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Pelaksanaan tugas Dewan Komisaris selama tahun 2019, antara lain meliputi:

1. Mengawasi tugas dan tanggung jawab dari masing-masing Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi dilakukan baik secara formal dalam Rapat, maupun secara informal. Rapat formal mencakup:

- Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola, dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.
- Rapat Dewan Komisaris bersama dengan Direksi.

2. Menetapkan Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Tolerance Tahun 2019 bersama dengan Direksi, serta mengawasi perkembangan dan tingkat eksposur risiko.
3. Melakukan pengawasan atas tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Auditor Internal dan Eksternal, serta memastikan bahwa seluruh temuan telah diselesaikan dengan baik sesuai tenggat waktu yang ditetapkan.
4. Memberikan saran dan pendapat atas keputusan Direksi terhadap pemberian fasilitas Pembiayaan di atas jumlah tertentu yang wajib memperoleh opini dari Komisaris, sebagai salah satu bentuk pengawasan dan pemastian prinsip kehati-hatian.
5. Melakukan pengawasan terhadap kewenangan dan limit, antara lain untuk Komite Pembiayaan dan Komite Penjualan Aset sehingga dilakukan secara berjenjang dan menerapkan prinsip kehati-hatian.
6. Memberikan arahan, memantau penyusunan, serta memberikan persetujuan atas usulan Rencana Bisnis Tahun 2020.

#### 4. IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES AND RECOMMENDATIONS OF BOARD OF COMMISSIONERS AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

a. Implementation of Activities and Recommendations of Board of Commissioners

The implementation of the Board of Commissioners' jobs during 2019 among others includes:

1. Supervising the jobs and responsibilities of each member of the Board of Directors and giving advices to the Board of Directors are conducted formally in Meetings, as well as informally. Formal Meetings cover:

- Committees' Meetings under supervision of the Board of Commissioners, consisting of Audit Committee Meeting, Risk Monitoring Committee Meeting, Governance Committee Meeting, and Remuneration and Nomination Committee Meeting.
- Meeting of the Board of Commissioners together with the Board of Directors.

2. Specifying the Risk Appetite Statement (RAS) & Risk Tolerance of 2019 together with the Board of Directors, and supervising the development and level of risk exposure.
3. (Conducting supervision on the follow-ups of the Board of Directors on the results of findings of Internal and External Auditors, and ensuring that all findings have been well settled according to the specified deadlines.
4. Giving suggestions and opinions on the Board of Directors' decision in providing Financing facilities over certain amounts that require the Commissioners' opinion, as a form of supervision and ensuring the principle of prudence.
5. Making supervision on the authority and limit, among others for the Financing Committee and Assets Sale Committee in order to be conducted in stages and to apply the principle of prudence.
6. Giving direction, monitoring the preparation, and giving approval on the proposal of Business Plan of 2020.

7. Melakukan review atas pelaksanaan audit yang dilakukan KAP atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2018.
8. Mengawasi pelaksanaan penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Penerapan Terorisme.
9. Melakukan pengawasan terhadap Penerapan Tata Kelola, Fungsi Kepatuhan, Fungsi Internal Audit, dan Fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan.
10. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang akan diberlakukan di Perusahaan dan laporan, antara lain:

7. Making a review on the audit performance conducted by KAP (Public Accountant Office) on the Financial Statement of Fiscal Year 2018.
8. Supervising the implementation of Anti Money Laundering & Prevention of Terrorism Application.
9. Supervising the Application of Governance, Compliance Function, Internal Audit Function and Risk Management Function in the Company.
10. Giving approval on the policy to be applied in the Company and reports, namely:

No No	Perihal Re	Nomor Number	Tanggal Date
1.	Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2019 Annual Business Plan (RBT) 2019	030/MNCGUI/DIR-SRT/I/2019	25 Januari 2019
2.	Susunan Komite Pemantau Risiko Composition of Risk Monitoring Committee	02/MNCL/II/2019	12 Februari 2019
3.	Susunan Komite Tata Kelola Composition of Governance Committee	03/MNCL/II/2019	12 Februari 2019
4.	Laporan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Tahun 2019 Report on Results of Self Assessment on Risk Management Application of Finance Company of 2019	073/MNCGUI/CEO-SRT/II/2019	27 Februari 2019
5.	Laporan Hasil Penilaian Sendiri Atas Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Yang Menyelenggarakan Sebagian Usahanya Berdasarkan Prinsip Syariah Tahun 2018 Report on Results of Self Assessment on Risk Management Application of Finance Company Organizing Part of Its Business Based on Sharia Principle of 2018	074/MNCGUI/CEO-SRT/II/2019	27 Februari 2019
6.	Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Charter of Nomination and Remuneration Committee	008/CHT-MNCGUI/2019	20 Maret 2019
7.	Piagam Komite Audit Charter of Audit Committee	007/CTH-MNCGUI/2019	02 Mei 2019
8.	Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah & Direksi Remuneration Policy of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board & Board of Directors	010/KBJ-MNCGUI/2019	20 Mei 2019
9.	Kebijakan Umum Pembiayaan Financing General Policy	009/KBJ-MNCGUI/2019	31 Mei 2019
10.	Susunan Komite Audit Composition of Audit Committee	04/MNCL/VI/2019	26 Juni 2019
11.	Kebijakan Risk Appetite & Risk Tolerance Risk Appetite & Risk Tolerance Policy	008/KBJ-MNCGUI/2019	01 November 2019
12.	Rencana Bisnis Tahunan (RBT) 2020 Annual Business Plan (RBT) of 2020	459/MNCGUI/DIR-SRT/XI/2019	26 November 2019

b. Pelaksanaan Kegiatan dan Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah secara aktif memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah (UUS) di PT MNC Guna Usaha Indonesia, antara lain melalui:

1. Mengadakan rapat rutin DPS
2. Memberikan masukan dan nasihat serta rekomendasi terkait dengan strategi funding unit usaha syariah.
3. Mereview draft ketentuan internal terkait dengan denda dan ganti rugi untuk pembiayaan syariah.
4. Mereview standar akad IMBT dan surat menyurat terakait dengan IMBT sebagai tindak lanjut dari rekomendasi audit OJK.
5. Memberikan persetujuan atas skema pembiayaan porsi dana haji.

5. PELAKSANAAN TUGAS KOMISARIS INDEPENDEN

Komisaris Independen akan melaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender dalam hal ditemukannya:

- pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan; dan/atau
- keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen diangkat sebagai Ketua Komite Audit dan Ketua Komite Tata Kelola. Melalui rapat Komite tersebut dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, Komisaris Independen melakukan pemantauan dan memberikan nasihat, serta rekomendasi kepada Direksi sebagai bahan perbaikan.

Komisaris Independen juga diangkat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko, yaitu sebagai pihak independen untuk membantu mengawasi pelaksanaan dan penerapan manajemen risiko di Perusahaan.

b. Implementation of Activities and Recommendations of Sharia Supervisory Board

The Sharia Supervisory Board has actively given advices and suggestions to the Board of Directors, supervising the sharia aspects of operational activities of Sharia Business Unit (UUS) in PT MNC Guna Usaha Indonesia, among others by:

1. Organizing DPS regular meetings
2. Giving inputs and advices and recommendations related to the funding strategy of sharia business unit.
3. Reviewing the draft of internal conditions related to fines and compensation for sharia financing.
4. Reviewing the standards of IMBT agreement and correspondences related to IMBT as the follow-up of OJK's audit recommendation.
5. Giving approval on the financing scheme of haji fund financing portion.

5. IMPLEMENTATION OF INDEPENDENT COMMISSIONER'S JOBS

The Independent Commissioner will report to OJK at the latest 10 (ten) calendar days in case of finding:

- any breach of legislation in financing; and/or
- any situation or predicted situation that may endanger the Company's business continuation.

In performing his jobs, the Independent Commissioner is appointed as Chairman of Audit Committee and Chairman of Governance Committee. By the Committees' meetings and the meeting of Board of Commissioners and Board of Directors, the Independent Commissioner conduct monitoring and gives advices and recommendations to the Board of Directors as the materials for improvement.

The Independent Commissioner is also appointed as member of the Risk Monitoring Committee, i.e. as an independent party to assist supervising the implementation and application of risk management in the Company.

6. PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

- a. Rapat Direksi  
Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan rapat minimal 1 (satu) kali sebulan dengan total rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dalam setahun, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No No	Nama Name	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees		% Kehadiran % Attendance
				Fisik Physic	Means of Electronic Media Sarana Media Elektronik	
1.	Paulus Cholot Janala	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 – 31 <sup>st</sup> December 2019	12	12	0	100%
2.	Yusnandi Liauw	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 – 31 <sup>st</sup> December 2019	12	12	0	100%
3.	Henri Gunawan	22 November 2019 – 31 Desember 2019 22 <sup>nd</sup> November 2019 – 31 <sup>st</sup> December 2019	2	2	0	100%
4.	Meita Liliarsari *)	1 Januari 2019 – 31 Agustus 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 – 31 <sup>st</sup> August 2019	8	6	0	75%

\*) berhenti menjabat per 31 Agustus 2019

\*) no more took office as of 31st August 2019

6. IMPLEMENTATION OF MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS, AND SHARIA SUPERVISORY BOARD

- a. Board of Directors' Meetings  
In 2019, the Board of Directors organized the meeting at least 1x (once) a month with total 12 (twelve) meetings a year, with the following recapitulation:

Adapun hal yang dibahas dalam Rapat Direksi selama tahun 2019 adalah terkait permasalahan dan kegiatan operasional Perusahaan, dengan ringkasan risalah rapat sebagai berikut:

The matters discussed in the Board of Directors' Meetings in 2019 are related to the Company's operational problems and activities, with the summary of meeting minutes as follows:

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
Januari January	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prioritas peningkatan pencairan untuk team sales area I dan II dan dipastikan kembali bahwa kesiapan aplikasi terutama terkait dokumen legalitas debitur harus on file</li> <li>• Fokus untuk melakukan perbaikan data aset operating lease</li> <li>• Tindak lanjut terkait permohonan kerjasama dengan Dukcapil perihal pemanfaatan Akses Data Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu APPI untuk menanyakan perihal program kerjasama Dukcapil kolektif bersama-sama dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Selain itu akan dilakukan koordinasi dengan pihak holding yang saat ini juga dalam proses kerjasama Dukcapil.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Priority to the increase of disbursement for the sales team of area I and II and ensuring again that the readiness of application especially related to debtors' legal documents should be on file.</li> <li>• Focus on making improvement of operating lease assets data.</li> <li>• Follow-up related to the request for cooperation with Dukcapil (Population and Civil Registration) on utilization of Access to Population ID Number (NIK), Population Data and APPI (Indonesian Financing Companies Association) to inquire regarding the cooperation program of Dukcapil collectively with other financing companies. Besides, coordination with the holding party currently also in the cooperation process with Dukcapil will be conducted.</li> </ul>
Februari February	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Area Manager akan melakukan pembersihan pipeline, untuk kedepan yang akan dikategorikan sebagai pipeline adalah yang sudah ada credit resumenya bukan yang baru prospek.</li> <li>• Pertemuan dengan Bapak Jaenal dan meminta bantuan ke DPS agar dapat bantu funding ke bank syariah. Langkah pertama akan coba dilakukan pendekatan ke Bank Syariah Mandiri.</li> <li>• Perjanjian sewa untuk Bandung sedang dalam proses review oleh pihak MSEK, untuk sewa Balikpapan dan Makassar sedang dalam proses review dari Landlord.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The Area Manager will conduct pipeline cleaning, for the future those categorized as pipeline will be the ones already having the credit resume instead of the prospective ones.</li> <li>• A meeting with Mr. Jaenal, asking for DPS support in funding the sharia bank. The first measure is trying to make an approach to Mandiri Sharia Bank.</li> <li>• The lease agreement for Bandung is in the process of review by MSEK, the lease for Balikpapan and Makassar is in the process of review of the Landlord.</li> </ul>

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sosialisasi paket Kobelco ke cabang-cabang untuk bulan Maret 2019 dan fokus untuk paket Kobelco, Kasana dan Sanny akan dibantu oleh Tim Busdev</li> <li>• Update terkait dengan hasil pemeriksaan OJK terhadap Unit Usaha Syariah (UUS).</li> <li>• Proses pembuatan SOP dan review user terkait SOP Finance, perjalanan dinas, klaim asuransi, piagam komite audit, penundaan giro asuransi, ltracking sampai dengan proses sirkuler penandatanganan.</li> <li>• Perjanjian sewa Ruko Bandung dan Palembang sedang dalam proses tandatangan Direksi. Untuk Balikpapan dan Makassar masih menunggu proses tanda tangan dari Landlord.</li> </ul>
Maret March	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Socialization of Kobelco package to branches for March 2019 and the focus for Kobelco, Kasana and Sanny packages will be assisted by Business Development Team.</li> <li>• Update related to the results of OJK's audit on Sharia Business Unit (UUS).</li> <li>• Process of SOP making and user review related to Finance SOP, official travel, insurance claim, audit committee charter, insurance current account postponement, ltracking to the process of signing circular.</li> <li>• Lease agreements of Ruko (house-shop) in Bandung and Palembang are in the process of signing by the Board of Directors. For Balikpapan and Makassar still waiting for the process of the Landlord's signing.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Supplier Kasana sedang dalam proses review kerjasama dan hasil pertemuan dengan Kasana, mereka meminta agar dapat dibuatkan paket pembiayaan, namun dari pihak Kasana belum menginformasikan mengenai besaran subsidi yang akan diberikan.</li> <li>• Akan dilakukan peningkatan terkait proses administrasi terutama yang terkait dengan giro, memo operasional dan sistem.</li> <li>• Follow up terkait SOP yang telah diterbitkan yaitu SOP perjalanan dinas, serta yang sedang sirkuler OPL, AR dan AYDA. Mengingat SOP ini merupakan temuan audit, agar unit kerja terkait yang melakukan review atas SOP ini agar dapat dilakukan segera, dan HRD akan melakukan sosialisasi terkait SOP perjalanan dinas yang baru.</li> <li>• Akan dilakukan audit oleh MNC Bank, kunjungan ke end user yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan April 2019 kemudian diundur ke bulan Juni 2019.</li> </ul>
April April	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kasana supplier is in the process of review on cooperation and results of meeting with Kasana. They asked that the financing package is made, however Kasana has not informed the amount of subsidy to be given.</li> <li>• Improvement will be conducted related to the process of administration, especially current account, operational memo and system.</li> <li>• Follow up related to SOP issued, namely official travel SOP, and those being circular are OPL, AR and AYDA. Since this is an audit finding, the related work unit should conduct the review on this SOP immediately, and the HRD will make socialization related to the new official travel SOP.</li> <li>• Audit will be conducted by MNC Bank. The visit to the end user formerly scheduled in April 2019 was then postponed to June 2019.</li> </ul>

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
Mei May	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terkait nasabah yang sudah signing kontrak FL dan akan diubah menjadi IF, maka untuk seluruh biaya fidusianya akan ditanggung oleh MNCL.</li> <li>Agar MNC GUI dapat terus berkompetisi/bersaing dan harus dapat melakukan antisipasi terhadap hal yang terjadi di luar/lapangan. Performa individu mauoun departemen harus ditingkatkan/improve, kalau tidak ditingkatkan maka bisa stagnan. Kalau tidak ada improve dari MNC GUI, maka company tidak growth/stagnan dan impact nya adalah dilakukan efisiensi (penutupan cabang dan pengurangan karyawan).</li> <li>Telah dilakukan sosialisasi ke cabang mengenai pengkinian data nasabah, pedoman penerbitan iklan dari OJK, POJK 10 tentang UUS termasuk hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing bagian.</li> <li>SOP yang sudah selesai antara lain pemantauan AR, AYDA, starter pack, ketentuan first payment, biaya perawatan OPL, piagam komite audit serta piagam komite nominasi dan remunerasi.</li> <li>For customers who have signed the FL contract that will be changed to IF, the whole fiduciary cost will be born by MNCL.</li> <li>MNC GUI should be able to continue competing and to anticipate matters taking place outside/at sites. The performance of individuals and departments should be improved, if not they may become stagnant. If no improvement is made by MNC GUI, the company will not grow/be stagnant and the impact will be to make efficiency (closing of branches and reduction of employees).</li> <li>Socialization has been conducted to branches on customers' data update, advertisement publishing guidelines from OJK, POJK 10 on UUS including matters requiring follow-up by each division.</li> <li>The completed SOP are among others for monitoring of ARTICLE, AYDA, starter pack, conditions of first payment, OPL maintenance cost, audit committee charter and nomination and remuneration committee charter.</li> </ul>
Juni June	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agar menjadi perhatian khusus terkait pencapaian target MNCL, karena Performance di bulan Mei 2019 buruk, penjualan core business (FL) jauh dari harapan, jika tidak ada factoring maka angka akan tidak tercapai.</li> <li>Paket Kobelco sudah habis pada bulan Mei'19 dan saat ini sedang dalam proses perpanjangan. Secara lisan dari Kobelco sudah setuju untuk memperpanjang paket tersebut.</li> <li>Untuk menjaga hubungan baik maka frekuensi kunjungan BM/AO ke supplier atau rekanan agar lebih ditingkatkan.</li> <li>Special attention should be given to the achievement of MNCL target, due to bad performance in May 2019. The core business (FL) sale was far from expectations, if no factoring is available, the number will not be achieved.</li> <li>Kobelco package has ended in May'19 and currently in process of renewal. Kobelco has verbally agreed to renew the package.</li> <li>To maintain good relation, the frequency of BM/AO visits to suppliers or vendors should be increased.</li> </ul>

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
Juli July	<ul style="list-style-type: none"> <li>Berdasarkan laporan terjadi peningkatan AR di beberapa KSKC. Reminder tugas Kepala KSKC bukan hanya fokus mengejar sales saja namun juga untuk menangani AR.</li> <li>Saat ini trend jualan menurun sedangkan trend aging meningkat. Mohon menjadi perhatian agar jangan sampai minus dimana nilai penjualan lebih kecil daripada rundown.</li> <li>Terkait temuan OJK audit syariah agar diskusi dengan accounting dan IT untuk masalah pencatatan.</li> <li>Based on the report, AR increased in several KSKCs. As reminder, the job of KSKC Head does not only focus on chasing the sales, but also on dealing with AR.</li> <li>The current trend of sales is decreasing, while the trend of aging is increasing. Please pay attention so as not to become minus, in which the sales value is lower than the rundown.</li> <li>Regarding OJK's sharia audit findings, please discuss with the accounting and IT for recording issues.</li> </ul>
Agustus August	<ul style="list-style-type: none"> <li>AR agar dapat segera memenuhi MPP mengingat kondisi AR yang cenderung meningkat.</li> <li>Terkait funding, Direksi juga akan secara proaktif melakukan pendekatan ke perbankan. Untuk bank existing akan melakukan cek/audit kelengkapan dokumen dan jaminan karena MNCL sedang proses penambahan plafon.</li> <li>Tim funding yang ada saat ini belum terbiasa untuk menangani offshore loan, untuk sementara akan meminta bantuan ke pihak konsultan/agen. Akan diatur di dalam mandate letternya agar pihak konsultan/agen juga memberikan jasa tersebut</li> <li>AR should be able to immediately meet the MPP in view of AR condition that tends to increase.</li> <li>Regarding funding, the Board of Directors will also proactively make an approach to banks. The existing banks will conduct checking/audit on the completeness of documents and securities since MNCL is in the process of increasing the ceiling.</li> <li>The currently existing funding team is still not used to dealing with offshore loans, and for the time being will ask for the consultant's/agent's assistance. It will be regulated in the mandate letter that the consultant/agent also provides such service.</li> </ul>
September September	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sesuai arahan holding maka untuk budget MNCL selambat-lambatnya disubmit pada akhir Sep'19. Oleh karena itu untuk deadline internal per masing-masing bagian agar dapat dikirimkan ke accounting selambatnya Kamis, 19 Sep'19. Budget untuk 2020 dibuat per bulan sedangkan untuk tahun 2021-2024 dibuat per tahun.</li> <li>Agar pada setiap meeting Direksi dapat ditampilkan performance masing-masing KSKC terhadap target, efektifitas dari program serta penetrasi ke masing-masing supplier.</li> <li>Reminder untuk follow up hasil audit OJK antara lain Akad IMBT, perubahan ketua UUS, penguncian parameter di sistem, SOP untuk COP dan factoring.</li> <li>According to the holding's instruction, MNCL budget is submitted not later than end of Sep'19. Therefore for the deadline of each internal division, it should be delivered to the accounting at the latest on Thursday, 19th Sep'19. The budget for 2020 is prepared monthly, while for 2021-2024 is prepared annually.</li> <li>In each Board of Directors' meeting should be presented the performance of each KSKC on the target, effectiveness of the program and penetration to each supplier.</li> <li>It is reminded to follow up the audit results of OJK, namely IMBT Agreement, change of UUS chairman, locking of parameter in the system, SOP for COP and factoring.</li> </ul>

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
Oktober October	<ul style="list-style-type: none"> <li>DPS akan mengikuti pembahasan fatwa DSN di Bogor dan hal ini dapat dianggap sebagai refreshment point bagi DPS.</li> <li>Sany mau mendorong penjualan mini excavator karena saat ini sedang booming. Target penjualan sampai akhir tahun 175 unit. MNCL bisa support pembiayaan ini dengan promo paket beli unit tanpa duit.</li> <li>Saat ini sedang melakukan penyusunan rencana audit tahun 2020, sosialisasi anti fraud awareness yang akan dilakukan sebulan sekali serta melakukan monitoring atas open audit recommendation.</li> <li>Untuk budget paralel dipersiapkan executive summary, garis besar asumsi operasional, operasional highlight, opex target costing serta cara untuk mencapai target.</li> </ul> <p>DPS will participate in the discussion of DSN fatwa in Bogor and this may be considered as refreshment point for DPS.</p> <p>Sany will push the sales of mini excavator as it is booming today. The sales target until end of the year is 175 units. MNCL can support this financing by promotion of unit purchase package without money.</p> <p>The audit plan of 2020 is currently prepared, socialization of anti fraud awareness will be conducted once a month and monitoring on open audit recommendation is conducted.</p> <p>For the parallel budget are prepared the executive summary, outline of operational assumption, operational highlight, opex target costing and the method for achieving the target.</p>
November November	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agar dapat dijalankan dengan baik terkait prosedur rilis jaminan untuk nasabah yang sudah lunas karena ini merupakan salah satu bentuk service kita kepada nasabah.</li> <li>Update terkait funding terutama untuk offshore diperlukan ESG report/sustainability report. Ke depan OJK juga mewajibkan perusahaan pembiayaan untuk memenuhi report tersebut.</li> <li>Update terkait ulah MNCL, hari ini dikirimkan seluruh surat sponsorship. Akan dilakukan finalisasi penunjukan hotel Pullman, pengaturan test food serta melihat kondisi seluruh ballroom yang disewa.</li> <li>Setelah dilakukan presentasi ke bank-bank syariah, maka akan dilakukan meeting internal untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dana haji.</li> </ul> <p>The procedure of guarantee release for customers who have paid off should be able to be conducted properly, because it is a kind of our service to customers.</p> <p>Update related to funding, especially for offshore, requires ESG report/sustainability report. In the future, OJK will also require finance composition to provide the report.</p> <p>Update related to MNCL anniversary, today all sponsorship letters are delivered. Will be finalized the appointment of Pullman hotel, arrangement of food test and survey on the condition of the entire ballroom rented.</p> <p>After presentation to sharia banks has been made, internal meeting will be organized to discuss haji funds further.</p>

Bulan Month	Risalah Rapat Meeting Minutes
Desember December	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk pembiayaan dana haji akan menggunakan akad kafalah bil ujah dan qardh.</li> <li>Presentasi mengenai perubahan kewenangan untuk waive denda dan pinalti, diskon/waive pelunasan dipercepat, hapus buku dan hapus tagih.</li> <li>Reminder terkait perubahan struktur agar dipersiapkan secara detail mengingat perubahan cukup signifikan sehingga awal tahun dapat segera dijalankan.</li> </ul> <p>Masing-masing bagian harus mempersiapkan presentasi action plan untuk tahun 2020.</p> <p>The financing of haji funds will apply kafalah bil ujah and qardh agreements.</p> <p>Presentation on the change of authority for waiving fines and penalties, discounts/waiving accelerated settlement, write-off and charge-off.</p> <p>It is reminded that the change of structure should be prepared in details in view of the quite significant change so that in the beginning of the year it could be directly operated.</p> <p>Each division should prepare the action plan presentation for 2020.</p>

a. Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris melaksanakan rapat sebanyak 4 (empat) kali, dengan rekapitulasi sebagai berikut:

a. Board of Commissioners' Meeting

In 2019, the Board of Commissioners organized 4 (four) meetings, with the following recapitulation:

No No	Nama Name	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees		% Kehadiran % Attendance
				Fisik Physic	Sarana Media Elektronik Means of Electronic Media	
1.	Wito Mailoa	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 - 31 <sup>st</sup> December 2019	4	4	0	100%
2.	Erdie Suriaherdadi Manan	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 - 31 <sup>st</sup> December 2019	4	4	0	100%

Adapun hal yang dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2019, antara lain:

- Pembahasan terkait pencadangan dan bisnis sewa operasi (operating lease) untuk mengantisipasi pemberlakuan PSAK 71, PSAK 72 dan PSAK 73.
- Untuk menunjang program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, dibahas mengenai rencana kerja sama dengan Dukcapil untuk memanfaatkan akses data nomor induk kependudukan (NIK).

The matters discussed in the Board of Commissioners' Meetings in 2019 are among others:

- Discussion related to backup and business of operating lease to anticipate the enactment of PSAK (Statement of Accounting Standard) 71, PSAK 72 and PSAK 73.
- To support the program of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding, discussing the plan on cooperation with Dukcapil to utilize the access to data of population ID number (NIK).

- Pembahasan mengenai penatalaksanaan giro nasabah.
- Pembahasan terkait pertumbuhan SDM seiring dengan perkembangan bisnis Perusahaan.
- Memaksimalkan penggunaan video conference untuk keperluan training & reporting.
- Monitor pelaksanaan pelatihan DPS.
- Pembahasan mengenai mekanisme untuk monitoring jaminan dengan sistem.
- Pembahasan terkait mitigasi risiko pembiayaan.
- Pembahasan mengenai pengelolaan dan monitor daftar nasabah write off dan AYDA.
- Rekomendasi mengenai Audit Plan tahun 2020 agar disusun secara terukur sehingga target audit dapat tercapai dengan maksimal.
- Pembahasan terkait pemenuhan biaya pelatihan sesuai dengan ketentuan minimal yang dipersyaratkan oleh OJK.
- Pembahasan mengenai mekanisme pengiriman surat peringatan kepada debitur.

- Discussion on the management of customers' current accounts.
- Discussion related to HR growth parallel to the Company's business development.
- Maximizing the use of video conference for requirement of training & reporting.
- Monitoring the implementation of DPS training.
- Discussion on mechanism for monitoring guarantees by system.
- Discussion related to mitigation of financing risks.
- Discussion on the management and monitoring of list of write-off customers and AYDA.
- Recommendation on the Audit Plan of 2020 that should be prepared in a measurable manner to enable maximum achievement of the audit target.
- Discussion related to fulfillment of the training cost according to the minimal conditions required by OJK.
- Discussion on the mechanism of warning letter delivery to debtors.

- c. Rapat Dewan Pengawas Syariah  
Selama tahun 2019, Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah melaksanakan rapat sebanyak 6 (enam) kali dengan rekapitulasi sebagai berikut:

No No	Nama Name	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees		% Kehadiran % Attendance
				Fisik Physic	Means of Electronic Media Sarana Media Elektronik	
1.	M. Nadratuzzaman Hosen	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1st January 2019 - 31st December 2019	6	6	0	100%
2.	Jaenal Effendi	1 Januari 2019 – 31 Desember 2019 1st January 2019 - 31st December 2019	6	6	0	100%

Adapun hal yang dibahas dalam Rapat Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2019, antara lain:

- Pembahasan terkait dengan tindak lanjut rekomendasi dari hasil pemeriksaan langsung OJK terhadap UUS, antara lain terkait review akad IMBT.
- Pembahasan terkait strategi funding UUS.
- Pembahasan marketing strategy untuk UUS.

The matters discussed in the Sharia Supervisory Board's Meetings in 2019 are among others:

- Discussion related to the follow-up of recommendation from the results of OJK's direct audit on UUS, among others related to review of IMBT agreement.
- Discussion related to UUS funding strategy.
- Discussion on marketing strategy for UUS.

- Pembahasan mengenai prinsip syariah dalam penerapan denda dan penalti (ta'jir dan ta'widh).
- Follow up terkait temuan audit OJK terhadap UUS, untuk dapat di-update secara berkala ke DPS untuk setiap pemenuhan yang telah dilakukan.
- Pembahasan pengembangan unit usaha syariah.
- Pembahasan mengenai ketentuan spin off UUS.
- Pembahasan mengenai pemberian pelatihan syariah kepada karyawan.

## 7. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT

- a. Struktur, Keanggotaan, dan Keahlian Komite Audit  
Susunan keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Profil Profile
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Independen As the profile of Independent Commissioner
2.	Wito Mailoa	Anggota Member	Sesuai profil Komisaris Utama As the profile of President Commissioner  Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1971. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1995. Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau mulai meniti karir sebagai Analis Data di PT HSBC Securities Indonesia d/h PT Wardley James Capel Indonesia pada 1995. Beliau bergabung dengan MNC Group pada 1996 sebagai Analis Riset Perusahaan hingga 1997. Kemudian sebagai Investment Banking Manager hingga 2011 dan melanjutkan karirnya menjadi Senior Vice President Treasury dan Corporate Finance MNC Group hingga 2014. Sejak 2014 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Direktur PT MNC Investama Tbk. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak tahun 2018. Sejak tanggal 24 September 2018, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT MNC Guna Usaha Indonesia, beliau diangkat sebagai anggota Komite Audit PT MNC Guna Usaha Indonesia.
3.	Natalia Purnama	Anggota Member	An Indonesian Citizen, born in 1971. She got the degree of Bachelor in Accounting Economics of Trisakti University, Jakarta in 1995. Before joining MNC Group, she started pursuing her career as a Data Analyst in PT HSBC Securities Indonesia, formerly PT Wardley James Capel Indonesia in 1995. She joined MNC Group in 1996 as Company Research Analyst until 1997, later as Investment Banking Manager until 2011 and continued her career as Senior Vice President of Treasury and Corporate Finance of MNC Group until 2014. From 2014 until today, she holds the position as Director of PT MNC Investama Tbk., besides she also holds the position as Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk since 2018. Since 24th September 2018, based on the Board of Commissioners' decision of PT MNC Guna Usaha Indonesia, she has been appointed as member of the Audit Committee of PT MNC Guna Usaha Indonesia.

## 7. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF AUDIT COMMITTEE'S JOBS

- a. Structure, Membership and Expertise of Audit Committee  
The composition of members of Audit Committee as of 31st December 2019 is as follows:

No	Nama	Jabatan	Profil
No	Name	Position	Profile
4.	Natalia Purnama	Anggota Member	<p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1966. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi - Jurusan Manajemen Perbankan dari STIE Perbanas, Jakarta pada 1989, dan Magister Marketing Management dari Universitas Indonesia pada 1997.</p> <p>Beliau memulai karir sebagai di Citibank dengan posisi terakhir sebagai Telesales Management Head (1990-1997), kemudian berkarir di Standard Chartered Bank dengan posisi terakhir sebagai Head of Sales – SME Banking (1997-2008), lalu di ABN Amro / RBS Indonesia sebagai Head of SME (2008-2010), lalu di ANZ Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Head of SME (2010-2011), dan PT PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai General Manager (2011-2015). Bergabung dengan MNC Group melalui PT MNC Guna Usaha Indonesia sebagai Direktur Utama (2015-2018) dan menjadi Direktur Utama PT Bank MNC Internasional Tbk (2017-2018), kemudian diangkat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak tahun 2019.</p> <p>Sejak tanggal 26 Juni 2019, berdasarkan keputusan Dewan Komisaris PT MNC Guna Usaha Indonesia, beliau diangkat sebagai anggota Komite Audit PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p> <p>An Indonesian Citizen, born in 1966. Currently domiciled in Jakarta. He got the degree of Bachelor in Economics – Majoring in Banking Management of STIE Perbanas, Jakarta, in 1989, and Master of Marketing Management of Indonesia University in 1997.</p> <p>He started his career in Citibank with the last position as Telesales Management Head (1990-1997), then made his career in Standard Chartered Bank with the last position as Head of Sales – SME Banking (1997-2008), then in ABN Amro/RBS Indonesia as Head of SME (2008-2010), then in ANZ Indonesia with the last position as Head of SME (2010-2011), and in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as General Manager (2011-2015). Joined MNC Group by PT MNC Guna Usaha Indonesia as President Director (2015-2018) and became the President Director of PT Bank MNC International Tbk (2017-2018), later has been appointed as Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk since 2019.</p> <p>Since 26th June 2019, based on the Board of Commissioners' decision of PT MNC Guna Usaha Indonesia, he has been appointed as member of the Audit Committee of PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p>

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit  
Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain sebagai berikut:

1. Terkait Laporan atau Informasi Keuangan  
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan.

a. Jobs and Responsibilities of Audit Committee  
The jobs and responsibilities of the Audit Committee are among others:

1. Related to Financial Report or Information  
To conduct study on financial information to be issued by the Company to public and/or the authorities such as financial statement, projection, and other reports related to the Company's financial information.

2. Terkait Audit Internal  
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
3. Terkait Audit Eksternal
  - Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
  - Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya.
4. Terkait Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal  
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen/Direksi.
5. Terkait Peraturan Perundang-undangan  
Melakukan penelaahan atas ketaatan Perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
6. Terkait Pengaduan
  - Menelaah pengaduan yang diterima Perusahaan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan.
  - Memantau tindak lanjut pengaduan yang berkaitan dengan Perusahaan.
  - Syarat pengaduan:
    1. Disampaikan secara tertulis.
    2. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor.
    3. Laporan mengenai penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian internal, kecurangan (fraud) serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasi Perusahaan.

2. Related to Internal Audit  
To conduct study on the audit implementation by the internal auditor and to supervise the follow-up implementation by the management/ Board of Directors on the internal auditor's findings.
3. Related to External Audit
  - To give recommendation to the Board of Commissioners on the appointment of external auditor based on independency, scope of assignment, and service repayment.
  - To give independent opinion in case of difference of opinion between the management and external auditor regarding the service provided.
4. Related to Risk Management and Internal Control  
To conduct study on the activities of risk management and internal control performed by the management/Board of Directors.
5. Related to Legislation  
To conduct study on the Company's adherence to the laws and regulations related to the Company's activities.
6. Related to Complaints
  - To study complaints received by the Company related to the Company's accounting process and financial reporting.
  - To monitor the follow-up of complaints related to the Company.
  - Conditions of complaints:
    1. Submitted in writing.
    2. If the informants specify their identities, the Audit Committee shall keep the informants' identities confidential.
    3. The reports concern deviation of accounting standards, internal control weaknesses, fraud and management's improper behavior that may interfere with the Company's operation.

- Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukan audit investigasi dengan bekerjasama dengan manajemen, Audit Internal atau tenaga ahli dari luar Perusahaan yang independen.
- Komite Audit melaporkan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris dan memantau tindak lanjut hasil penelaahan bila diminta oleh Dewan Komisaris.

- In dealing with the complaints submitted by third parties, the Audit Committee may ask that audit investigation is conducted in cooperation with the management, Internal Audit or the Company's external independent expert.
- The Audit Committee reports the result of study to the Board of Commissioners and monitors the follow-up on the result of study if asked by the Board of Commissioners.

7. Tugas lainnya

- Melaksanakan tugas-tugas pengawasan lain sesuai dengan permintaan Dewan Komisaris.
- Melakukan review terhadap Piagam sesuai kebutuhan dan mengusulkan perubahannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Audit dan para anggotanya secara berkala.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

7. Other jobs

- To perform other supervisory jobs as requested by the Board of Commissioners.
- To conduct review on the Charter according to the requirement and propose for its alteration to the Board of Commissioners for approval.
- To evaluate the performance of Audit Committee and its members periodically.
- To maintain the confidentiality of the Company's documents, data and information.

c. Pelaksanaan Rapat Komite Audit

Selama tahun 2019, Komite Audit telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Komite Audit, dengan rincian kehadiran masing-masing anggota, sebagai berikut:

c. Implementation of Audit Committee's Meetings

In 2019, the Audit Committee organized 4 (four) Meetings of Audit Committee, with the detailed attendance of each member as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 to 31 <sup>st</sup> December 2019	4	4	100%
2.	Wito Mailoa	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 to 31 <sup>st</sup> December 2019	4	4	100%
3.	Natalia Purnama	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 to 31 <sup>st</sup> December 2019	4	4	100%
4.	Ageng Purwanto*)	Anggota Member	26 Juni 2019 s.d 31 Desember 2019 1 <sup>st</sup> January 2019 to 31 <sup>st</sup> December 2019	3	2	67%

\*) menjadi anggota Komite Audit per tanggal 26 Juni 2019

Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Kerja Internal Audit Tahun 2019. To conduct monitoring on the realization of Internal Audit Work Program of 2019.	Telah dilakukan pemantauan atas Rencana Kerja Internal Audit Tahun 2019 melalui rapat Komite Audit. Hal ini tertuang dalam risalah rapat Komite Audit. Monitoring was conducted on the Internal Audit Work Program of 2019 in the Audit Committee's meeting. This is articulated in the Audit Committee's meeting minutes.
2.	Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas temuan internal dan eksternal audit. To monitor the implementation of Board of Directors' follow-up on internal and external audit findings.	Telah dilakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut untuk perbaikan oleh Direksi atas temuan-temuan audit internal dan eksternal audit melalui rapat Komite Audit. Hal ini tertuang dalam risalah rapat Komite Audit. Monitoring was conducted on the implementation of follow-up for improvement by the Board of Directors on internal and external audit findings in the Audit Committee's meeting. This is articulated in the Audit Committee's meeting minutes.
3.	Melakukan evaluasi terhadap Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk terkait dengan Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun 2018. To evaluate the appointed Public Accountant Office related to the Implementation of Financial Statement Audit of 2018.	Telah dilakukan evaluasi atas KAP dan hasil evaluasi telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat No. 175/MNCGUI/CEO-SRT/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019. Evaluation was made on KAP and the result of evaluation was presented to the Financial Services Authority by Letter No.175/MNCGUI/CEO-SRT/VI/2019 dated 18th June 2019.
4.	Membuat rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik tahun buku 2019. To give recommendation on appointment of Public Accountant Office for 2019 fiscal year.	Telah dilakukan pembuatan rekomendasi penunjukan Kantor Akuntan Publik dan termasuk dalam dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam Laporan Penunjukan KAP melalui Surat No. 481/MNCGUI/DIR-SRT/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019. Recommendation on appointment of Public Accountant Office was made and included in the document presented to the Financial Services Authority in the Report on KAP Appointment by Letter No.481/MNCGUI/DIR-SRT/XII/2019 dated 13th December 2019.
5.	Mengevaluasi hasil pelaksanaan Internal Audit dan kecukupan rencana tindak lanjut. To evaluate the result of Internal Audit implementation and the adequacy of follow-up plan.	Telah dilakukan evaluasi secara berkala melalui rapat Komite Audit atas pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh Internal Audit. Periodical evaluation was conducted in the Audit Committee's meeting on the implementation of audit conducted by Internal Audit.



## 8. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE LAINNYA

1. Komite Pemantau Risiko  
Susunan Keanggotaan  
Susunan dan keanggotaan Komite Pemantau Risiko Per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
1.	Wito Mailoa	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Utama As the profile of President Commissioner
2.	Erdie S. Manan	Anggota Member	Sesuai profil Komisaris Independen As the profile of Independent Commissioner
3.	Natalia Purnama	Anggota Member	Sesuai profil anggota Komite Audit As the profile of member of Audit Committee
4.	Ageng Purwanto	Anggota Member	Sesuai profil anggota Komite Audit As the profile of member of Audit Committee

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, dengan memberikan pendapat, saran, maupun rekomendasi yang terkait dengan penerapan manajemen risiko yang efektif, seperti:

- Mengevaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Perusahaan dan kebijakan manajemen risiko terintegrasi.
- Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
- Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi mengelola aktivitas dan risiko secara efektif.

## 8. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF JOBS OF OTHER COMMITTEES

1. Risk Monitoring Committee  
Membership Composition  
The composition and membership of Risk Monitoring Committee as of 31st December 2019 were as follows:

2. Jobs and Responsibilities of Risk Monitoring Committee

The jobs and responsibilities of the Risk Monitoring Committee as regulated in the Risk Monitoring Committee Charter are to assist the Board of Commissioners in performing the job and responsibility of supervising and giving advice to the Board of Directors, by giving opinions, suggestions, and recommendations related to effective application of risk management, such as:

- To evaluate the conformity between the Company's risk management policy and the integrated risk management policy.
- To evaluate the risk management policy and strategy at least once a year or more frequently in case of any change to the factors affecting the business activities significantly.
- To evaluate the Board of Directors' justification and to give direction of improvement on the implementation of risk management policy periodically. The evaluation is conducted in order to ensure that the Board of Directors manages the activities and risks effectively.

- Melakukan penelaahan serta memberikan pendapat atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan terhadap laporan, usulan/pemintaan persetujuan atau hal-hal lain terkait dengan risiko yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan review secara komprehensif dan memantau tingkat kesehatan keuangan perusahaan sesuai dengan regulatory parameter serta merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan tingkat kesehatan keuangan.
- Menyetujui kebijakan manajemen risiko termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (risk appetite) dan toleransi risiko (risk tolerance).
- Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko.
- Setiap anggota Komite wajib menjaga kerahasiaan atas seluruh dokumen dan segala sesuai yang berhubungan dengan tugas Komite.
- Menyelenggarakan rapat secara rutin dan memastikan seluruh penyelenggaraan rapat terdokumentasi dengan tertib.

- To conduct study and to give opinion or recommendation to the Board of Commissioners, if required, on the reports, proposals/ requests for approval or other matters related to the risks presented by the Board of Directors to the Board of Commissioners.
- To conduct a comprehensive review and monitor the company's financial solvency level according to the regulatory parameter and to recommend the measures required for maintaining or increasing the financial solvency level.
- To approve the risk management policy including the risk management strategy and framework specified according to the risk level to be taken (risk appetite) and risk tolerance.
- To monitor the adequacy of process of identification, measuring, monitoring, control and information system of risk management.
- Each member of the Committee shall keep confidential all documents and anything related to the Committee's jobs.
- To organize meetings regularly and ensure all meetings organized are documented orderly.

3. Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Wito Mailoa	Ketua Chairman	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1st January 2019 to 31st December 2019	4	4	100%
2.	Erdie S. Manan	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1st January 2019 to 31st December 2019	4	4	100%
3.	Natalia Purnama	Anggota Member	12 Februari 2019 s.d 31 Desember 2019 12th February 2019 to 31st December 2019	4	4	100%
4.	Ageng Purwanto*)	Anggota Member	12 Februari 2019 s.d 31 Desember 2019 12th February 2019 to 31st December 2019	4	3	75%
5.	Mahjudin**)	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 12 Februari 2019 1st January 2019 to 12th February 2019	0	0	0

\*) menjadi anggota Komite Pemantau Risiko per tanggal 12 Februari 2019

\*\*\*) berhenti menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko per 12 Februari 2019

\*) became a member of the Risk Monitoring Committee as of 12th February 2019

\*\*\*) no more took office as a member of the Risk Monitoring Committee as of 12th February 2019

4. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan pemantauan atas pengelolaan risiko di Perusahaan To conduct monitoring on the risk management in the Company	Pemantauan telah dilakukan melalui pembahasan dalam rapat Komite Pemantau Risiko atas beberapa indikator utama dari seluruh jenis risiko yang dikelola, baik risiko secara individu maupun risiko secara terintegrasi konglomerasi keuangan. Atas pembahasan tersebut, Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi dan saran untuk perbaikan penerapan manajemen risiko. Monitoring was conducted by discussion in the Risk Monitoring Committee's meeting on several main indicators of all types of risks managed, either the risks individually or risks integrated by financial conglomeration. Regarding the discussion, the Risk Monitoring Committee gives recommendation and suggestion for improvement of risk management application.
2.	Pemantauan atas Risk Appetite & Risk Tolerance To monitor Risk Appetite & Risk Tolerance	Pemantauan telah dilakukan melalui pembahasan secara berkala melalui rapat Komite Pemantau Risiko. Monitoring was conducted by periodical discussion in the Risk Monitoring Committee's meeting.

b. Komite Tata Kelola

1. Susunan Keanggotaan

Susunan dan keanggotaan Komite Tata Kelola per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

b. Governance Committee

1. Composition of Membership

The composition and membership of Governance Committee as of 31st December 2019 were as follows:

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Utama As the profile of President Commissioner
2.	Ageng Purwanto	Anggota Member	Sesuai profil pada Anggota Komite Audit As the profile in Member of Audit Committee

Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1963. Beliau meraih gelar Diploma of Banking dari Emile Woolf & Associates, London, Inggris pada tahun 1985.

Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau meniti karir sebagai Head of HR Strategic Business Partner and Recruitment CIMB Niaga (2010-2013), Regional HR Citibank, N.A (2008-2010), HR Head Citibank, N.A (2005-2008), HR Generalist Citibank, N.A (2000-2005), HR Head PT. Unibank Tbk (1999-2000), Training Manager PT. Unibank Tbk (1997-1999), Head of Training and General Affairs PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1996-1997), Training Manager PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1990-1996) dan Training Officer Citibank, N.A (1987-1990).

Beliau bergabung dengan MNC Group pada tahun 2013 sebagai Direktur PT MNC Investama Tbk dan sejak April 2014 diangkat sebagai Wakil Direktur Utama dan Direktur Independen PT MNC Investama Tbk.

3. Susanty Tjandra Sanusi  
Anggota Member

Per September 2018, Beliau turut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola di PT MNC Guna Usaha Indonesia.

An Indonesian Citizen, born in 1963. She got the degree of Diploma of Banking of Emile Woolf & Associates, London, England in 1985.

Before joining MNC Group, she pursued her career as Head of HR Strategic Business Partner and Recruitment of CIMB Niaga (2010-2013), Regional HR of Citibank N.A (2008-2010), HR Head of Citibank N.A (2005-2008), HR Generalist of Citibank N.A (2000-2005), HR Head of PT. Unibank Tbk (1999-2000), Training Manager of PT. Unibank Tbk (1997-1999), Head of Training and General Affairs of PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1996-1997), Training Manager of PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (1990-1996) and Training Officer of Citibank N.A (1987-1990). She joined MNC Group in 2013 as Director of PT MNC Investama Tbk and appointed as Vice President Director and Independent Director of PT MNC Investama Tbk. since April 2014.

As of September 2018, she has also served as member of the Governance Committee in PT MNC Guna Usaha Indonesia.

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
4.	Nurul Fikri Maulana	Member Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, lahir di Pekanbaru pada tahun 1988. Saat ini berdomisili di Jakarta. Beliau meraih gelar Sarjana Teknik – Jurusan Teknik Industri dari Universitas Indonesia pada tahun 2010.</p> <p>Beliau memulai karir sebagai Officer Development Program dengan posisi terakhir sebagai System &amp; Procedure Analyst di PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2011 – 2015), kemudian di PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk dengan posisi terakhir sebagai Integrated Risk &amp; Policy Manager (2015 – 2017).</p> <p>Bergabung di MNC Group sejak Juli 2017 hingga saat ini menjabat sebagai Compliance &amp; Risk Management Department Head dan sejak September 2018 turut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola di PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p> <p>An Indonesian Citizen, born in Pekanbaru in 1988. Currently domiciled in Jakarta. She got the degree of Bachelor in Engineering – Majoring in Industrial Engineering of Indonesia University in 2010.</p> <p>She started her career as Officer Development Program with the last position as System &amp; Procedure Analyst in PT Bank Kesejahteraan Ekonomi (2011 – 2015), later in PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk with the last position as Integrated Risk &amp; Policy Manager (2015 – 2017).</p> <p>Joined MNC Group since July 2017 until today holding the position as Compliance &amp; Risk Management Department Head and September 2018 she has also served as member the Governance Committee in PT MNC Guna Usaha Indonesia.</p>

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
5.	Jessica Tanoesoedibjo	Member Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, lahir pada tahun 1994. Beliau meraih gelar Bachelor of Commerce dari University of New South Wales, Sydney, Australia pada tahun 2014. Kemudian beliau melanjutkan studinya di Macquarie University, Sydney, Australia, dan meraih gelar Master of International Trade &amp; Commerce Law di tahun 2015. Pada tahun 2017, beliau meraih gelar Master of Arts in Biblical &amp; Theological Studies dari Biola University, Los Angeles, Amerika Serikat. Saat ini beliau juga sedang melanjutkan studi untuk memperoleh Master of Arts in Education di Biola University, Los Angeles, Amerika Serikat.</p> <p>Saat ini beliau menjabat sebagai Direktur PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak tahun 2018, selain itu juga menjabat sebagai Wakil Koordinator MNC STIE &amp; STKIP, Jakarta.</p> <p>Beliau turut menjabat sebagai anggota Komite Tata Kelola di PT MNC Guna Usaha Indonesia sejak September 2018.</p> <p>An Indonesian Citizen, born in 1994. She got the degree of Bachelor of Commerce of University of New South Wales, Sydney, Australia in 2014. She then continued her study in Macquarie University, Sydney, Australia, and got the degree of Master of International Trade &amp; Commerce Law in 2015. In 2017, she got the degree of Master of Arts in Biblical &amp; Theological Studies of Biola University, Los Angeles, United States of America. Today she is also continuing her study to get her Master of Arts in Education in Biola University, Los Angeles, United States of America.</p> <p>She is currently serving as Director of PT MNC Kapital Indonesia Tbk since 2018 besides, she also officiates as Vice Coordinator of MNC STIE &amp; STKIP, Jakarta.</p> <p>She also serves as member of the Governance Committee in PT MNC Guna Usaha Indonesia since September 2018.</p>

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola

- Mengevaluasi dan merekomendasikan kerangka dan Kebijakan Tata Kelola.
- Memantau pelaksanaan tata kelola pada seluruh aktivitas bisnis.
- Menilai konsistensi penerapan tata kelola dalam Perusahaan dan kecukupan pengendalian internal di Perusahaan.
- Melaporkan kepada Dewan Komisaris berbagai ketidaksesuaian pelaksanaan tata kelola dan menyampaikan tindakan-tindakan yang dapat diambil dalam rangka perbaikan.
- Mengkaji laporan tata kelola yang dikeluarkan oleh Perusahaan

2. Jobs and Responsibilities of Governance Committee

- To evaluate and recommend the Governance framework and Policy.
- To monitor the implementation of governance in all business activities.
- To evaluate the consistency in governance application in the Company and the internal control adequacy in the Company.
- To report to the Board of Commissioners regarding various non-conformities in the governance implementation and inform the measures that may be taken for improvement.
- To study the report of governance issued by the Company to ensure the

untuk memastikan transparansi dan akurasi laporan tersebut serta merekomendasikan perbaikan kepada Direksi.

- Menyampaikan rekomendasi atas laporan dan Kebijakan Tata Kelola kepada Dewan Komisaris.
- Memantau pelaksanaan fungsi kepatuhan.
- Memantau dan memberikan saran dalam rangka pengelolaan dan pengendalian risiko tata kelola dan risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Perusahaan.
- Menyusun, mengkaji dan mengkinikan Piagam Komite Tata Kelola Perusahaan secara berkala.
- Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perusahaan.

report transparency and accuracy and recommend the improvement to the Board of Directors.

- To give recommendation on the report and Policy of Governance to the Board of Commissioners.
- To monitor the implementation of compliance function.
- To monitor and give suggestions in the management and control of governance risks and compliance risks encountered by the Company.
- To prepare, study and update the Company's Governance Committee Charter periodically.
- To keep confidential all Company's documents, data, and information.

### 3. Pelaksanaan Rapat Komite Tata Kelola

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Erdie S. Manan	Ketua Chairman	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1st January 2019 to 31st December 2019	4	4	100%
2.	Susanty Tjandra Sanusi	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1st January 2019 to 31st December 2019	4	3	75%
3.	Nurul Fikri Maulana	Anggota Member	12 Februari 2019 s.d 31 Desember 2019 12th February 2019 to 31st December 2019	4	4	100%
4.	Jessica Tanoesoedibjo	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 12 Februari 2019 1st January 2019 to 12th February 2019	4	4	100%
5.	Ageng Purwanto*)	Anggota Member	12 Februari 2019 s.d 31 Desember 2019 12th February 2019 to 31st December 2019	4	3	75%
6.	Mahjudin	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 12 Februari 2019 1st January 2019 to 12th February 2019	0	0	0

\*) menjadi anggota Komite Tata Kelola per tanggal 12 Februari 2019

\*\*) berhenti menjabat sebagai Anggota Komite Tata Kelola tanggal 12 Februari 2019

\*) became a member of the Governance Committee as of 12<sup>th</sup> February 2019

\*\*) no more took office as Member of Governance Committee on 12<sup>th</sup> February 2019

### Program Kerja Komite Tata Kelola dan Realisasinya

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan evaluasi terhadap penerapan prinsip tata kelola di Perusahaan To evaluate the application of governance principle in the Company	Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi, serta pemberian saran/rekomendasi untuk langkah-langkah perbaikan atas penerapan Tata Kelola di Perusahaan melalui Rapat Komite Tata Kelola. Monitoring and evaluation were conducted, and suggestions/recommendations were given for correction measures on the Governance application in the Company in the Governance Committee's meeting.
2.	Memantau kelengkapan governance documents seperti tata tertib Direksi, DPS, Dewan Komisaris, dan piagam Komite. To monitor the completeness of governance documents such as orders of the Board of Directors, DPS, Board of Commissioners, and the Committee charter	Telah dilakukan pemantauan dan saran perbaikan untuk kelengkapan governance documents tersebut. Monitoring and suggestions for improvement were conducted for the governance documents completeness.
3.	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kerja Organ Utama Perusahaan, yaitu Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). To monitor the implementation of performance of the Company's Main Organs, i.e. the Board of Directors, Board of Commissioners, and Sharia Supervisory Board (DPS)	Telah dilakukan secara berkala, antara lain dengan memantau pelaksanaan rapat, kecukupan komposisi masing-masing organ, kecukupan pelatihan dan pengembangan masing-masing organ, dan dengan memperhatikan rekomendasi dan keputusan yang dikeluarkan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS. Conducted periodically, among others by monitoring the meeting implementation, adequacy of each organ's composition, sufficiency of training and development of each organ, and observing the recommendations and decisions issued by the Board of Directors, Board of Commissioners and DPS.
4.	Melakukan pemantauan atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. To monitor the implementation of Compliance Function	Telah dilakukan dengan memastikan pemantauan rasio dan indikator tertentu telah comply atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Conducted by ensuring that the monitoring of certain ratios and indicators has complied with or conformed to the prevailing legislation.
5.	Melakukan pemantauan atas penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme To monitor the application of Anti Money Laundering & Prevention of Terrorism Funding	Telah dilakukan, pemantauan mencakup: • Kerangka kerja penerapan APU PPT. • Kecukupan kebijakan & prosedur APU PPT. • Pemastian pelatihan APU PPT telah dilaksanakan. Monitoring was conducted, covering: • Framework of APU PPT application. • Sufficiency of APU PPT policy & procedure. • Ensuring the APU PPT training has been conducted.

c. Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Susunan Keanggotaan

Susunan dan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No No	Nama Name	Posisi Position	Profil Profile
1.	Wito Mailoa	Ketua Chairman	Sesuai profil Komisaris Utama As the profile of President Commissioner
2.	Jessica Tanoesoedibjo	Anggota Member	Sesuai profil pada Anggota Komite Tata Kelola As the profile in Member of Governance Committee
3.	Susanty Tjandra Sanusi	Anggota Member	Sesuai profil pada Anggota Komite Tata Kelola As the profile in Member of Governance Committee

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Terkait dengan fungsi nominasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - a. Komposisi jabatan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
  - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
  - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
- Memberikan usulan calon anggota yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disetujui Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham.

c. Nomination and Remuneration Committee

1. Membership Composition

The composition and membership of Nomination and Remuneration Committee as of 31st December 2019 were as follows:

2. Jobs and Responsibilities of Nomination and Remuneration Committee

Related to nomination function:

- To give recommendations to the Board of Commissioners on:
  - a. Position composition of members of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors.
  - b. Policy and criteria required in the nomination process.
  - c. Policy of performance evaluation for members of Board of Directors and/or Board of Commissioners, including Sharia Supervisory Board to the Board of Commissioners.
- To assist the Board of Commissioners in making evaluation on the performance of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors based on the benchmark prepared as the material of evaluation.
- To give recommendation to the Board of Commissioners on the program of capacity development of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors.
- To propose prospective members who meet the conditions as members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors to the Board of Commissioners for approval of the Financial Services Authority and General Meeting of Shareholders.

Terkait dengan fungsi remunerasi:

- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran remunerasi tersebut harus memperhatikan:
  - a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan perusahaan sejenis dan skala usaha dari Perusahaan dalam industrinya (peer group).
  - b. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan.
  - c. Target kinerja Perusahaan atau kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.
  - d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel dengan mempertimbangkan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi secara keseluruhan bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai untuk disampaikan kepada Direksi.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi.

Related to remuneration process:

- To give recommendations to the Board of Commissioners on the structure, policy and remuneration amounts of Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors. The remuneration structure may be in the form of salary, honorarium, incentive and/or allowance by nature fixed and/or variable.
- The preparation of structure, policy and amounts of remuneration shall consider:
  - a. The remuneration applied in the industry according to the activities of similar types of companies and the business scale of the Company in its industry (peer group).
  - b. The jobs, responsibilities and authorities of members of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors are related to achievement of the Company's objectives and performance.
  - c. The target of Company's performance or performance of each member of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors.
  - d. The balance of allowances between those by nature fixed and by nature variable by considering the Company's long-term target and strategy.
- To give recommendation to the Board of Commissioners on the remuneration policy as a whole for Executive Officials and employees to be presented to the Board of Directors.
- To assist the Board of Commissioners in making performance assessment and compatibility of the remuneration received by each member of the Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board and Board of Directors..

3. Pelaksanaan Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No No	Nama Name	Jabatan Position	Periode Period	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Wito Mailoa	Ketua Chairman	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1st January 2019 to 31st December 2019	1	1	100%
2.	Jessica Tanoesoedibjo	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1st January 2019 to 31st December 2019	1	1	100%
3.	Susanty Tjandra Sanusi	Anggota Member	1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019 1st January 2019 to 31st December 2019	1	1	100%

3. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dan Realisasinya

No No	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
1.	Melakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi Perusahaan To evaluate the Company's Organizational Structure	Telah dilakukan evaluasi terhadap Struktur Organisasi Perusahaan sesuai dengan skala usaha, termasuk juga Man Power Planning (MPP) yang diperlukan. Hal ini tercantum dalam Risalah Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Evaluation was conducted on the Company's Organizational Structure according to the business scale, including the required Man Power Planning (MPP). This is specified in the Meeting Minutes of Nomination and Remuneration Committee.
2.	Memantau kebijakan remunerasi kepada karyawan To monitor the policy of remuneration to employees	Telah dilakukan pemantauan pada rapat Komite Nominasi dan Remunerasi. Monitoring was conducted in the Nomination and Remuneration Committee's meeting.

d. Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS)

1. Susunan Keanggotaan

Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah Komite yang dibentuk oleh Direksi untuk membantu dalam penyusunan dan pengembangan produk pembiayaan syariah.

Susunan dan keanggotaan Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS) melekat pada jabatan, dengan kondisi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

d. Product and Development Committee of Sharia Business Unit (UUS)

1. Membership Composition

Product and Development Committee of Sharia Business Unit (UUS) is a Committee established by the Board of Directors to assist the preparation and development of sharia financing products.

The composition and membership of Product and Development Committee of Sharia Business Unit (UUS) are inherent in the positions, by the condition as of 31st December 2019 as follows:

No No	Posisi Work Program	Posisi Realization
1.	Pimpinan UUS Head of UUS	Ketua Chairman
2.	Business Development Dept Head Business Development Dept Head	Sekretaris Secretary
3.	Direktur Utama President Director	
4.	Direktur (Operasi) Director (Operation)	
5.	Direktur (Keuangan) Director (Finance)	
6.	Direktur (Marketing) atau Kuasa Direksi bagian Marketing selama Direktur Marketing belum diangkat. Director (Marketing) or Board of Directors' Authorized Person for Marketing division as long as the Marketing Director is still not appointed	Anggota dengan Hak Suara Member with Voting Right
7.	GM Business Development GM Business Development	
8.	Operation Division Head Operation Division Head	
9.	Area Manager 1 Area Manager 1	
10.	Area Manager 2 Area Manager 2	
11.	Credit Analyst Dept Head Credit Analyst Dept Head	
12.	Corporate Secretary & Legal Dept Head Corporate Secretary & Legal Dept Head	Anggota tanpa Hak Suara Member without Voting Right
13.	Compliance & Risk Management Dept Head Compliance & Risk Management Dept Head	
14.	Accounting Dept Head Accounting Dept Head	
15.	Information Technology Dept Head Information Technology Dept Head	
16.	Branch Support Dept Head Branch Support Dept Head	
17.	Finance Dept Head Finance Dept Head	

2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS)
  - Melakukan kajian dan analisis pengembangan produk atau kegiatan usaha syariah baru yang akan dilakukan atau dipasarkan.
  - Melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas setiap produk atau kegiatan usaha syariah.
  - Memberikan rekomendasi, saran, dan masukan serta evaluasi atas aspek pemasaran dan pemenuhan prinsip syariah dan mitigasi risiko.
  - Merumuskan dan mengusulkan capaian kinerja bulanan dan tahunan untuk kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
3. Pelaksanaan Rapat Komite Produk dan Pengembangan Unit Usaha Syariah (UUS)

2. Jobs and Responsibilities of Product and Development Committee of Sharia Business Unit (UUS)
  - To conduct study and analysis on development of products or business activities of new sharia that will be conducted or marketed.
  - To evaluate and improve any sharia products or business activities.
  - To give recommendations, suggestions and inputs, and evaluation on the marketing aspects and fulfillment of sharia principles and risk mitigation.
  - To formulate and propose the monthly and annual performance achievement for business activities based on Sharia Principles.
3. Implementation of Product and Development Committee of Sharia Business Unit (UUS)'s Meetings

No No	Posisi Work Program	Posisi Realization	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
1.	Pimpinan UUS Head of UUS	Ketua Chairman	1	1	100%
2.	Business Development Dept Head Business Development Dept Head	Sekretaris Secretary	1	1	100%
3.	Direktur Utama President Director		1	1	100%
4.	Direktur (Operasi) Director (Operation)		1	1	100%
5.	Direktur (Keuangan) Director (Finance)	Anggota dengan Hak Suara Member with Voting Right	1	1	100%
6.	Direktur (Marketing) atau Kuasa Direksi bagian Marketing selama Direktur Marketing belum diangkat. Director (Marketing) or Board of Directors' Authorized Person for Marketing division as long as the Marketing Director is still not appointed		1	1	100%

No No	Posisi Work Program	Posisi Realization	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number of Attendees	% Kehadiran % Attendance
7.	GM Business Development GM Business Development		1	1	100%
8.	Operation Division Head Operation Division Head		1	1	100%
9.	Area Manager 1 Area Manager 1		1	1	100%
10.	Area Manager 2 Area Manager 2		1	1	100%
11.	Credit Analyst Dept Head Credit Analyst Dept Head	Anggota tanpa Hak Suara Member without Voting Right	1	1	100%
12.	Corporate Secretary & Legal Dept Head Corporate Secretary & Legal Dept Head		1	1	100%
13.	Compliance & Risk Management Dept Head Compliance & Risk Management Dept Head		1	1	100%
14.	Accounting Dept Head Accounting Dept Head		1	1	100%
15.	Information Technology Dept Head Information Technology Dept Head		1	1	100%
16.	Branch Support Dept Head Branch Support Dept Head		1	1	100%
17.	Finance Dept Head Finance Dept Head		1	1	100%

## 9. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

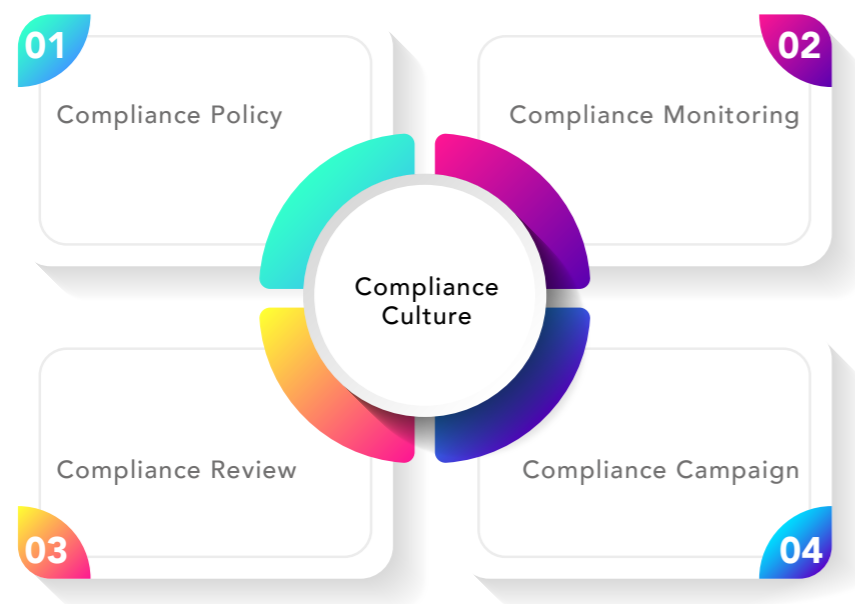
### a. Fungsi Kepatuhan

1. Satuan Kerja atau Pegawai yang Melaksanakan Fungsi Kepatuhan Fungsi kepatuhan di PT MNC Guna Usaha Indonesia berada dalam Departemen Compliance & Risk Management yang dibawah langsung oleh Direktur Utama.
2. Pelaksanaan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

## 9. APPLICATION OF COMPLIANCE FUNCTION, INTERNAL AUDITOR AND EXTERNAL AUDITOR

### a. Compliance Function

1. Work Unit or Employees Performing Compliance Function The compliance function in PT MNC Guna Usaha Indonesia is within the Compliance & Risk Management Department directly supervised by the President Director.
2. Implementation of Compliance to Legislation



3. Dengan menggunakan Kerangka Kerja Kepatuhan dimaksud, diharapkan pelaksanaan fungsi Kepatuhan dapat mengarahkan organisasi pada Budaya Kepatuhan (Compliance Culture) yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. By applying the Compliance Framework, it is expected that the implementation of Compliance function could direct the organization to the Compliance Culture that adheres to the prevailing legislation.

## COMPLIANCE POLICY

Dalam melaksanakan tugasnya, selain mengacu kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Fungsi Kepatuhan mengacu kepada ketentuan internal yang diatur dalam dokumen Kebijakan Kepatuhan.

Kebijakan Kepatuhan mengatur tugas dan tanggung jawab Fungsi Kepatuhan, antara lain:

- Membuat kebijakan kepatuhan (compliance policy) termasuk melakukan kajian secara berkala agar tujuan kepatuhan dapat tercapai.
- Membuat langkah-langkah atau program kepatuhan dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Perusahaan pada setiap jenjang organisasi.
- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## COMPLIANCE POLICY

In performing the jobs, besides referring to the prevailing legislation, the Compliance Function also refers to the internal conditions regulated in the Compliance Policy document.

The Compliance Policy regulates the jobs and responsibilities of the Compliance Function, namely:

- To make the compliance policy, including conducting periodical study in order to achieve the compliance objective.
- To take measures or compliance program in order to support the creation of compliance culture in all activities of the Company's business in each organizational level.
- To conduct identification, measuring, monitoring, and control on compliance risks by referring to OJK regulations and the prevailing legislation.

- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Perusahaan agar sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha Perusahaan telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan Fungsi Penghubung (liaison officer) dengan pihak regulator, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kepatuhan.
- Melaporkan Fungsi Kepatuhan dan status kepatuhan Perusahaan kepada Direksi melalui Direktur yang membawahi kepatuhan.
- Berfungsi sebagai tempat bertanya seluruh karyawan mengenai hal-hal yang terkait dengan peraturan dan perundangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, Fungsi Kepatuhan dapat meminta bantuan para ahli dari dalam maupun dari luar Perusahaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan.
- Memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan langsung ke unit bisnis maupun unit pendukung (compliance testing). Dalam melakukan pemeriksaan, wewenang yang diberikan meliputi akses untuk memeriksa semua bukti transaksi, catatan maupun dokumen.
- Fungsi Kepatuhan bertanggung jawab atas program pelatihan atau sosialisasi mengenai peraturan dan program kepatuhan lainnya.
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

- To assess and evaluate the effectiveness, sufficiency, and suitability of the policy, conditions, system and procedure possessed by the Company with the prevailing legislation.
- To conduct review and/or recommend updating and improvement of the policy, conditions, system or procedure possessed by the Company in order to conform to OJK conditions and the prevailing legislation.
- To make efforts to ensure that the Company's policy, conditions, system, and procedure, and business activities have conformed to OJK conditions and the prevailing legislation.
- To conduct Relational Function (liaison officer) with the regulator, particularly related to the compliance performance.
- To report the Compliance Function and the Company's compliance status to the Board of Directors through the Director who supervises compliance.
- To function as the place to ask for all employees on matters related to legislation. In the implementation of this function, the Compliance Function may ask for assistance of experts internally or externally of the Company according to the questions asked.
- Having authority to directly examine the business unit or supporting units (compliance testing). In conducting examination, the authority granted includes the access to examining all proofs of transactions, notes or documents.
- The Compliance Function is responsible for the training or socialization program on regulation and other compliance programs.
- To perform other jobs related to Compliance Function.



## COMPLIANCE

Untuk memastikan kepatuhan dengan peraturan dan perundang-undangan, Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan secara berkala, antara lain:

## COMPLIANCE

To ensure compliance with the legislation, the Compliance Function conducts periodical monitoring, among others:

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification
Pemantauan Pelaporan Monitoring of Reporting	<p>Fungsi kepatuhan melakukan pemantauan atas kewajiban pelaporan terutama pelaporan kepada pihak eksternal The Compliance Function conducts monitoring on the reporting duty, especially reporting to external parties.</p>
Pemantauan Indikator Kepatuhan Monitoring of Compliance Indicator	<p>1. Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan setiap bulan atas indikator kepatuhan. 2. Yang dimaksud dengan indikator kepatuhan adalah indikator yang terdiri dari rasio keuangan dan batasan lainnya yang ditetapkan oleh regulator, khususnya OJK, mencakup antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permodalan.</li> <li>• Non Performing Financing (NPF).</li> <li>• Financing to Asset Ratio.Ekuitas.</li> <li>• Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).</li> <li>• Gearing Ratio.</li> <li>• Anjak Piutang dengan Jaminan.</li> <li>• Anjak Piutang Tanpa Jaminan.</li> <li>• Tingkat Kesehatan Keuangan.</li> <li>• Jumlah Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi.</li> <li>• Rasio Ekuitas terhadap Modal Disetor.</li> <li>• Penyertaan Langsung.Insentif kepada Pihak Ketiga.</li> <li>• Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor.</li> <li>• Anjak Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan Lainnya.</li> <li>• Fasilitas Modal Usaha dan Fasilitas Dana</li> </ul> <p>3. Hasil pemantauan indikator kepatuhan disampaikan kepada Manajemen.</p> <p>1. The Compliance Function conduct monthly monitoring on the compliance indicators. 2. Compliance indicators are indicators consisting of financial ratio and other limitations specified by the regulator, especially OJK, covering among others:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capitalization</li> <li>• Non Performing Financing (NPF)</li> <li>• Financing to Asset Ratio</li> <li>• Equity</li> <li>• Maximum Limit for Providing Financing (BMPP)</li> <li>• Gearing Ratio</li> <li>• Factoring with Recourse</li> <li>• Factoring without Recourse</li> <li>• Financial Solvency Level</li> <li>• Total Financing of Working Capital and Investment</li> <li>• Ratio of Equity to Paid-up Capital</li> <li>• Direct Investment</li> <li>• Incentive to Third Party</li> <li>• Down Payment for Motor Vehicle Financing</li> <li>• Factoring with Other Financing Company</li> <li>• Startup Capital Facility and Fund Facility</li> </ul> <p>3. The results of monitoring of compliance indicators are presented to the Management.</p>

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification
Pemantauan Regulasi Baru/ Perubahan Regulasi Eksternal Monitoring of New Regulations/Change of External Regulations	<p>Fungsi kepatuhan memantau perubahan regulasi atau penerbitan regulasi eksternal yang baru untuk selanjutnya dilakukan review dampak terhadap operasional dan ketentuan internal Perusahaan. The Compliance Function monitors changes of regulations or issuance of new external regulations, further to conduct review on the impacts on the Company's operation and internal conditions.</p>
Pemantauan Larangan Regulator Monitoring of Regulator's Prohibitions	<p>Pemantauan terhadap kepatuhan terhadap larangan yang ditetapkan oleh regulator, beberapa diantaranya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Larangan melakukan transaksi Anjak Piutang dengan Pemberian Jaminan dari Penjual Piutang dengan Perusahaan Pembiayaan lainnya sebagai Debitur.</li> <li>2. Larangan menjaminkan nilai piutang pembiayaan atas 1 (satu) Debitur kepada lebih dari 1 (satu) pihak yang memberikan pinjaman kepada Perusahaan Pembiayaan.</li> <li>3. Larangan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat.</li> <li>4. Larangan memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain.</li> <li>5. Larangan memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan menggunakan jaminan berdasarkan hukum gadai.</li> <li>6. Larangan menerbitkan surat sanggup bayar (promissory note), kecuali sebagai jaminan atas utang kepada bank yang menjadi krediturnya.</li> <li>7. Larangan melakukan tindakan yang menyebabkan atau memaksa lembaga keuangan lainnya yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan menghindari/melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> <p>Monitoring on compliance to prohibitions stipulated by the regulator, covering among others:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prohibition to make Factoring transactions by Providing Guarantee from Sellers of Receivables with other Finance Company as the Debtor.</li> <li>2. Prohibition to make as guarantee the value of financing receivables on 1 (one) Debtor to more than 1 (one) party who provides a loan to the Finance Company.</li> <li>3. Prohibition to collect funds directly from public in the form of current account, saving, deposit, and/or other forms similarized to collection of public funds.</li> <li>4. Prohibition to give guarantee of any kinds on fulfillment of other parties' liabilities.</li> <li>5. Prohibition to give loans or financings by using guarantee based on lien law.</li> <li>6. Prohibition to issue a promissory note, except for guarantee on debt to the bank that becomes the creditor.</li> <li>7. Prohibition to take actions causing or forcing other finance institutions under the Financial Services Authority's supervision avoiding/breaching the provisions of legislation.</li> </ol>

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification
Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan OJK Monitoring of Follow-up of OJK's Audit	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama tahun 2019, Perusahaan diperiksa oleh pengawas OJK dan pengawas OJK IKNB Syariah.</li> <li>2. Hasil pemeriksaan langsung OJK dipantau secara berkala oleh fungsi kepatuhan untuk memastikan ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait sesuai dengan komitmen.</li> <li>3. Hasil tindak lanjut dikumpulkan oleh Fungsi kepatuhan dan disampaikan kepada pengawasan OJK.</li> <li>4. Berdasarkan Surat OJK No. S-1158/NB.223/2019 tanggal 26 November 2019, PT MNC Guna Usaha Indonesia dinyatakan telah melaksanakan seluruh rekomendasi pemeriksaan OJK untuk Unit Usaha Syariah (UUS) Perusahaan.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In 2019, the Company was audited by the OJK supervisor and OJK IKNB Sharia supervisor.</li> <li>2. The results of OJK's direct audit are periodically monitored by the compliance function to ensure follow-up by the related work units according to the commitment.</li> <li>3. The results of follow-up are collected by the Compliance Function and presented to OJK supervisor.</li> <li>4. Based on OJK Letter No.S-1158/NB.223/2019 dated 26th November 2019, PT MNC Guna Usaha Indonesia is declared having performed all recommendations of OJK audit for the Company's Sharia Business Unit (UUS).</li> </ol>

## COMPLIANCE REVIEW

Fungsi Kepatuhan melakukan review atau evaluasi berdasarkan hasil pemantauan, beberapa di antaranya mencakup:

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification
Rancangan Regulasi Eksternal Draft External Regulations	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fungsi kepatuhan melakukan review atas rancangan regulasi eksternal dari Otoritas Jasa Keuangan yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perusahaan.</li> <li>2. Selama tahun 2019, Perusahaan telah mereview rancangan regulasi eksternal sebanyak 7 (tujuh) rancangan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rancangan POJK Tata Kelola Perusahaan Pembiayaan</li> <li>• Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah (RPOJK Perizinan Pembiayaan)</li> <li>• RPOJK tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB</li> <li>• RSEOJK tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan</li> <li>• RSEOJK tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah dari Perusahaan Pembiayaan</li> <li>• Rancangan Surat Edaran OJK tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan</li> <li>• Rancangan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan (RSEOJK TKS PP)</li> </ul> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The compliance function conducts review on the draft external regulation of the Financial Services Authority that will have impact on the Company's business activities.</li> <li>2. In 2019, the Company reviewed 7 (seven) draft external regulations, namely: <ul style="list-style-type: none"> <li>• POJK Draft Finance Company Governance</li> <li>• Draft Regulation of Financial Services Authority on Business Licensing and Institutional of Finance Companies and Sharia Finance Companies (RPOJK on Finance Licensing)</li> <li>• RPOJK on Risk Management Application for LJKNB</li> <li>• RSEOJK on Amendment to Circular of Financial Services Authority Number 3/SEOJK.05/2016 on Monthly Reports of Finance Companies.</li> <li>• RSEOJK on Amendment to Circular of Financial Services Authority Number 4/SEOJK.05/2016 on Monthly Reports of Sharia Finance Companies and Sharia Business Units of Finance Companies.</li> <li>• OJK Draft Circular on Business Plan of Finance Companies</li> <li>• Draft Circular of OJK on Solvency Level Assessment of Finance Companies (RSEOJK TKS PP)</li> </ul> </li> </ol>

## COMPLIANCE REVIEW

The Compliance Function conducts review or evaluation based on the results of monitoring, some of them cover:

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification
Regulasi Eksternal External Regulations	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fungsi Kepatuhan mereview atas regulasi eksternal seperti peraturan dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga yang berwenang, khususnya yang memiliki dampak kepada kegiatan usaha Perusahaan.</li> <li>Review terhadap regulasi eksternal ditujukan untuk mengetahui dan memastikan dampak dan langkah-langkah yang perlu dilakukan agar Perusahaan tetap dalam kondisi complied dengan regulasi eksternal.</li> </ol> <p>The Compliance Function reviews external regulations like regulations and circulars issued by the Financial Services Authority, and the legislations issued by the government and authorized institutions, especially those having impacts on the Company's business activities.</p> <p>The review on external regulations is intended to find out and ensure the impacts and the measures required to take in order that the Company remains in the condition complied with the external regulations.</p>
Regulasi Internal Internal Regulations	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fungsi kepatuhan melakukan review atas ketentuan internal, sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>Review dilakukan untuk memastikan ketentuan internal yang disusun tidak melanggar atau bertentangan dengan regulasi eksternal yang berlaku.</li> <li>Selama tahun 2019, Perusahaan telah menerbitkan total sebanyak 64 (enam puluh empat) ketentuan internal dalam berbagai bentuk, seperti Kebijakan, Standar Operating Procedure (SOP), Surat Edaran (SE), Surat Keputusan (SK), dan Petunjuk Teknis.</li> </ol> <p>The compliance function reviews internal conditions before they are proposed and signed by the authorized officials.</p> <p>The review is conducted to ensure that the internal conditions prepared do not breach or conflict with the applied external regulations.</p> <p>In 2019, the Company issued in total of 64 (sixty four) internal conditions of various kinds, such as Policy, Standard Operating Procedure (SOP), Circular (SE), Decision (SK), and Technical Directions.</p>

## COMPLIANCE CAMPAIGN

Selama tahun 2019, dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan budaya kepatuhan adalah melalui kampanye kepatuhan, antara lain sebagai berikut:

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification
Reminder Pelaporan Reporting Reminder	<p>Fungsi Kepatuhan melakukan reminder kewajiban pelaporan secara berkala kepada seluruh unit kerja yang bertanggung jawab (in charge) terhadap pelaporan dimaksud, baik melalui media tertulis seperti email dan internal memorandum, maupun media lisan/tatap muka seperti pada saat rapat dan morning briefing.</p> <p>The Compliance Function reminds the reporting duty periodically to all work units in charge of the reporting, either by written media like email and internal memorandum, or by verbal/face-to-face media like in meetings and morning briefings.</p>

## COMPLIANCE CAMPAIGN

In 2019, efforts were made to materialize the compliance culture by compliance campaign, namely as follows:

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification
Sosialisasi Regulasi Eksternal Socialization of External Regulations	<p>Fungsi Kepatuhan melakukan sosialisasi dan/atau refreshment (sosialisasi ulang) atas regulasi eksternal yang relevan dengan kegiatan usaha Perusahaan.</p> <p>Selama tahun 2019, Fungsi Kepatuhan telah melakukan sosialisasi sebanyak 25 (dua puluh lima) ketentuan dari OJK, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>POJK No.24/POJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Lembaga Jasa Keuangan Nonbank</li> <li>SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka Pemasaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan</li> <li>POJK No.10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan UUS Perusahaan Pembiayaan</li> <li>POJK No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan</li> <li>SEOJK No.1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat</li> </ol> <p>The Compliance Function conducts socialization and/or refreshment (repeat socialization) on external regulations relevant to the Company's business activities.</p> <p>In 2019, the Compliance Function conducted socialization of 25 (twenty five) conditions of OJK, namely:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>POJK No.24/POJK.05/2019 on Business Plan of Non-bank Financial Service Institutions</li> <li>SEOJK No.12/SEOJK.07/2014 on Information Submission in Marketing of Products and/or Services of Financial Services</li> <li>POJK No.10/POJK.05/2019 on Business Operation of Sharia Finance Companies and UUS of Finance Companies</li> <li>POJK No.1/POJK.07/2013 on Consumers Protection of Financial Service Sector</li> <li>SEOJK No.1/SEOJK.07/2014 on Education Implementation In Order To Increase Financial Literacy to Consumers and/or Public</li> </ol>
Sosialisasi Regulasi Eksternal Socialization of External Regulations	<ol style="list-style-type: none"> <li>POJK No.76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Konsumen dan/atau Masyarakat</li> <li>SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen</li> <li>SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku</li> <li>SEOJK No.30/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan</li> <li>SEOJK No.31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan</li> </ol> <p>POJK No.76/POJK.07/2016 on Increase of Literacy and Financial Inclusion in Consumers and/or Public Financial Service Sector</p> <p>SEOJK No.14/SEOJK.07/2014 on Consumers' Personal Data and/or Information Confidentiality and Security</p> <p>SEOJK No.13/SEOJK.07/2014 on Standard Agreement</p> <p>SEOJK No.30/SEOJK.07/2017 on Activity Implementation In Order To Increase Financial Literacy in Financial Service Sector</p> <p>SEOJK No.31/SEOJK.07/2017 on Activity Implementation In Order To Increase Financial Inclusion in Financial Service Sector</p>

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification	
Sosialisasi Regulasi Eksternal Socialization of External Regulations	11. SEOJK No.23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah	
	12. POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik	
	13. POJK No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	
	14. SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan	
	15. POJK No.34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan	
	11. SEOJK No.23/SEOJK.05/2019 on Business Plan of Finance Companies and Sharia Finance Companies	
	12. POJK No.51/POJK.03/2017 on Sustainable Finance Application for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies	
	13. POJK No.35/POJK.05/2018 on Business Operation of Finance Companies	
	14. SEOJK No.17/SEOJK.07/2018 on Guidelines For Implementation of Consumer Complaint Service in Financial Service Sector	
	15. POJK No.34/POJK.03/2018 on Reassessment For Main Parties of Financial Service Institutions	
	Sosialisasi Regulasi Eksternal Socialization of External Regulations	16. SEOJK No.15/SEOJK.05/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
		17. POJK No.11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
		18. POJK No.63/POJK.05/2016 tentang Perubahan atas POJK No.11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
		19. SEOJK No.54/SEOJK.072016 tentang Monitoring Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
		20. POJK No.1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
16. SEOJK No.15/SEOJK.05/2019 on Reassessment For Main Parties of Non-Bank Financial Service Institutions		
17. POJK No.11/POJK.05/2014 on Direct Audit of Non-Bank Financial Service Institutions		
18. POJK No.63/POJK.05/2016 on Amendment to POJK No.11/POJK.05/2014 on Direct Audit of Non-Bank Financial Service Institutions		
19. SEOJK No.54/SEOJK.072016 on Monitoring of Alternative Dispute Resolution in Financial Service Sector		
20. POJK No.1/POJK.07/2014 on Alternative Dispute Resolution Institutions		

Compliance Monitoring Compliance Monitoring	Penjelasan Clarification				
Sosialisasi Regulasi Eksternal Socialization of External Regulations	21. POJK No.18 /POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan				
	22. SEOJK No.23/SEOJK.05/2019 tentang Rencana Bisnis Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah				
	23. POJK No.3/POJK.02/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan				
	24. POJK No.22/POJK.02/2018 tentang Perubahan atas POJK No.3/POJK.02/2014 tentang tata cara pelaksanaan pungutan oleh OJK				
	25. SEOJK No.4/SEOJK.02/2014 tentang Mekanisme Pembayaran Pungutan Otoritas Jasa Keuangan				
	21. POJK No.18 /POJK.07/2018 on Consumer Complaint Service in Financial Service Sector				
	22. SEOJK No.23/SEOJK.05/2019 on Business Plan of Finance Companies and Sharia Finance Companies				
	23. POJK No.3/POJK.02/2014 on Implementation Procedure of Levies by Financial Services Authority				
	24. POJK No.22/POJK.02/2018 on Amendment to POJK No.3/POJK.02/2014 on Implementation Procedure of Levies by OJK				
	25. SEOJK No.4/SEOJK.02/2014 on Payment Mechanism of Levies by Financial Services Authority				
	3. Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan	3. Development of Compliance Function Competence In order to make the Compliance Function as a strategic partner for each organization line, the Compliance HRs are also continuously enhanced by including their participation in the implementation of certification/seminars/workshops/trainings like:			
			Dalam rangka menjadikan Fungsi Kepatuhan sebagai strategic partner bagi setiap lini organisasi, maka SDM Kepatuhan juga terus ditingkatkan dengan mengikutsertakan dalam pelaksanaan sertifikasi/seminar/workshop/pelatihan, seperti:		
	No	Kegiatan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
		Sosialisasi Penerapan dan Pelaporan Data Registri Aset Socialization of Application and Reporting of Assets Registry Data	APPI	Mall The Kasablanka Ruang Curacao Kota Kasablanka Mall Lantai 3 Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan The Kasablanka Mall, Curacao Room, Kota Kasablanka Mall 3rd Floor, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, South Jakarta	9 Januari 2019
		Sosialisasi 3 POJK Mengenai Perusahaan Pembiayaan Socialization of 3 POJK On Finance Companies	APPI	Hotel Pullman Jakarta Central Park Pullman Jakarta Hotel, Central Park	12 Maret 2019

No	Kegiatan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
	Sosialisasi Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank Socialization of Financial Services Authority Circular No.15 on Reassessment for Main Parties of Non-Bank Financial Service Institutions	OJK	Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Indonesia Kempinski Hotel, Jakarta	13 Agustus 2019
	Sosialisasi Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Pembiayaan Socialization of Sustainable Finance Application For Finance Companies	APPI	Ballroom Hotel Sheraton Gandaria City Jl. Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan Ballroom of Sheraton Hotel, Gandaria City, Jl. Sultan Iskandar Muda, South Jakarta	24 September 2019
	Penerapan Program APU PPT 4.0 Berdasarkan Perkembangan Masa Kini di tengah Persiapan Menghadapi Assessor MER FATF Tahun 2019-2024 Application of APU PPT 4.0 Program Based on Today's Development amidst the Preparation in Facing MER FATF Assessor For 2019-2024	PT MNC Kapital Indonesia, Tbk	iNews Tower 3rd Floor – Jakarta iNews Tower 3rd Floor – Jakarta	11 Oktober 2019
	Workshop Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Perusahaan Batch 2 Workshop on Sustainable Finance Application For Batch 2 Companies	LPPI	Kampus Bumi LPPI Jakarta, Jl. Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta, Ruang Kemang Lt. 3 Perkantoran Kampus Bumi LPPI Jakarta, Jl. Kemang Raya No. 35, Kebayoran Baru - Jakarta, Kemang Room 3rd Floor of Office Complex	19 – 20 November 2019
	Training Dasar Ekonomi Syariah Basic Training of Sharia Economy	PT MNC Guna Usaha Indonesia	Hotel Pullman Thamrin, Jakarta Hotel Pullman Thamrin, Jakarta	4 Desember 2019
	Training Ekonomi Syariah Lanjutan Training on Advanced Sharia Economy	PT MNC Guna Usaha Indonesia	Gedung Financial Center Lantai 13 MNC Center Jl. Kebon Sirih, Ruang Investment Financial Center Building, 13th Floor, MNC Center, Jl. Kebon Sirih, Investment Room	17 Desember 2019

4. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan
  - a. Landasan Hukum  
Sesuai dengan POJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, setiap Perusahaan Pembiayaan diwajibkan setiap waktu memenuhi persyaratan Tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat.  
Cara perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) mengacu kepada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 2 /SEOJK.05/2016 Tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Pembiayaan Syariah.
  - b. Hasil Pemantauan  
Perusahaan menghitung sendiri (self assessment) dan memantau Tingkat Kesehatan Keuangan, baik secara konsolidasi (Konvensional dan Unit Usaha Syariah), maupun secara individual untuk Unit Usaha Syariah.
    - i. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) Konsolidasi  
Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) Konsolidasi meliputi 4 (empat) faktor, berdasarkan Laporan Bulanan Periode Desember 2019, antara lain:

4. Company's Financial Solvency Level
  - a. Legal Bases  
In accordance with POJK No. 35/POJK.05/2018 on Business Operation of Finance Companies, any Finance Companies are required to at any time meet the requirement of Financial Solvency Level by the minimum condition of solvent.  
The calculation method of Financial Solvency Level (TKK) refers to Financial Services Authority Circular No.1/SEOJK.05/2016 on Financial Solvency Level of Finance Companies and Financial Services Authority Circular No.2/SEOJK.05/2016 on Financial Solvency Level of Sharia Financing.
  - b. Monitoring Results  
The Company self assessed and monitored the Financial Solvency Level, either in consolidation (Conventional and Sharia Business Unit), or individually for Sharia Business Unit.
    - i. Assessment of Consolidated Financial Solvency Level (TKK)  
The assessment of Consolidated Financial Solvency Level (TKK) includes 4 (four) factors, based on the Monthly Report of December 2019, namely:

No	Kegiatan	Penyelenggara
	Permodalan Capitalization	Dalam menilai faktor permodalan, Perusahaan menghitung rasio permodalan yaitu perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan. Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, faktor permodalan Perusahaan berada di Peringkat 1. In assessing the capitalization factor, the Company assessed the capitalization ratio, i.e. the ratio of adjusted capital to adjusted assets. Based on the self-assessment as of 31st December 2019, the Company's capitalization factor is at Rating 1.

No	Kegiatan	Penyelenggara
	Kualitas Pembiayaan Financing Quality	Dalam menilai faktor Kualitas Piutang Pembiayaan, Perusahaan menghitung rasio Kualitas Piutang Pembiayaan (Non Performing Financing Ratio). Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, faktor Kualitas Piutang Pembiayaan Perusahaan berada di Peringkat 1. In assessing the factor of Financing Receivables Quality, the Company assessed the ratio of Financing Receivables Quality (Non Performing Financing Ratio). Based on the self-assessment as of 31st December 2019, the Company's Financing Receivables Quality factor is at Rating 1.
	Rentabilitas Rentability	Dalam menilai faktor Rentabilitas, Perusahaan menghitung beberapa rasio keuangan, antara lain: Return On Asset Ratio (ROA), Return on Equity Ratio (ROE), Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin Ratio (NIM). Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, Faktor Rentabilitas Perusahaan berada di Peringkat 1,5. In assessing the Rentability factor, the Company assessed some financial ratios, namely: Return On Asset Ratio (ROA), Return on Equity Ratio (ROE), Ratio of Operational Cost to Operational Income (BOPO), and Net Interest Margin (NIM) Ratio. Based on the self-assessment as of 31st December 2019, the Company's Rentability factor is at Rating 1.5.
	Likuiditas Liquidity	Dalam menilai faktor Likuiditas, Perusahaan menghitung Current Ratio dan Cash Ratio. Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, Faktor Likuiditas Perusahaan berada di Peringkat 2,5. In assessing the Liquidity factor, the Company assessed the Current Ratio and Cash Ratio. Based on the self-assessment as of 31st December 2019, the Company's Liquidity factor is at Rating 2.5.

- ii. Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) Unit Usaha Syariah (UUS)  
Penilaian Tingkat Kesehatan Keuangan (TKK) Unit Usaha Syariah (UUS) meliputi 4 (empat) faktor, berdasarkan Laporan Bulanan Periode Desember 2019, antara lain:

- ii. Assessment of Financial Solvency Level (TKK) of Sharia Business Unit (UUS)  
The assessment of Financial Solvency Level (TKK) of Sharia Business Unit (UUS) includes 4 (four) factors, based on the Monthly Report of December 2019, namely:

No	Kegiatan	Penyelenggara
	Permodalan	Dalam menilai faktor permodalan, Perusahaan menghitung rasio permodalan yaitu perbandingan antara modal yang disesuaikan dengan aset yang disesuaikan. Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, faktor permodalan Perusahaan berada di Peringkat 1. In assessing the capitalization factor, the Company assessed the capitalization ratio, i.e. the ratio of adjusted capital to adjusted assets. Based on the self-assessment as of 31st December 2019, the Company's capitalization factor is at Rating 1.

No	Kegiatan	Penyelenggara
	Kualitas Pembiayaan	Dalam menilai faktor Kualitas Piutang Pembiayaan, Perusahaan menghitung rasio Kualitas Piutang Pembiayaan (Non Performing Financing Ratio). Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, faktor Kualitas Piutang Pembiayaan Perusahaan berada di Peringkat 1. In assessing the factor of Financing Receivables Quality, the Company assessed the ratio of Financing Receivables Quality (Non Performing Financing Ratio). Based on the self-assessment as of 31st December 2019, the Company's Financing Receivables Quality factor is at Rating 1.
	Rentabilitas	Dalam menilai faktor Rentabilitas, Perusahaan menghitung beberapa rasio keuangan, antara lain: Return On Asset Ratio (ROA), Return on Equity Ratio (ROE), Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Net Interest Margin Ratio (NIM). Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, Faktor Rentabilitas Perusahaan berada di Peringkat 1. In assessing the Rentability factor, the Company assessed some financial ratios, namely: Return On Asset Ratio (ROA), Return on Equity Ratio (ROE), Ratio of Operational Cost to Operational Income (BOPO), and Net Interest Margin (NIM) Ratio. Based on the self-assessment as of 31st December 2019, the Company's Rentability factor is at Rating 1.
	Likuiditas	Dalam menilai faktor Likuiditas, Perusahaan menghitung Current Ratio dan Cash Ratio. Berdasarkan perhitungan sendiri Per 31 Desember 2019, Faktor Likuiditas Perusahaan berada di Peringkat 1. In assessing the Liquidity factor, the Company assessed the Current Ratio and Cash Ratio. Based on the self-assessment as of 31st December 2019,

5. Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi Terkait Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)  
a. Fungsi APU & PPT melekat pada pejabat yang menjalankan Fungsi Manajemen Risiko, berada dalam Departemen Compliance & Risk Management yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.  
b. Penunjukkan Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 04/SK/DIR-MNCGUI/2018 tentang Penunjukkan Penanggung Jawab dan Pelaksana Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT).

5. Ownership of Work Unit or Function Related to Application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT) Program  
a. APU & PPT function is inherent in the official performing the Risk Management Function, in the Compliance & Risk Management Department responsible directly to the President Director.  
b. The appointment of Person In Charge of APU PPT Program Application is articulated in the Board of Directors' Decision No.04/SK/DIR-MNCGUI/2018 on Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU & PPT) Program.

6. Kepemilikan Unit Kerja atau Fungsi dalam Menangani dan Menyelesaikan Pengaduan yang Diajukan Konsumen

6. Ownership of Work Unit or Function in Handling and Resolving Complaints Submitted by Consumers

- a. Untuk memantau dan memastikan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan Konsumen, PT MNC Guna Usaha Indonesia membentuk Unit Khusus Pelayanan Nasabah (UKPN) yang berada di bawah supervisi Business Development & Marketing Communication.
- b. Penunjukkan Penanggungjawab Penerapan Program APU PPT tertuang dalam Surat Keputusan Direksi 06/SK/DIR-MNCGUI/2019 perihal Penunjukan Penanggungjawab Unit Pelayanan Nasabah.
- c. Unit Pelayanan Nasabah mencakup fungsi untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah, fungsi literasi keuangan, dan fungsi inklusi keuangan.

b. Auditor Internal

1. Ruang Lingkup Pekerjaan Auditor Internal
  - a. Meyakinkan bahwa pengelolaan risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perusahaan telah memadai dan berfungsi dengan baik.
  - b. Mengevaluasi ketaatan terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta prosedur Perusahaan yang berlaku.
  - c. Melakukan evaluasi apakah informasi keuangan, manajemen, dan operasional yang signifikan dalam ruang lingkup audit sudah disajikan dengan akurat, lengkap, dapat dipercaya, dan tepat waktu.
  - d. Menilai kecukupan sarana untuk memelihara dan melindungi aset Perusahaan, dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan aset.
  - e. Mengidentifikasi setiap potensi penghematan dan efektivitas biaya serta membuat rekomendasi dalam upaya meningkatkan terciptanya efisiensi dan efektivitas biaya.
  - f. Melaksanakan penugasan khusus dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan tersebut

- a. To monitor and ensure the handling and resolving of complaints submitted by Consumers, PT MNC Guna Usaha Indonesia established a Customer Service Special Unit (UKPN) under the supervision of Business Development & Marketing Communication.
- b. The appointment of Person In Charge of the APU PPT Program Application is articulated in the Board of Directors' Decision No.06/SK/DIR-MNCGUI/2019 on Appointment of Person In Charge of Customer Service Unit.
- c. The Customer Service Unit covers the function to handle and resolve customer complaints, financial literacy function, and financial inclusion function.

b. Internal Auditor

1. Scope of Internal Auditor's Jobs
  - a. To convince that the Company's risk management, internal control and governance process have been adequate and functioned well.
  - b. To evaluate adherence to the prevailing laws, legislations, and Company's policy and procedure.
  - c. To make evaluation whether information on finance, management and operation significant in the scope of audit have been presented accurately, completely, reliably, and timely.
  - d. To evaluate the adequacy of facilities for maintaining and protecting the Company's assets, and to verify the assets existence.
  - e. To identify any potential savings and cost effectiveness and to make recommendation in the effort of increasing cost efficiency and effectiveness.
  - f. To perform special assignments of the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or Audit Committee relevant to the work

- g. Menyiapkan laporan audit dan rekomendasi untuk perbaikan.

2. Struktur atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

- a. Satuan Kerja Audit Internal dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Kerja Audit Internal.
- b. Auditor yang duduk dalam unit audit internal bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Kerja Audit Internal.
- c. Kepala Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- d. Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
- e. Dalam struktur organisasi, Kepala Unit Internal Audit bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utama.

3. Independensi Auditor Internal

- a. Seluruh kegiatan yang dijalankan oleh Satuan Kerja Audit Internal wajib senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Perusahaan termasuk masalah pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu, atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.
- b. Satuan Kerja Audit Internal tidak memiliki tanggung jawab terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas Perusahaan. Oleh karena itu, Satuan Kerja Audit Internal tidak akan melakukan kegiatan operasional, penyusunan prosedur, pemasangan sistem, pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Satuan Kerja Audit Internal.
- c. Satuan Kerja Audit Internal wajib menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam

- g. To prepare the audit report and recommendation for improvement.

2. Structure or Position of Internal Audit Work Unit

- a. The Internal Audit Work Unit is directed by the Head of Internal Audit Work Unit.
- b. The Auditor seated in the internal audit unit shall be directly responsible to the Head of Internal Audit Work Unit.
- c. The Head of Internal Audit Work Unit shall be responsible to the President Director.
- d. The Head of Internal Audit Work Unit is appointed and dismissed by the President Director at the Board of Commissioners' approval.
- e. In the organizational structure, the Head of Internal Audit Unit shall be directly responsible to the President Director.

3. Internal Auditor's Independency

- a. All activities carried out by the Internal Audit Work Unit shall constantly be free from involvement of any elements whatsoever in the Company, including issues of selection of audit, scope, procedure, frequency, time, or content of report to convince independency and objective behavior required in presenting the report.
- b. The Internal Audit Work Unit has no responsible for the operation or authority on the Company's activities. Therefore, the Internal Audit Work Unit will not conduct operational activities, procedure drafting, system installation, recording, or be involved in any activities whatsoever that may interfere with the Internal Audit Work Unit's assessment.
- c. The Internal Audit Work Unit is required to show the highest level of objectivity in gathering, evaluating,

<p>mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang diperiksa. Satuan Kerja Audit Internal wajib membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam mengambil keputusan.</p> <p>d. Kepala dan personil Satuan Kerja Audit Internal dilarang untuk merangkap peran dan tanggung jawab sebagai pelaksana kegiatan operasional persroan.</p>	<p>and communicating information related to the activities or processes being audited. The Internal Audit Work Unit shall bake a balance assessment on the whole situation that is relevant and not influenced by personal interest or other party's interest in making decisions.</p> <p>d. The head and personnel Internal Audit Work Unit shall not be allowed to double the roles and responsibilities as executor of the company's operational activities.</p>	<p>temuan diselesaikan.</p> <p>g. Menginformasikan status tindakan perbaikan atas temuan audit dan rekomendasi hasil audit, kepada Direksi.</p> <p>h. Menyiapkan ukuran – ukuran penilaian kinerja dan pencapaian tujuan internal audit.</p>	<p>findings have been settled.</p> <p>g. To inform the status of correction measures on audit findings and recommendations of audit results to the Board of Directors.</p> <p>h. To prepare the measures of performance assessment and achievement of audit internal objective.</p>
<p>4. Uraian Tugas Satuan Kerja Audit Internal</p> <p>a. Menyusun rencana audit tahunan berdasarkan metodologi berbasis risiko dan menyampaikan rencana audit tahunan kepada Direktur Utama.</p> <p>b. Mengimplementasikan rencana audit tahunan yang disetujui, termasuk tugas khusus atau proyek yang diminta oleh direksi.</p> <p>c. Memastikan tersedianya jumlah staf audit yang cukup dengan pengetahuan, keahlian dan pengalaman yang memadai untuk melaksanakan audit.</p> <p>d. Melakukan aktivitas audit dan memberikan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.</p> <p>e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang diaudit dengan tembusan kepada Direktur Utama dan unit lain yang berkepentingan serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Menginformasikan semua temuan signifikan yang timbul, kepada direksi dan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.</p> <p>f. Melaksanakan follow up atas temuan dan rekomendasi audit. Seluruh temuan audit yang significant akan tetap berstatus belum selesai sampai</p>	<p>4. Job Description of Internal Audit Work Unit</p> <p>a. To prepare the annual audit plan based on the risk-based methodology and present the annual audit plan to the President Director.</p> <p>b. To implement the annual audit plan approved, including special jobs or projects asked by the Board of Directors.</p> <p>c. To ensure the availability of adequate number of audit staff having adequate knowledge, expertise and experience to perform audit.</p> <p>d. To conduct audit activities and give evaluation on the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operation, human resources, marketing, information technology and other activities.</p> <p>e. To make the report on audit results and present the report to the audited party with copy to the President Director and other units concerned and to the Board of Commissioners through the Audit Committee. To inform all significant findings arising to the Board of Directors and Board of Commissioners through the Audit Committee.</p> <p>f. To conduct follow-up on audit findings and recommendations. All significant audit findings will remain having incomplete status until the</p>	<p>5. Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal Internal Audit dikepalai oleh Yehezkiel Rizki Winda Aristha, selaku Internal Audit &amp; Anti Fraud Departemen Head yang merupakan Warga Negara Indonesia, lahir di Semarang pada Tahun 1986. Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti.</p> <p>Sebelum bergabung dengan MNC Group, beliau berkarir di bidang pembiayaan otomotif pada PT. CIMB Niaga Auto Finance sebagai Branch Office Audit Department Head and Audit QA &amp; Development Department Head dan sebelumnya sebagai PJS Chief Audit Executive, Branch Office Audit Departmen Head, Head Office Department Head and QA &amp; Development Audit Department Head pada perusahaan pembiayaan yang sama serta Area Audit Officer &amp; Independent Control Unit Officer pada PT. Summit Oto Finance.</p> <p>Bergabung di PT MNC Guna Usaha Indonesia sejak Agustus 2019 sebagai Internal Audit &amp; Anti Fraud Department Head.</p> <p>6. Jumlah Pegawai Pada Satuan Kerja Audit Internal Satuan Kerja Audit Internal terdiri dari 3 (dua) orang pegawai termasuk Kepala Satuan Kerja Audit Internal.</p> <p>7. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Audit Internal Selama tahun 2019, Audit Internal telah melakukan pemeriksaan dengan objek pemeriksaan, antara lain:</p> <p>a. General Audit dan Operasional KSKC Makassar</p> <p>b. General Audit dan Operasional KSKC Jakarta</p>	<p>5. Profile of Head of Internal Audit Work Unit The Internal Audit is directed by Yehezkiel Rizki Winda Aristha, as Internal Audit &amp; Anti Fraud Department Head who is and Indonesian Citizen, born in Semarang in 1986. He got the degree of Bachelor in Economics of Trisakti University.</p> <p>Before joining MNC Group, he had his career in automotive financing in PT. CIMB Niaga Auto Finance as Branch Office Audit Department Head and Audit QA &amp; Development Department Head, formerly as temporary official of Chief Audit Executive, Branch Office Audit Department Head, Head Office Department Head and QA &amp; Development Audit Department Head in the same financing company and Area Audit Officer &amp; Independent Control Unit Officer in PT. Summit Oto Finance.</p> <p>He joined PT MNC Guna Usaha Indonesia since August 2019 as Internal Audit &amp; Anti Fraud Department Head.</p> <p>6. Number of Employees in Internal Audit Work Unit The Internal Audit Work Unit consists of 2 (two) employees, including the Head of Internal Audit Work Unit.</p> <p>7. Report on Results of Internal Audit Jobs Performance In 2019, the Internal Audit conducted audit with the following audit objects:</p> <p>a. General Audit and Operation of KSKC Makassar</p> <p>b. General Audit and Operation of KSKC Jakarta</p>



- c. General Audit dan Operasional KSKC Semarang
- d. General Audit dan Operasional KSKC Banjarmasin
- e. General Audit dan Operasional KSKC Surabaya
- f. General Audit dan Operasional Unit Usaha Syariah
- g. General Audit dan Operasional APUPPT
- h. Stock Opname Polis Asuransi

- c. General Audit and Operation of KSKC Semarang
- d. General Audit and Operation of KSKC Banjarmasin
- e. General Audit and Operation of KSKC Surabaya
- f. General Audit and Operation of Sharia Business Unit
- g. General Audit and Operation of APUPPT
- h. Inventory Taking of Insurance Policy

c. Auditor Eksternal

1. Ruang Lingkup dan Cakupan Audit  
Ruang Lingkup pemeriksaan oleh Auditor Eksternal adalah Laporan Posisi Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 serta catatan atas Laporan keuangan yang berisi ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya atas laporan keuangan tersebut.
2. Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Keuangan Perusahaan selama 5 (lima) Tahun terakhir

c. External Auditor

1. Scope of Audit  
The Scope of audit by the External Auditor covers the Report on the Company's Financial Position as of 31st December 2019, Profit-Loss Statement and other Comprehensive Income, Report on Equity change, and Cash Flow Statement for the year ended on 31st December 2019 and notes on Financial Statement containing the summary of significant accounting policy and information of other clarification on the financial statement.
2. Public Accountant offices conducting Audit on Company's Financial Statements for the last 5 (five) Years

Tahun Year	Kantor Akuntan Publik Public Accountant Office	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK Name of Accountant (Individual) and Registration Number in OJK	No Pendaftaran OJK OJK Registration No
2019	Kanaka Puradiredja, Suhartono	Helli Isharyanto Budi Susetyo, CPA	AP.1021
2018	Anwar & Rekan	Helli Isharyanto Budi Susetyo, CPA	AP.1021
2017	Anwar & Rekan	Helli Isharyanto Budi Susetyo, CPA	AP.1021
2016	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo&Rekan	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA	AP. 0269
2015	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo&Rekan	Drs. Nunu Nurdiyaman, CPA	AP. 0269

**10. PENERAPAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME (APU PPT)**

Dalam rangka penerapan APU PPT di Perusahaan, maka dilakukan beberapa upaya, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Struktur Kebijakan APU PPT  
Sebagai bagian dari penerapan APU PPT,

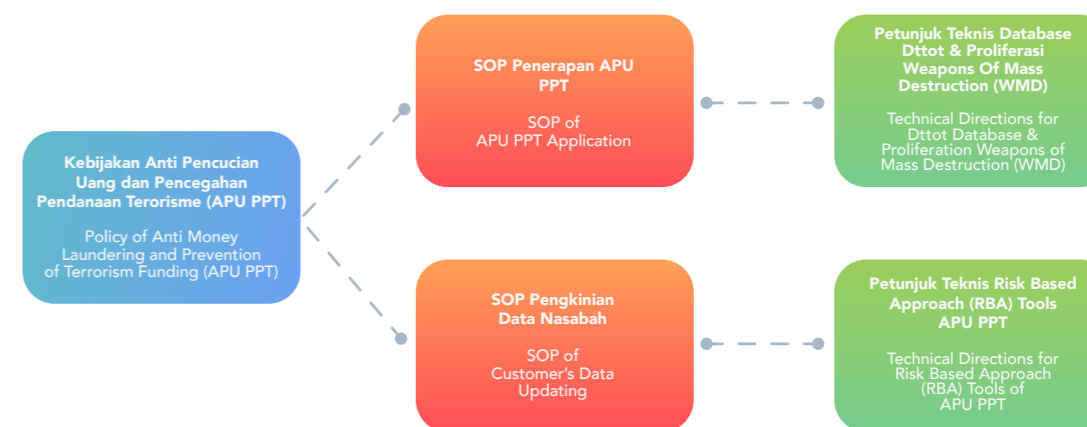
**10. APPLICATION OF ANTIMONEY LAUNDERING AND PREVENTION OF TERRORISM FUNDING (APU PPT)**

In the frame of APU PPT application in the Company, some efforts are made as follows:

- a. Improvement of APU PPT Policy Structure  
As part of APU PPT application, the Company

Perusahaan menetapkan ketentuan internal sebagai acuan di internal Perusahaan dalam menerapkan APU PPT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Struktur Kebijakan APU PPT yang saat ini berlaku, antara lain sebagai berikut:

specifies the internal conditions as the reference in the Company internally in applying the APU PPT according to the prevailing legislation. The APU PPT Policy Structure currently applied is as follows:

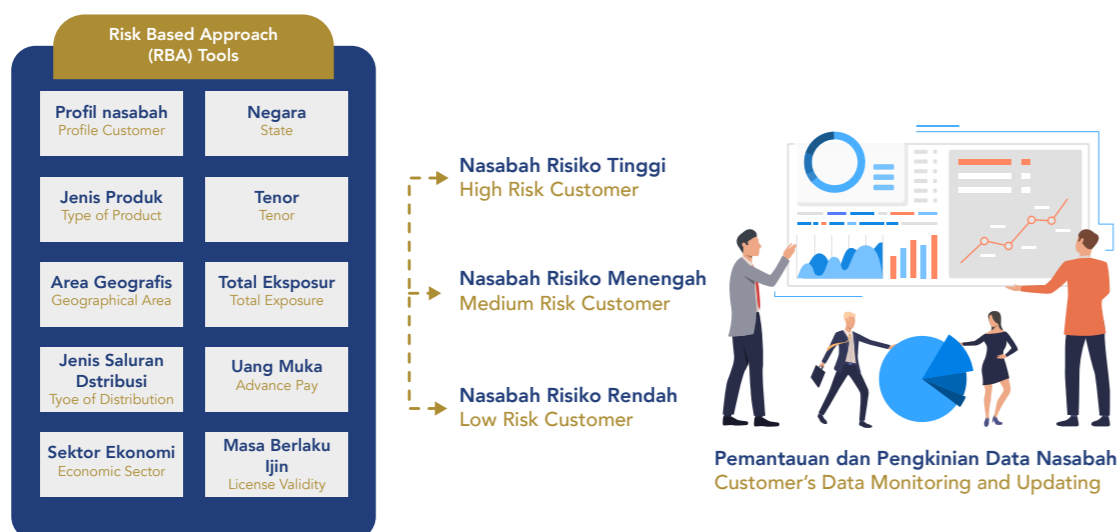


- b. Penyusunan Risk Based Approach (RBA) Tools APU PPT  
Sesuai dengan SEOJK No. 37/SEOJK.05/2017 tanggal 17 Juli 2017 perihal Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Industri Keuangan Non-Bank dimana pemantauan dan pengkinian data Nasabah dilakukan berdasarkan tingkat risiko Nasabah. Untuk mengklasifikasikan nasabah berdasarkan tingkat risiko, maka Fungsi APU PPT menyusun RBA Tools yang menggunakan beberapa indikator di antaranya mengacu kepada:
  1. National Risk Assessment (NRA) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2015
  2. National Risk Assessment (NRA) terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Tahun 2015
  3. Sectoral Risk Assessment (SRA) terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2017

Berdasarkan RBA Tools, maka nasabah dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis risiko, yaitu tinggi, menengah dan rendah. Hasil klasifikasi nasabah akan menentukan strategi pemantauan.

- b. Preparation of Risk Based Approach (RBA) Tools of APU PPT  
In accordance with SEOJK No.37/SEOJK.05/2017 dated 17th July 2017 regarding the Guidelines For Application of Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding Program in Non-Bank Financial Industry, in which the monitoring and updating of Customer's data are conducted based on the Customer's risk level. To classify customers based on the risk level, APU PPT Function prepares the RBA Tools using several indicators, among others referring to:
  1. National Risk Assessment (NRA) on Criminal Act of Money Laundering of 2015
  2. National Risk Assessment (NRA) on Criminal Act of Terrorism Funding of 2015
  3. Sectoral Risk Assessment (SRA) on Criminal Act of Money Laundering of 2017

Based on RBA Tools, customers are classified into 3 (three) types of risk, namely high, medium and low. The results of customer's classification will determine the monitoring strategy.



- c. Pemantauan Pengkinian Data Nasabah  
Dalam rangka memenuhi rencana pengkinian data nasabah di tahun 2019 sebagaimana yang telah disampaikan kepada OJK, maka Perusahaan telah menyampaikan Realisasi Pengkinian Data Nasabah pada bulan Desember 2019 dengan hasil realisasi pengkinian data nasabah tersebut mencapai 76% (tujuh puluh enam per seratus) terhadap rencana pengkinian data nasabah.
- d. Penyelenggaraan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)  
Perusahaan menyelenggarakan pelatihan APU PPT sebagai bagian dalam rangkaian dari kegiatan orientasi bagi karyawan baru maupun refreshment bagi karyawan lama. Selama Tahun 2019, telah dilakukan 2 (dua) kali pelatihan APU PPT melalui dengan rincian sebagai berikut:

- c. Monitoring of Customers' Data Updating  
In order to meet the plan of customers' data updating in 2019 as presented to OJK, the Company has submitted the Realization of Customers' Data Updating in December 2019 with the realization result of customers' data updating reaching 76% (seventy six percent) on the plan of customers' data updating.
- d. Organizing Training in Anti Money Laundering and Prevention of Terrorism Funding (APU PPT)  
The Company organized APU PPT training as a part in the series of orientation activities for new employees or as refreshment for old employees. In 2019 were conducted 2 (two) times APU PPT training with the following details:

Penyelenggara Organizer	Tempat Place	Pemberi Materi Material Provider	Tanggal Date	Peserta Participant	Jumlah Peserta Number of Participants
Human Resource & Compliance MNC Leasing	Gedung iNews	Penanggung Jawab APU PPT	08 April 2019	Account Manager	14
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	MNC Conference Hall, iNews Tower	Pembicara dari PPATK	11 Oktober 2019	Board of Directors, Compliance & Risk Management, Internal Audit, General Affair, IT, Credit Analyst, Human Resource, Business Support, dan Operation Technic	17



Pada pelatihan APU PPT yang diselenggarakan oleh Perusahaan, setiap peserta pelatihan mengikuti pre test sebelum pelatihan dan post test setelah pelatihan dilakukan. Hal ini dilakukan untuk menguji kembali pemahaman para peserta pelatihan serta mengevaluasi efektivitas pelatihan yang sudah disampaikan.

In the APU PPT training organized by the Company, each training participant took a pre test before training and a post test after training. This is to re-test the understanding of training participants and evaluate the effectiveness of the provided training.

- d. Pelaporan terkait APU PPT  
Fungsi APU PPT memantau dan/atau menyampaikan laporan terkait dengan kegiatan APU PPT kepada PPAK atau OJK, antara lain:
1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, yaitu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Perusahaan mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan.
  2. Laporan nasabah baru melalui SIPESAT secara triwulanan yaitu pada bulan Januari, April, Juli, dan Oktober 2019.
  3. Laporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah pada tanggal 26 Desember 2019.
  4. Laporan Perubahan Action Plan Program Penerapan APU PPT pada tanggal 22 November 2019.

- d. Reporting related to APU PPT  
APU PPT Function monitored and/or submitted reports related to APU PPT activities to PPAK or OJK, namely:
1. Report on Suspicious Financial Transactions, i.e. no longer than 3 (three) work days after the Company has identified any elements of Suspicious Financial Transactions.
  2. Report on new customers via SIPESAT quarterly, i.e. in January, April, July and October 2019.
  3. Report on the Plan and Realization of Customers' Data Updating on 26th December 2019.
  4. Report on Change of Action Plan on APU PPT Application Program on 22nd November 2019.

### 11. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN YANG BELUM DIUNGKAP DALAM LAPORAN LAINNYA

- a. Transparansi Jasa Pembiayaan  
Jasa pembiayaan yang disajikan dalam website Perusahaan, antara lain:

### 11. TRANSPARENCY OF COMPANY'S FINANCIAL AND NON FINANCIAL CONDITIONS NOT YET DISCLOSED IN OTHER REPORTS

- a. Transparency of Financing Services  
The financing services presented in the Company's website are namely:

## PEMBIAYAAN SYARIAH



- b. Transparansi Tata Cara Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

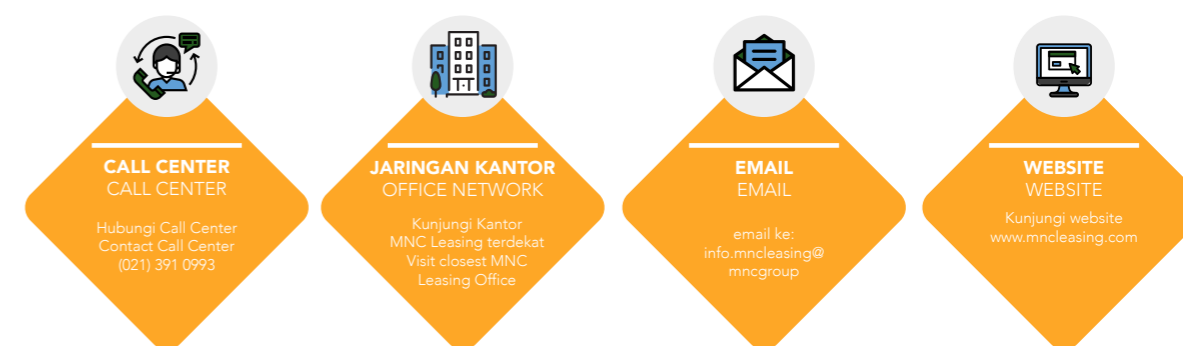
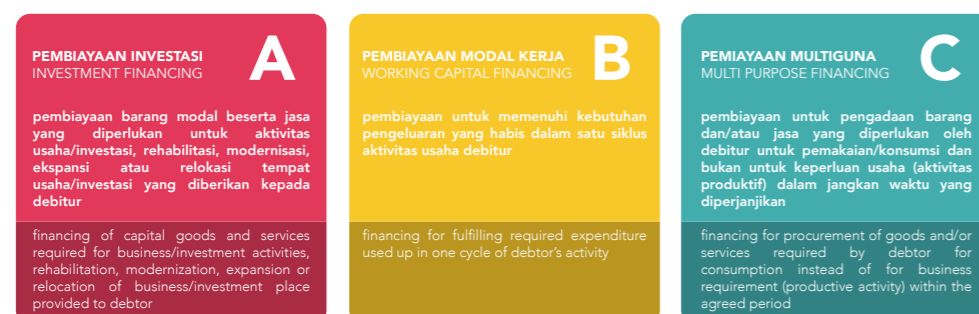
Sebagai bagian dari penerapan kebijakan perlindungan nasabah, maka Perusahaan telah menetapkan unit kerja khusus untuk mengelola pengaduan nasabah dan alur kerja tindak lanjut pengaduan nasabah. Pengaduan nasabah memegang peranan penting, selain untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, laporan yang diterima dapat dipergunakan untuk evaluasi perbaikan proses pelayanan dan pembiayaan di Perusahaan. Mengingat peranan tersebut, maka Perusahaan membuka akses kepada nasabah untuk menyampaikan pengaduan kepada Perusahaan, baik secara lisan maupun tertulis.

- b. Transparency in Procedure of Complaints and Dispute Resolution

As part of the application of customer protection policy, the Company has specified a special work unit to manage customers' complaints and workflow of customers' complaints follow-up. Customers' complaints play an important role, besides for observing the prevailing conditions and legislation, the report received may be used for evaluation of improvement in service and financing process in the Company.

In view of such role, the Company opens an access for the customers to submit complaints to the Company, verbally as well as in writing.

## PEMBIAYAAN KONVENSIAL

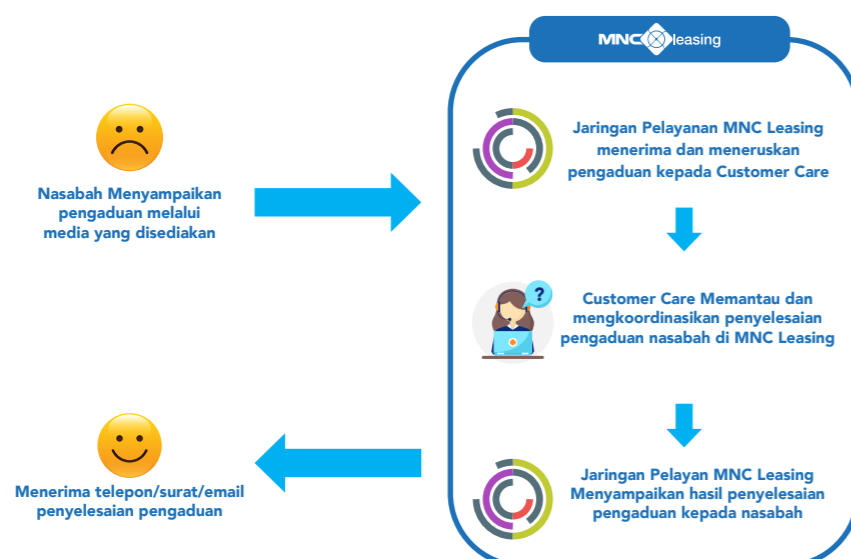


Solusi penyelesaian pengaduan nasabah dilakukan dalam waktu 20 hari kerja dan dalam kondisi tertentu penyelesaian pengaduan dapat diperpanjang hingga paling lama 20 (dua puluh) hari kerja berikutnya sesuai POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Perpanjangan waktu penyelesaian pengaduan diberitahukan secara tertulis kepada konsumen.

The solution of customers' complaints settlement is conducted within 20 work days and in certain conditions the complaints settlement may be extended to no longer than the next 20 (twenty) work days according to POJK Number 1/POJK.07/2013 on Protection of Financial Service Sector Consumers. The time extension for complaints settlement shall be informed in writing to consumers.

Alur Pengaduan Nasabah

Flow of Customer's Complaint



## 12. PENGUNGKAPAN KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG MENCAPAI 50% (LIMA PULUH PERSEN) ATAU LEBIH, YANG MELIPUTI JENIS DAN JUMLAH LEMBAR SAHAM

Tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki saham 50% (lima puluh persen) atau lebih pada PT MNC Guna Usaha Indonesia maupun perusahaan lain.

## 12. DISCLOSURE OF SHARES OWNERSHIP OF MEMBERS OF Board of Directors AND Board of Commissioners REACHING 50% (FIFTY PERCENT) OR OVER, COVERING THE TYPE AND NUMBER OF SHARES

There is no member of the Board of Directors and Board of Commissioners holding 50% (fifty percent) shares or over in PT MNC Guna Usaha Indonesia or other company.

## 13. DISCLOSURE OF FINANCIAL RELATION AND FAMILY RELATION OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS, TO MEMBERS OF OTHER BOARD OF DIRECTORS, MEMBERS OF BOARD OF COMMISSIONERS, MEMBERS OF DPS, AND/OR SHAREHOLDERS OF THE COMPANY

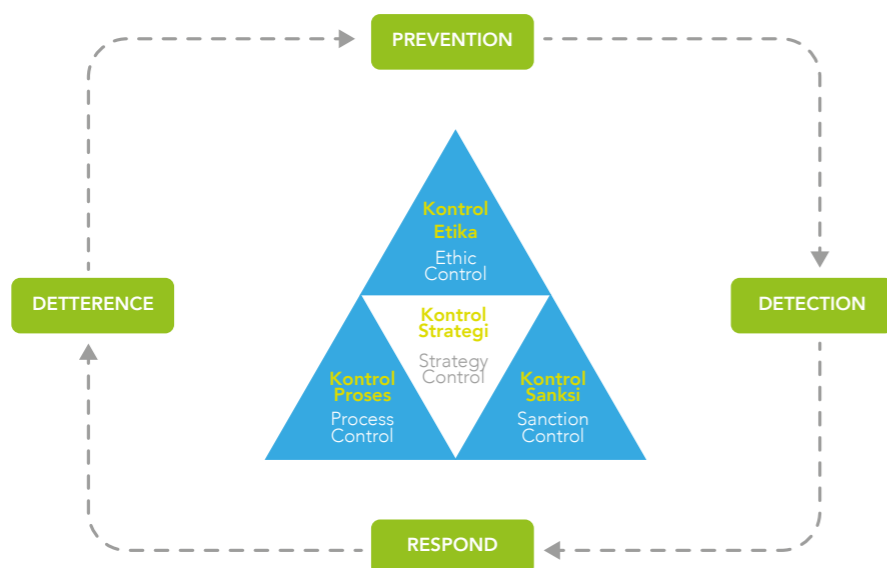
## 13. PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN

No No	Nama Name	Hubungan Dengan Relation to	Bentuk Hubungan Form of Relation				Keterangan Note
			Keuangan Financial		Keluarga Family		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
Paulus Cholot Janala – President Director		Other Director Direksi Lainnya	√		√		
		Board of Commissioners Dewan Komisaris	√		√		
		DPS DPS	√		√		
		Shareholder Pemegang Saham	√		√		
Yusnandi Liauw– Director		Other Director Direksi Lainnya	√		√		
		Board of Commissioners Dewan Komisaris	√		√		
		DPS DPS	√		√		
		Shareholder Pemegang Saham	√		√		
Henri Gunawan– Director		Other Director Direksi Lainnya	√		√		
		Board of Commissioners Dewan Komisaris	√		√		
		DPS DPS	√		√		
		Shareholder Pemegang Saham	√		√		
Wito Mailoa – President Commissioner		Other Director Direksi Lainnya	√		√		
		Board of Commissioners Dewan Komisaris	√		√		
		DPS DPS	√		√		
		Shareholder Pemegang Saham	√		√		

No No	Nama Name	Hubungan Dengan Relation to	Bentuk Hubungan Form of Relation				Keterangan Note
			Keuangan Financial		Keluarga Family		
			Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	
Erdie S. Manan – Independent Commissioner		Other Director Direksi Lainnya	√		√		
		Board of Commissioners Dewan Komisaris	√		√		
		DPS DPS	√		√		
		Shareholder Pemegang Saham	√		√		

#### 14. STRATEGI PENANGANAN ANTI FRAUD

#### 14. STRATEGY OF ANTI FRAUD HANDLING



Pengelolaan dan pengendalian fraud dilakukan berdasarkan kerangka fraud di atas, yaitu menggunakan 4 (empat) pilar yang menjadi strategi anti fraud. Keempat pilar itu adalah pencegahan (prevention), deteksi (detection), investigasi, pelaporan dan sanksi (respond), serta evaluasi dan tindak lanjut (deterrence). Keempat pilar tersebut berdasarkan 3 strategi kontrol, yaitu etika kontrol, sanksi kontrol dan proses kontrol. Ketiga strategi kontrol tersebut saling berkesinambungan dan dapat di implementasikan ke dalam masing-masing pilar strategi fraud anti fraud.

Fraud management and control are conducted based on the above fraud frame, namely by using 4 (four) pillars as the anti fraud strategy. The four pillars are prevention, detection, investigation and respond (sanction), and evaluation and deterrence (follow-up). The four pillars are based on 3 control strategy, i.e. control ethics, control sanction and control process. The three control strategies are mutually sustainable and can be implemented into each pillar of anti fraud strategy.

##### a. Pencegahan (Prevention)

Tindakan/pola kerja sistematis yang bertujuan untuk mencegah atau melindungi dari suatu tindakan fraud yang dapat menimbulkan risiko/kerugian pada perusahaan. Tindakan ini biasanya berupa suatu usaha untuk mempersulit (memperkecil/menghilangkan kesempatan) atau menghilangkan motivasi pihak yang berniat melakukan perbuatan fraud. Program pencegahan meliputi namun tidak terbatas pada beberapa aktivitas berikut ini:

##### 1. Anti Fraud Awareness

- Melakukan sosialisasi Anti Fraud Statement melalui training program anti fraud untuk seluruh karyawan secara berkala dan publikasi poster/himbauan program anti fraud (employee awareness).
- Melakukan sosialisasi atas setiap kasus fraud dalam bentuk email blasting yang berisi ringkasan kasus, sanksi yang telah diberikan, pesan manajemen dan pelajaran yang dapat diambil dari kasus tersebut.
- Menjalankan budaya anti fraud sebagai control environment dengan melalui pemahaman indikator-indikator risiko fraud dan tindak lanjut terhadap setiap kejadian fraud yang dilakukan secara berkesinambungan.
- Menindaklanjuti setiap laporan indikasi fraud yang terjadi sesegera mungkin.
- Meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan debitur (customer awareness) terhadap kemungkinan terjadinya fraud.
- Pelaksanaan system pengendalian fraud merupakan tanggung jawab dari semua pihak yang terkait di PT MNC Guna Usaha Indonesia.
- PT MNC Guna Usaha Indonesia menjalankan budaya anti fraud dengan menangani kasus secara konsisten tanpa mempertimbangkan jabatan atau lamanya bekerja pihak terkait fraud.
- Pemberian sanksi tegas terhadap pelaku fraud.
- Segala kerugian terkait fraud

##### a. Prevention

A systematic work action/pattern intended to prevent or protect from an action of fraud that may cause a risk/loss to the company. This action is usually an attempt to complicate (minimize/eliminate opportunity) or eliminate motivation of any party having intention to take an action of fraud. The prevention program includes but is not limited to some activities as follows:

##### 1. Anti Fraud Awareness

- To socialize Anti Fraud Statement by training of anti fraud program for all employees periodically and publication of poster/appeal of anti fraud program (employee awareness).
- To socialize any fraud case in the form of email blasting containing the case summary, sanction given, management message and lesson able to take from such case.
- To perform anti fraud culture as environment control by understanding the indicators of fraud risk and the follow-up on any fraud incident conducted sustainably.
- To follow-up any report on fraud indication taking place as soon as possible.
- To increase concern and vigilance of debtors (customer awareness) on possible fraud.
- The implementation of fraud control system is the responsibility of all parties related in PT MNC Guna Usaha Indonesia.
- PT MNC Guna Usaha Indonesia performs anti fraud culture by handling cases consistently without considering the position or working duration of any party related to fraud.
- Giving strict sanctions to fraud perpetrators.
- Any losses related to fraud shall be

ditanggung oleh pelaku.

- Pendidikan dan sosialisasi program anti fraud bagi karyawan baru dan lama baik karyawan tetap maupun kontrak.
2. Identifikasi Kerawanan
- Identifikasi, analisa dan penilaian terhadap potensi terjadinya risiko fraud pada setiap aktivitas atau bagian melalui review produk dan aktivitas atau bagian melalui review produk dan aktivitas baru/perubahannya, review kebijakan dan prosedur, review limit dan wewenang.
  - Penerapan basic control yang bersifat pencegahan (dual control, dual custody, dan lain-lain) dalam proses kerja.
  - Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu diperbarui terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi terjadinya fraud.
3. Know Your Employee
- Sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif untuk memperoleh rekam jejak calon karyawan secara lengkap dan akurat.
  - Sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan.
  - Pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan.
- a. Deteksi (Detection)
- Deteksi merupakan suatu aktivitas untuk mendapatkan adanya indikasi atau risiko fraud. Usaha tersebut bertujuan agar dampak kerugian yang timbul dapat dikontrol atau diminimalisir. Selayaknya harus diusahakan untuk melakukan pendeteksian sedini mungkin. Selayaknya harus diusahakan untuk melakukan pendeteksian sedini mungkin. Fungsi deteksi harus mencakup namun tidak terbatas pada aktivitas berikut :
1. Whistle Blowing
- Whistle Blowing merupakan jalur bagi karyawan untuk melaporkan adanya kecurigaan terhadap indikasi/

assumed by the perpetrators.

- Education and socialization of anti fraud program to new and old employees, and full-time as well as contract employees.
2. Identification of Vulnerability
- Identification, analysis and assessment of potential occurrence of fraud risk in any activities or divisions by review of new products and activities/their changes, review of policy and procedure, review of limit and authority.
  - Application of basic control by nature prevention (dual control, dual custody, etc.) in the work process.
  - The results of identification are documented and informed to parties concerned and constantly renewed, especially on activities considered highly risky for occurrence of fraud.
3. Know Your Employee
- An effective system and procedure of recruitment for obtaining the track record of prospective employees in complete and accurately.
  - A selection system complete with accurate qualification by considering the risk, and specified objectively and transparently.
  - Industry and monitoring of employees' character, behavior and life style.
- a. Detection
- Detection is an activity for obtaining any indication of fraud risk. This effort is intended to enable control or minimizing the impact of losses incurred. Detection should be endeavored as early as possible. Detection function should include but is not limited to the following activities:
1. Whistle Blowing
- Whistle Blowing is a line for employees to report any suspicion on indication/incident of existing

insiden adanya pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan yang ada sekaligus sebagai suatu proses yang secara tidak langsung memberdayakan karyawan untuk terlibat secara aktif dalam memerangi segala bentuk kecurangan.

- Karyawan menyampaikan informasi indikasi penyimpangan yang dapat merugikan perusahaan kepada whistle blowing melalui email antifraud.mncleasing@mncgroup.com atau antifraudleasing@mncgroup.com atau telepon/sms.
  - Seluruh karyawan PT MNC Guna Usaha Indonesia baik di kantor pusat maupun dikantor cabang bertanggung jawab untuk melaporkan adanya indikasi/kejadian fraud sesegera mungkin.
  - Pelapor diperkenankan untuk langsung melapor adanya indikasi fraud tanpa menunggu bukti-bukti terkumpul.
  - Pelapor tidak perlu untuk mencantumkan nama pelapor.
  - Kerahasiaan pelapor dijamin dan pelapor tidak akan menerima sanksi jika hal yang dilaporkan tidak terbukti kebenarannya.
  - Pelapor wajib mendapat perlindungan baik dari sisi hukum maupun dari intimidasi fisik/psikis.
  - Pelapor yang teridentifikasi dan terbukti sebagai bagian dari pelaku fraud tidak sepenuhnya dapat terbebas dari pemberian sanksi.
  - Penyembunyian adanya informasi fraud yang diketahui akan dikenakan sanksi.
  - Laporan bukan merupakan fitnah atau upaya pencemaran nama baik.
  - Setiap karyawan dan atasan harus saling mendorong untuk berani menyampaikan/melaporkan jika terjadi pelanggaran atau potensi fraud.
2. Surprise Audit
- Surprise audit merupakan salah satu metode untuk mengidentifikasi terjadinya fraud pada aktivitas

breaches to the existing regulations, at the same time as a process indirectly empowering employees to be involved actively in fighting against any form of fraud.

- Employees five information on indication of deviations that may harm the company by whistle blowing by emailantifraud.mncleasing@mncgroup.com or antifraudleasing@mncgroup.com or phone/sms.
  - All employees of PT MNC Guna Usaha Indonesia in the head office as well as in branch offices shall be responsible to report any fraud indication/incident as soon as possible.
  - The informant is allowed to directly report any fraud indication without waiting for evidences gathered.
  - The informant does not necessarily specify his/her name.
  - The informant's identity shall be kept confidential and he/she shall not receive any sanction, if the matter reported is not proven to be true.
  - The informant shall receive protection either from legal side or from physical/psychological intimidation.
  - Any informant identified and proven as part of the fraud perpetrator could not be fully discharged from the sanction given.
  - Any finding of concealed fraud information will be subject to sanction.
  - The report is not a slander or effort of defamation.
  - Any employees and superiors have to push each other to be daring in informing/reporting any occurrence of breach or potential fraud.
2. Surprise Audit
- Surprise audit is a method of identifying any occurrence of fraud in certain activities by method

tertentu dengan cara pelaksanaan tanpa diketahui oleh auditee untuk menghindari terjadinya manipulasi data atau keadaan.

- Surprise audit dapat dilakukan oleh Anti Fraud Management dan/ atau divisi lain yang memiliki fungsi investigasi.
- Tim deteksi memiliki kewenangan untuk melakukan surprise audit terhadap aktivitas tertentu yang memiliki risiko fraud tinggi berdasarkan hasil monitoring dan analisa trend fraud.
- Tim deteksi memiliki kewenangan untuk mengakses dokumen, data, serta informasi di unit bagian yang menjadi objek pemeriksaan.
- Surprise audit diutamakan dilakukan pada bagian atau aktivitas tertentu yang berisiko tinggi terjadinya fraud, seperti akuisisi pembiayaan, penanganan kredit bermasalah dan sebagainya.

### 3. Surveillance System

- Surveillance System merupakan suatu tindakan pengujian/ pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui/diadari oleh pihak yang diuji/diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti fraud.
- Surveillance system dapat dilakukan oleh Anti Fraud management dan/atau pihak internal lainnya di Perusahaan.

### 4. Kontrol Internal pada proses operasional

- Setiap unit bertanggung jawab melakukan kontrol internal yang memadai pada proses operasional harian yang dapat melakukan deteksi dini upaya fraud yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.
- Kewenangan akses terhadap data, dokumen dan informasi.
- Untuk keperluan deteksi fraud yang dilakukan melalui proses monitoring, pengamatan serta analisa atas aktivitas perbankan, diperlukan akses terhadap data, dokumen dan informasi internal.

of implementation without the auditee's knowledge to avoid data or condition manipulation.

- Surprise audit may be conducted by the Anti Fraud Management and/ or other division having the investigation function.
- The detection team has the authority to conduct a surprise audit on certain activities having high risk of fraud based on the results of monitoring and analysis of fraud trend.

- The detection team has the authority to access documents, data, and information in the division unit that becomes the audit object.

- Surprise audit is particularly conducted in certain divisions or activities highly risky for occurrence of fraud, such as financing acquisition, handling of non-performing credits, etc.

### 3. Surveillance System

- Surveillance System is an action of testing/audit taken without the knowledge/awareness of the party tested/audited in order to monitor and test the effectiveness of anti fraud policy.

- Surveillance System may be conducted by the Anti Fraud management and/ or other internal parties in the Company.

### 4. Internal Control in operational process

- Each unit shall be responsible for conducting an adequate internal control in daily operational process able to earlier detect any attempt of fraud by perpetrator according to the applied policy and procedure.

- Authority of access to data, documents and information.

- For requirement of fraud detection conducted by process of monitoring, observation and analysis on banking activities, access to internal data, documents and information is required.

### c. Respond

Tindakan lanjutan yang mengidentifikasi akar penyebab dari adanya kejadian fraud serta melakukan mitigasi dan pemulihan terhadap kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dan memastikan adanya pemberian sanksi sebagai bentuk efek jera. Tindakan lanjutan ini memberikan pesan kepada seluruh karyawan bahwa setiap indikasi fraud yang dilaporkan atau terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Tindakan ini meliputi namun tidak terbatas pada beberapa aktifitas berikut:

#### 1. Investigasi

- Investigasi dilakukan berdasarkan laporan atau terdeteksinya indikasi fraud untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lengkap dan valid, serta mencari tahu penyebab utama dari insiden fraud (root cause analysis).
- Investigasi pendahuluan dapat dilakukan oleh unit kerja terkait untuk mengumpulkan bukti-bukti awal indikasi fraud.
- Proses investigasi lebih lanjut oleh Anti Fraud Management beserta pihak – pihak terkait.
- Anti Fraud Management bertanggung jawab untuk membentuk tim investigasi dan menyiapkan langkah – langkah investigasi maksimal H+1 setelah laporan indikasi fraud diterima.
- Pelaksanaan investigasi menerapkan asas praduga tak bersalah dan pihak tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang bersalah/tersangka sebelum bukti-bukti tindakan fraud ditemukan.
- Proses investigasi harus tetap menjaga suasana kerja sehingga tidak mengganggu kegiatan operasional perusahaan.
- Selama proses investigasi dilakukan, pimpinan unit bagian dapat melakukan pembebasan tugas sementara kepada karyawannya yang diduga melakukan indikasi fraud untuk memperlancar proses investigasi.
- Dalam melakukan investigasi, tim

### c. Respond

A continued action that identifies the root cause of an existing fraud incident and that conducts mitigation and recovery on the damage/loss caused and ensures the imposition of sanction as a kind of deterrent effect. This continued action gives a message to all employees that any indication of fraud reported or detected will always be processed according to the applied investigation std and the perpetrator will be processed according to the prevailing conditions. This action is including but not limited to some activities as follows:

#### 1. Investigation

- Investigation is conducted based on the report or detection of fraud indication to gather complete and valid evidences, and to find out the main cause of fraud incident (root cause analysis).
- Preliminary investigation may be conducted by the related work unit to gather initial evidences of fraud indication.
- Further process of investigation by the Anti Fraud Management and related parties.
- Anti Fraud Management shall be responsible to establish an investigation team and prepare the investigation measures maximum day D+1 after the report on fraud indication is received.
- The implementation of investigation applies the presumption of innocence principle and the person suspected of conducting an indicated fraud may not be treated as a guilty person/suspect before the evidences of fraud are found.
- The investigation process shall keep the working atmosphere in order not to interfere with the company's operational activities.
- During the investigation process, the division unit head may temporarily release assignment of the employee suspected to conduct the indicated fraud to expedite the investigation process.
- In conducting the investigation, the

investigasi memiliki akses tidak terbatas dan berhak untuk meminta atau mengeledah dokumen, data, serta informasi apapun yang terkait dengan kasus fraud.

- Setiap unit kerja terkait bertanggung jawab untuk memberikan permintaan dari tim investigasi dan menyimpan dokumen asli dan bukti-bukti lainnya yang ditemukan selama proses investigasi.
- Tim investigasi berhak untuk melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait guna klarifikasi data atau bukti yang ditemukan.
- Semua bukti-bukti yang ditemukan bersifat rahasia yang hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berwenang dan disimpan dengan baik untuk keperluan pemeriksaan atau pembuktian pada ranah hukum.
- Jangka waktu proses investigasi sampai selesai ditentukan sesuai dengan kebutuhan tim investigasi.

## 2. Pelaporan

- Tim investigasi bertanggung jawab untuk selalu melaporkan setiap perkembangan investigasi baik secara lisan maupun tertulis kepada investigation Department Head selama proses investigasi dan membuat laporan investigasi secara lengkap dan tertulis setelah proses investigasi selesai.
- Laporan Investigasi sekurang-kurangnya berisi modus operandi, pihak-pihak yang terlibat, hasil verifikasi data dan bukti, faktor penyebab terjadinya fraud, ketentuan yang dilanggar, jumlah kerugian yang ditimbulkan, rekomendasi perbaikan, dan tindak lanjut yang harus dilakukan.
- Investigation Department Head bertanggung jawab untuk melakukan review laporan hasil investigasi sebelum ditujukan kepada management dan pihak-pihak terkait.
- Kasus fraud dapat dieskalasikan lebih lanjut ke ranah/petugas hukum sesuai dengan keputusan yang

investigation team shall have an unlimited access and the right to ask or search for documents, data, and information whatsoever related to the fraud case.

- Each related work unit shall be responsible to give anything requested by the investigation team and keep the original documents and other evidences found during the investigation process.
- The investigation team shall be entitled to interview related parties for clarification of the data or evidences found.
- All evidences found are confidential and shall only be accessible by the authorized parties and be kept properly for requirement of examination or proving in the realm of law.
- The period of investigation process until finished shall be determined according to the need of the investigation team.

## 2. Reporting

- The investigation team shall be responsible to constantly report any investigation progress either verbally or in writing to the Investigation Department Head during the investigation process and make the investigation report in complete and writing after the investigation process has been completed.
- The investigation report shall contain at least the modus operandi, parties involved, results of data and evidences verification, factors causing the fraud occurrence, conditions breached, amount of loss caused, correction recommendation, and follow-up to be conducted.
- The Investigation Department Head shall be responsible to conduct review on the report of investigation result before submitted to the management and related parties.
- A fraud case may be escalated further to the realm/officer of law according to the decision made by

diambil oleh manajemen.

## 3. Sanksi

- Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan dan konsisten.
- Pihak yang terbukti telah melakukan tindakan fraud diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
- Pihak yang mengetahui adanya tindakan fraud tetapi tidak segera melaporkan kejadian tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Pengenaan sanksi dapat ditetapkan secara internal atau melalui jalur hukum.
- Penetapan tindakan indisipliner secara tegas dan konsisten menjadi pesan bahwa PT MNC Guna Usaha Indonesia menganggap fraud sebagai prioritas utama.
- Pihak yang dilaporkan melakukan indikasi fraud namun kemudian tidak terbukti, maka pihak tersebut wajib dilakukan rehabilitasi nama baiknya.
- Mekanisme dan wewenang pengenaan sanksi diatur dalam kebijakan terpisah.

## c. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut (Deterrence)

Merupakan bagian dari sistem pengendalian fraud yang memuat langkah-langkah dalam rangka menjauhkan keinginan calon pelaku untuk melakukan fraud atau efek jera. Pada tahap ini langkah-langkah yang diambil perlu dikomunikasikan secara tepat untuk memastikan efektivitas dari strategi tersebut, adapun hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara tepat adalah :

### 1. Pemantauan

- Mengidentifikasi tindakan perbaikan dan upaya untuk mengurangi kerugian dari kasus fraud yang terjadi.
- Memastikan bahwa rekomendasi perbaikan atas kasus fraud baik dari unit investigasi, unit kontrol dan unit kerja lainnya termasuk Direksi atau Dewan Komisaris dilaksanakan.
- Melakukan update informasi perkembangan proses kepegawaian, proses ke ranah hukum atau litigasi atas pelaku fraud dan proses recovery bila ada.

the management.

## 3. Sanction

- The policy on sanction imposition shall be applied transparently and consistently.
- Any party proven of having taken an action of fraud shall be given a sanction according to the applied regulation.
- Any party knowing an existing action of fraud, but not immediately reporting such incident, may be subject to sanction according to the applied regulation.
- The imposition of sanction may be specified internally or by legal route.
- The imposition of disciplinary actions firmly and consistently indicates a message that PT MNC Guna Usaha Indonesia considers fraud as the main priority.
- Any party reported of conducting an indicated fraud, but later not proven, shall be subject to rehabilitation of his/her good name.
- The mechanism and authority in sanction imposition are regulated in a separate policy.

## c. Monitoring, evaluation and deterrence (follow-up)

Are parts of the fraud control system containing the measures in order to dissociate prospective perpetrators from the desire to conduct a fraud or as a deterrent effect. In this stage, the measures taken need to be communicated appropriately to ensure the effectiveness of such strategy. The matters need to be communicated appropriately are:

### 1. Monitoring

- To identify corrective measures and efforts to minimize losses from occurrence of fraud cases.
- To ensure that the recommended corrections on any fraud cases, either from the investigation unit, control unit and other work units, including the Board of Directors or Board of Commissioners, are carried out.
- To update information on development of employment process, process to the realm of law or litigation on a fraud perpetrator and the recovery process if any.



## 2. Evaluasi

- Evaluasi dilakukan secara berkala terhadap kejadian fraud untuk kemudian ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian internal.
- Evaluasi juga dilakukan pada aktivitas lainnya yang terkait mengenai kecukupan internal kontrol dan sistem. Evaluasi juga memasukkan unsur eksternal yang relevan, misalnya kejadian fraud yang terjadi di perusahaan lain.
- Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, maka perusahaan perlu untuk memelihara data kejadian fraud yang terjadi (consolidated – fraud database).

## 3. Tindak lanjut

- Tindak lanjut dilakukan untuk memperbaiki kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian internal agar dapat mencegah terulangnya kembali fraud karena kelemahan serupa.
- Tindak lanjut berupa rekomendasi dari manajemen dan/atau unit-unit yang terkait, yang diimplementasikan baik secara luas maupun spesifik pada unit-unit terkait.
- Pemantauan atas pelaksanaan rekomendasi perbaikan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan dan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan.

## 2. Evaluation

- Evaluation is conducted periodically on fraud incidents to further determine the required corrective measures, including strengthening the internal control system.
- Evaluation is also conducted in other related activities on the adequacy of internal control and system. Evaluation also includes any relevant external elements, for example fraud incidents occurring in other companies.
- To support the implementation of evaluation, the company needs to maintain data of occurring fraud incidents – fraud database).

## 3. Follow-up

- Follow-up is conducted to correct weaknesses and strengthen the internal control system to enable preventing any repeated frauds due to the same weaknesses.
- Follow-up is in the form of recommendations from the management and/or related units, which are implemented widely or specifically in the related units.
- Monitoring on the implementation of recommendations of correction should be conducted periodically to ensure implementation and effectiveness of the recommendations given.

## 15. PENGUNGKAPAN HAL-HAL PENTING LAINNYA

### a. Sertifikasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat tertentu wajib mengikuti sertifikasi di bidang pembiayaan, manajemen risiko, atau penagihan sesuai kriteria.

#### 1. Sertifikasi Ahli Pembiayaan bagi Direksi

No No	Nama Pejabat Name of Official	Posisi Position	No. Sertifikat Certificate No.	Tgl. Sertifikat Certificate Date
	Paulus Cholot Janala	Direktur Utama President Director	8177-50029-600-0218	3 Februari 2018 3rd February 2018
	Yusnandi Liauw	Direktur Director	8177-50006-600-0717	7 Juli 2017 7th July 2017
	Henri Gunawan	Direktur Director	8177-50042-600-0919	8 September 2019 8th September 2019

#### 1. Sertifikasi Dasar Pembiayaan bagi Komisaris

No No	Nama Pejabat Name of Official	Posisi Position	No. Sertifikat Certificate No.	Tgl. Sertifikat Certificate Date
	Erdie S. Manan	Komisaris Independen Independent Commissioner	8177-50009-550-0717	27 Juli 2017 27th July 2017
	Wito Mailoa	Komisaris Utama President Commissioner	8177-50035-550-0219	7 Februari 2019 7th February 2019

#### 1. Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Direksi yang Membawahkan Manajemen Risiko dan Pejabat Manajemen Risiko

No No	Nama Pejabat Name of Official	Posisi Position	No. Sertifikat Certificate No.	Tgl. Sertifikat Certificate Date
	Paulus Cholot Janala	Direktur Utama President Director	1804171147000557	17 April 2018 17th April 2018
	Nurul Fikri Maulana	Compliance & Risk Department Head Compliance & Risk Department Head	1804171147000550	17 April 2018 17th April 2018

## 15. DISCLOSURE OF OTHER SIGNIFICANT MATTERS

### a. Certification

In accordance with OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 on Coordination of Finance Company Business, the Board of Commissioners, Board of Directors, and certain officials shall take certification in financing, risk management, or billing according to the criteria.

#### 1. Certification of Financing Expert for Directors

#### 1. Certification of Basic Financing for Commissioners

#### 1. Certification of Risk Management for Directors Supervising the Risk Management and Risk Management Officials

- |   |   |
|---|---|
| <p>b. Tenaga Kerja Asing<br/>Selama tahun 2019, PT MNC Guna Usaha Indonesia tidak mempekerjakan tenaga kerja asing.</p>   | <p>b. Foreign Manpower<br/>In 2019, PT MNC Guna Usaha Indonesia did not employ foreign manpower.</p>  |
| <p>c. Transaksi Material dengan Pihak Terkait<br/>Penyaluran pembiayaan kepada pihak terkait mengacu kepada ketentuan internal perusahaan mengenai Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan kepada Pihak Terkait yang mematuhi dan mengacu kepada Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.</p> | <p>c. Material Transactions with Related Parties<br/>Finance distribution to related parties shall refer to the company's internal conditions on the Maximum Limit for Providing Financing to Related Parties by observing and referring to OJK Regulation No. 35/POJK.05/2018 on Coordination of Finance Company Business.</p> |
| <p>d. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi</p>   | <p>d. Conflict of interest in process and/or that might happen</p>  |

No	Nama Dan Jabatan Pihak Yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Party Having Conflict of Interest	Nama Dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Type of Transaction	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah) Transaction Value (Million Rupiah)	Keterangan *) Note *)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

- d. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)      d. Number of Internal Frauds

Penyimpangan Internal Dalam 1 (Satu) Tahun Internal Frauds In 1 (one) Year	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Number of Cases Conducted by		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota DPS, dan Anggota Direksi Member of Board of Commissioners, Member of DPS and Member of Board of Directors	Pegawai Tetap Full-time Employee	Pegawai Tidak Tetap Temporary Employee
Total Penyimpangan Total Frauds	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Diselesaikan Settled	Nihil	Nihil	Nihil
Dalam Proses Penyelesaian di Internal In Process of Settlement Internally	Nihil	Nihil	Nihil
Belum Diupayakan Penyelesaian No Settlement is Attempted	Nihil	Nihil	Nihil
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum Followed up by Legal Process	Nihil	Nihil	Nihil

- d. Permasalahan Hukum      d. Legal Issues

Permasalahan Hukum Legal Issue	Jumlah Kasus Number of Cases	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap Having received a final and binding decision	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian di Pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus Perdata In settlement process in the Court and in Alternative Dispute Settlement Institution for Civil Cases	Nihil	Nihil
Total Total	Nihil	Nihil

- |  |   |
|--|---|
| <p>g. Etika Bisnis Perusahaan<br/>Manajemen Perusahaan menyadari bahwa keberlanjutan suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh perilaku korporasi atau etika bisnis perusahaan, sehingga etika bisnis perusahaan harus selaras dengan hukum, peraturan, etika, dan sistem manajemen yang efektif. Dalam rangka membangun perilaku korporasi tersebut bagi Komisaris, Direksi, dan segenap karyawan Perusahaan, maka diterbitkan kebijakan Code Of Conduct &amp; Corporate Values.</p> | <p>g. Company's Business Ethics<br/>The Company's management realizes that the continuation of a company is greatly influenced by the company's corporate behavior or business ethics, therefore the company's business ethics shall be in tune with the law, regulations, ethics, and effective management system. In order to build such corporate behavior for the Company's Commissioners, Directors and all employees, has been issued the policy of Code Of Conduct &amp; Corporate Values.</p> |
|--|---|

Panduan perilaku digali berdasarkan visi, misi, nilai-nilai budaya, komitmen Perusahaan dan standar etika. Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia harus mengetahui, memahami, menghayati dan sepakat untuk menerapkan kebijakan Code Of Conduct & Corporate Values sebagai landasan moral, sikap, dan etika dalam bertindak dan berperilaku, sehingga daripadanya dapat terjamin pencapaian standar kerja yang maksimal.

Hal-hal yang dicakup dalam kebijakan tersebut, antara lain:

1. Integritas dalam Berusaha, seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia diharapkan memiliki integritas sebagai berikut :
  - a. Patuh pada ketentuan dan perundangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang maupun internal Perusahaan.
  - b. Mendukung prinsip-prinsip persaingan usaha sejalan dengan undang-undang persaingan usaha serta undang-undang maupun peraturan terkait.
  - c. Menghindari tindakan melanggar hukum, serta persaingan usaha yang tidak sehat atau perilaku menyimpang dalam upaya mencari laba.
  - d. Mengupayakan perolehan informasi melalui cara-cara yang sah. Informasi disimpan serta digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku.
  - e. Melayani setiap pelanggan secara profesional dengan sikap sopan, ramah dan wajar. Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia harus tanggap dan berusaha memahami kebutuhan serta mencari alternatif solusi atas masalah pelanggan dengan sebaik-baiknya dan dengan tetap memperhatikan kepentingan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Setiap pihak di dalam Perusahaan yang berkaitan dengan pemasaran, penyiapan proposal, administrasi, negosiasi termasuk

The guidelines for delving behavior are based on the Company's vision, mission, cultural values, commitment and the standard of ethics. All members of PT MNC Guna Usaha Indonesia have to know, understand, appreciate and agree to apply the policy of Code Of Conduct & Corporate Values as the foundation of moral, attitude and ethics in acting and behaving, so that it will ensure maximum achievement of work standard.

Aspects covered in the policy are namely:

1. Integrity in Undertaking Business; all members of PT MNC Guna Usaha Indonesia are expected to have the following integrities:
  - a. To observe the prevailing provisions and legislation, either specified by the authorities or the Company internally.
  - b. To support the principles of business competitive in line with the law on business competitive and related laws and regulations.
  - c. To avoid unlawful acts, and unfair business competitive or deviant behavior in the effort of profit making.
  - d. To strive for obtaining information through lawful means. Information shall be kept and used according to the applied principles of business ethics.
  - e. To serve any customers professionally with polite, friendly and reasonable attitude.  
All members of PT MNC Guna Usaha Indonesia must be responsive and try to understand the needs and find any alternative solution on customers' problems properly, while considering the Company's interest and the prevailing legislation.
2. Any parties in the Company related to marketing, proposal preparation, administration, negotiation including

akuntansi untuk biaya dan kewajiban, kajian atas proyek-proyek tertentu dan penulisan laporan harus menyadari pentingnya membuat pernyataan tertulis maupun lisan yang akurat dan klaim yang benar kepada pimpinan, Pemerintah maupun kepada pihak lain. Pihak yang sengaja menyampaikan pernyataan, laporan, keterangan atau klaim yang tidak benar atau yang menyesatkan atau yang melibatkan adanya konspirasi dengan orang/ pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan dapat dikenakan hukuman administratif, pidana dan perdata.

3. Seluruh jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia dilarang untuk membuat pernyataan palsu.
4. Setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia dilarang melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan implikasi lanjutannya.
5. Perusahaan melarang setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia menerima hadiah dalam segala macam bentuk penerimaan oleh pejabat atau karyawan Perusahaan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perusahaan dengan maksud mempengaruhi keputusan agar menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah.
6. Perusahaan melarang setiap jajaran PT MNC Guna Usaha Indonesia untuk menerima segala bentuk uang, komisi, hadiah, fasilitas, dan apapun yang bernilai manfaat, yang diberikan atau diminta, sebagai kompensasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau perilaku yang memihak secara tidak sah dari rekanan atau konsumen atau pihak lain. Penegakan disiplin dari segala bentuk penerimaan suap ini adalah pemecatan, dengan tidak mengurangi hak Perusahaan untuk memproses sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
7. Pada prinsipnya entertainment hanya dapat dilakukan oleh Direksi, Komisaris dan Pekerja tertentu untuk kepentingan Perusahaan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai Perusahaan.

accounting for costs and liabilities, study on certain projects and report writing should realize the significance in making any written and verbal statements accurately and correct claims to the management, Government or to other parties. Any party intentionally giving any incorrect or misleading statement, report, information or claim or that involves conspiracy with other person/party that may harm the Company may be subject to an administrative, criminal and civil law.

3. All members of PT MNC Guna Usaha Indonesia are prohibited from making a false statement.
4. All members of PT MNC Guna Usaha Indonesia are prohibited from doing things potentially causing conflicts of interest and the continued implications.
5. The company prohibits any members of PT MNC Guna Usaha Indonesia from accepting gifts of any kinds by the Company's officials or employees from parties having interest in the Company in order to influence any decision to benefit the gift givers' interest.
6. The company prohibits any members of PT MNC Guna Usaha Indonesia from accepting any kinds of money, commission, gift, facility, and anything worth the benefit, given or asked, as compensation directly or indirectly to receive special treatment or illegitimate partial behavior from vendors or consumers or other parties. The enforcement of discipline from any kinds of receipt of bribes shall be dismissal, without prejudice to the Company's right to process in accordance with the provisions of prevailing legislation.
7. Principally, entertainment may only be conducted by the Directors, Commissioners and certain Employees in the Company's interest and carried out according to the prevailing conditions and not conflicting with the Company's values.

8. Perusahaan melarang setiap bentuk penyelewengan dan senantiasa menerapkan prosedur yang wajib diikuti berkaitan dengan temuan, pengakuan, pelaporan, penyelidikan dan penyidikan terhadap kecurangan adanya penyelewengan.
9. Tidak memperkenankan karyawan Perusahaan menjadi pengurus partai politik yang berpotensi menyita jam kerja maupun konsentrasi, kecuali dengan persetujuan atasan.

h. Informasi material lain mengenai Perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan wewenang RUPS dan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, antara lain berupa intervensi pemilik, perselisihan internal, atau permasalahan yang timbul sebagai dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

Selama tahun 2019, tidak ditemukan adanya intervensi pemilik, perselisihan internal, maupun permasalahan yang timbul secara langsung dari dampak kebijakan remunerasi pada Perusahaan.

8. The Company prohibits any kind of misappropriation and consistently applies the procedure required to observe related to any findings, recognition, reporting, inquiry and investigation on any fraud of misappropriation.
9. Not allowing the Company's employees to become members of political party management that will potentially consume the work hours or concentration, unless by the superior's approval.

h. Other material information on the Company related to the implementation of RUPS' authority and the implementation of Good Corporate Governance are among others owner's intervention, internal disputes, or issues arising as the impact of remuneration policy in the Company.

In 2019, no owner's intervention, internal dispute or issue arising directly from the impact of remuneration policy is found in the Company.

## PERKARA PENTING YANG DI HADAPI

Important Cases Encountered

Pada tanggal Laporan Tahunan ini dibuat, Perseroan tidak terlibat dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana dan perpajakan maupun suatu sengketa hukum/perselisihan lain yang terjadi di luar pengadilan, yang dapat berpengaruh secara material terhadap kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

On the date this Annual Report is made, the Company is not involved in any cases, either civil, criminal, taxation cases or legal dispute/other disputes occurring outside the court, which may materially affect the Company's financial condition and business activities.



TANGGUNG JAWAB  
SOSIAL DAN LINGKUNGAN

**07**

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Corporate Governance

### TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Perseroan merupakan anak perusahaan PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNC) yang tergabung dalam Group MNC Financial Services yang dalam menjalankan usahanya selalu memperhatikan, menerapkan dan mengembangkan program-program pengembangan bidang sosial dan lingkungan hidup. Perseroan mengupayakan partisipasi dari komunitas di sekitar tempat usaha Perseroan dan pelanggan untuk ikut terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan hidup yang diadakan oleh Perseroan.

Program-program CSR yang dilakukan oleh Perseroan di tahun 2018 antara lain sebagai berikut:

### SOCIAL AND ENVIRONMENT RESPONSIBILITIES

The company is a subsidiary of PT MNC Kapital Indonesia Tbk (MNC) joined in Group MNC Financial Services which in undertaking the business always consider, apply and develop social and environment development programs. The Company endeavors participation of communities around the Company's business places and the customers to be involved in the social and environment activities organized by the Company.

The CSR programs conducted by the Company in 2019 are among others:

No No	Tanggal Kegiatan Date of Activity	Tempat Kegiatan Place of Activity	Kegiatan yang dilakukan Activity Conducted
1	11 Agustus 2019 11th August 2019	MNC Tower, Jakarta	MNC Peduli bersama mitra kerja menyalurkan 168 hewan kurban (3 ekor sapi limusin, 17 ekor sapi ukuran biasa dan 148 ekor kambing) untuk masyarakat di sekitar MNC Tower MNC Concern together with the work partners distributed 168 sacrificial animals (3 limousine cows, 17 normal size cows and 148 goats) for the community around MNC Tower
2	25 Agustus 2019 25th August 2019	Taman TPA Rawa Kucing, Tangerang	MNC Peduli merayakan HUT Republik Indonesia ke-74 dengan anak-anak dari Rumah Belajar Cahaya Indonesia MNC Concern celebrated the 74th Anniversary of Republic of Indonesia with children of Cahaya Indonesia Learning House.
3	18 Desember 2019 18th December 2019	Gedung INews, Jakarta	MNC Peduli bekerjasama dengan PMI Kota Depok mengadakan donor darah bagi seluruh karyawan yang ada di Kebon Sirih MNC Concern in cooperation with the Indonesian Red Cross in Depok City held blood donor to all employees in Kebon Sirih.

## PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2018 PT MNC GUNA USAHA INDONESIA

Statement of Board of Commissioners and Board of Directors on Responsibility for Annual Report

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PT MNC Guna Usaha Indonesia tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggungjawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perseroan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We the undersigned states that all information in the annual report 2019 of PT MNC Guna Usaha Indonesia has been contained in complete and we are fully responsible for the correctness of the Company's annual report content.

This statement is made truly.

Jakarta, 25 Februari 2019  
Jakarta, 24th February 2020

**DEWAN KOMISARIS**  
BOARD OF COMMISSIONERS



**Wito Mailoa**

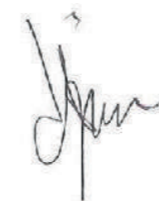
Komisaris Utama



**Erdie Suriaherdadi Manan**

Komisaris Independen

**DIREKSI**



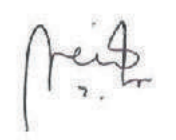
**Paulus Cholot Janala**

Direktur Utama



**Yusnandi Liauw**

Direktur



**Meita Liliarsari**

Direktur



**PT. MNC Guna Usaha Indonesia**

MNC Tower Lantai 23  
Jl. Kebon Sirih No. 17-19  
Jakarta Pusat 10340  
Indonesia

☎ : (021) 3910 993

📠 : (021) 3911 093

🌐 : [www.mncleasing.com](http://www.mncleasing.com)